

HUBUNGAN KEBIJAKAN DAN POTENSI PANGKALAN DENGAN KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN FUNGSI OPERASI

**Tesis diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Magister Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

**SUDIRMAN
NIM : 014287364**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA, 2007**

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

Tesis yang berjudul

**“Hubungan Kebijakan Dan Potensi Pangkalan Dengan
Keberhasilan Penyelenggaraan Fungsi Operasi”**

**Adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang
dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar**

Jakarta, 11 Maret 2007

Yang Menyatakan



**(Ir. Sudirman, S.E.)
NIM 014287364**



LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis : Hubungan Kebijakan Dan Potensi Pangkalan
Dengan Keberhasilan Penyelenggaraan
Fungsi Operasi

Penyusun Tesis : Ir. Sudirman, S.E.

NIM : 014287364


Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Kamis/15 Februari 2007

Menyetujui :

Pembimbing II,


Pembimbing I,


DR. Prasetya Irawan, M.Sc.
NIP. 131569964


DR. HM. Aries Djaenuri MA.
NIP. 640004740



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana


Prof. DR. H. Udin S. Winatapura
NIP. 130367151

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Ir. Sudirman, S.E.
NIM : 014287364
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul Tesis : Hubungan Kebijakan Dan Potensi Pangkalan
 Dengan Keberhasilan Penyelenggaraan
 Fungsi Operasi

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis
 Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik,
 Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Kamis/15 Februari 2007
Waktu : 08.15 - 09.30 WIB

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji :

DR. Suciati

Penguji Ahli :

M. Qudrat Nugraha Ph.D

Pembimbing I :

DR. HM. Aries Djaenuri MA.

Pembimbing II :

DR. Prasetya Irawan, M.Sc



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji dan syukur kehadiran Illahi Robbi, karena berkat Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas akhir berupa Tesis yang berjudul "*Hubungan Kebijakan Dan Potensi Pangkalan Dengan Keberhasilan Penyelenggaraan Fungsi Operasi*". Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) Program Studi Magister Administrasi Publik.

Dalam kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

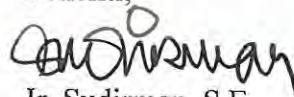
1. Ibu DR. Suciati, selaku Ketua Komisi Penguji yang telah banyak memberikan kesempatan dan keberanian kepada penulis untuk berpikiran maju, ilmiah dan pragmatis, sehingga hasil penelitian yang penulis lakukan menjadi semakin penting dan memberikan landasan bagi penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan sistem jaminan kualitas penyelenggaraan suatu fungsi operasi pertahanan keamanan;
2. Bapak DR. H.M. Aries Djaenuri, MA., selaku Pembimbing-I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan, baik berupa pandangan maupun wawasan, sehingga dapat dilakukan penyempurnaan terutama yang berkaitan dengan pengujian hipotesis dari teori-teori yang diajukan dalam Tesis ini;
3. Bapak DR. Prasetyo Irawan, M.Sc. selaku Pembimbing-II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan serta koreksi khususnya dalam penggunaan metode penelitian guna menguji teori yang diajukan dalam Tesis ini;
4. Bapak M. Qudrat Nugraha Ph.D, selaku Penguji Ahli yang telah membesarkan arti pentingnya sebuah penelitian yang penulis lakukan, sehingga hasil penelitian ini menjadi suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra, MA. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka beserta staf, yang selama ini telah memberikan fasilitas dan pelayanan dalam mengikuti Program Magister;
6. Kepala Staf Angkatan Laut beserta staf, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Tesis ini;
7. Rekan-rekan mahasiswa/i Program Magister Bidang kajian utama Ilmu Administrasi Publik yang telah banyak mendorong baik moril maupun materil, sehingga terwujudnya Tesis ini;
8. Istri dan Putra-Putri tercinta yang dengan setia dan penuh kesabaran serta ketabahan memberikan dukungan dalam menyelesaikan Program Magister;
9. Orang Tua dan Adik-adik serta Ibu dan Bapak Mertua yang tiada hentinya memberikan dukungan dalam menyelesaikan Program Magister;
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi Program Magister di Universitas Terbuka.

Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti Program Magister ini, mendapatkan balasan dari Allah SWT, dan penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak, khususnya penulis.

Jakarta, 11 Maret 2007

Peneliti,



Ir. Sudirman, S.E.

014287364



DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Masalah	8
	C. Perumusan Masalah Penelitian	9
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II	KERANGKA TEORI	11
	A. Administrasi, Administrasi Publik dan Penyelenggaraan Administrasi Publik	11
	B. Asas Dan Fungsi Penyelenggaraan Administrasi Publik	16
	C. Hubungan Penyelenggaraan Administrasi Publik Dengan Kebijakan Publik	21
	D. Strategi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Fungsi Operasi	24
	E. Strategi Pengembangan Potensi Pangkalan Dalam Penyelenggaraan Fungsi Operasi	30
	F. Keberhasilan Penyelenggaraan Fungsi Operasi	34
	G. Hubungan Antar Variabel	37
	H. Bagan Kerangka Pemikiran/Kerangka Konsep	38
	I. Hipotesis	41
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	43
	A. Definisi Konsep	43
	B. Tipe Penelitian	45
	C. Pendekatan Penelitian	45
	D. Populasi dan Sampel Penelitian	46

1.	Populasi	46
2.	Sampel	46
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	47
1.	Teknik Pengumpulan Data	47
2.	Teknik Pengolahan Data	49
F.	Teknik Analisis Data	51
G.	Lokasi dan Jadwal Penelitian	54
1.	Lokasi	54
2.	Jadwal Penelitian	54
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A.	Gambaran Umum Obyek Penelitian	55
1.	Kondisi Umum	55
2.	Struktur Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut	58
3.	Profil Pangkalan TNI AL Sebagai Pendukung SSAT	59
B.	Analisa Deskriptif Hubungan Kebijakan Dan Potensi Pangkalan TNI AL Dengan Keberhasilan Penyelenggaraan Fungsi Operasi	66
1.	Aspek Kebijakan TNI AL	66
2.	Aspek Potensi Pangkalan TNI AL	75
3.	Aspek Keberhasilan Fungsi Operasi	89
C.	Analisis Kuantitatif Hubungan Kebijakan Dan Potensi Pangkalan Dengan Keberhasilan Penyelenggaraan Fungsi Operasi	132
1.	Hubungan Kebijakan TNI AL (X-1) Dengan Keberhasilan Penyelenggaraan Fungsi Operasi (Y)	133
2.	Hubungan Potensi Pangkalan TNI AL (X-2) Dengan Keberhasilan Penyelenggaraan Fungsi Operasi (Y)	134
3.	Hubungan Kebijakan TNI AL (X-1) Dan Potensi Pangkalan TNI AL (X-2) Secara Bersama-sama Dengan Keberhasilan Penyelenggaraan Fungsi Operasi (Y)	136

D.	Analisa Hasil Penelitian dan Pengujian Hipótesis.....	139
1.	Analisa Hasil Penelitsn Deskriptip	139
2.	Analisa Hasil Pengujian Hipotesis	141
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	157
A.	Kesimpulan	157
B.	Saran	158

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

		Halaman
TABEL-01	Rekapitulasi Hasil Operasi TNI AL dari Tahun 2000 s/d Tahun 2004	6
TABEL-02	Jam Operasi KRI Berdasarkan Jenis Kegiatan Dari Tahun 2000 s/d Tahun 2004	7
TABEL-03	Variabel, Dimensi, Indikator, Sumber Data, dan Item	40
TABEL-04	Jumlah Sampel Penelitian	46
TABEL-05	Kriteria Interpretasi Koefisien Korelasi.....	54
TABEL-06	Tanggapan Responden Tentang Kebijakan Berdasarkan Potensi Pangkalan.....	67
TABEL-07	Tanggapan Responden Tentang Kebijakan Berdasarkan Kebutuhan Pangkalan.....	68
TABEL-08	Tanggapan Responden Tentang Kebijakan Berdasarkan Keinginan Masyarakat	69
TABEL-09	Tanggapan Responden Tentang Kebijakan Berdasarkan Karakteristik Wilayah	70
TABEL-10	Tanggapan Responden Tentang Kebijakan Berdasarkan Karakteristik Mata Pencaharian Masyarakat	71
TABEL-11	Tanggapan Responden Tentang Kebijakan Berdasarkan Kesesuaian Dengan Potensi SDA Wilayah	72
TABEL-12	Tanggapan Responden Tentang Proses Kebijakan Mudah Diwujudkan (Ekonomis)	73
TABEL-13	Tanggapan Responden Tentang Proses Kebijakan Mudah Diimplementasikan.....	73
TABEL-14	Tanggapan Responden Tentang Tugas yang Rumit dan Sulit sebagai Proses Pembelajaran.....	74
TABEL-15	Tanggapan Responden Tentang Rencana program pengembangan wilayah	76

TABEL-16	Tanggapan Responden Tentang Perencanaan Anggaran	77
TABEL-17	Tanggapan Responden Tentang Pengembangan Partisipasi Masyarakat	78
TABEL-18	Tanggapan Responden Tentang Program Pola Kemitraan	78
TABEL-19	Tanggapan Responden Tentang Produk Unggulan.....	79
TABEL-20	Tanggapan Responden Tentang Kebijakan Yang Bersifat Antisipatif.....	80
TABEL-21	Tanggapan Responden Tentang Kemampuan Administratif.	81
TABEL-22	Tanggapan Responden Tentang Kemampuan Pemerintah	82
TABEL-23	Tanggapan Responden Tentang Kemampuan Menterjemahkan Kebijakan	83
TABEL-24	Tanggapan Responden Tentang Tingkat Pendidikan Memadai	84
TABEL-25	Tanggapan Responden Tentang Kemampuan Dalam Pelayanan	85
TABEL-26	Tanggapan Responden Tentang Hubungan Dengan Instansi Yang Terkait	86
TABEL-27	Tanggapan Responden Tentang Hubungan Dengan Pihak Suwasta	87
TABEL-28	Tanggapan Responden Tentang Hubungan Dengan Pemerintah Daerah (Pemda)	88
TABEL-29	Rekapitulasi Tanggapan Responden Aspek <i>Conection</i>	89
TABEL-30	Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Operasi Penyelidikan Bidang Maritim	89
TABEL-31	Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Operasi Pengamanan Bidang Maritim	90
TABEL-32	Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Operasi Penggalangan Bidang Maritim	91
TABEL-33	Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Operasi Pertahanan Bidang Maritim	92

TABEL-34	Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Operasi Keamanan Maritim	93
TABEL-35	Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Dukungan Operasi	94
TABEL-36	Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Operasi Matra	94
TABEL-37	Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Latihan Operasi Gabungan	95
TABEL-38	Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Latihan Bersama Dan Meeting Dengan Negara-Negara Sahabat	96
TABEL-39	Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Operasi Penayekatan Di Perairan	97
TABEL-40	Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Operasi Pengamanan Pantai	97
TABEL-41	Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Penyelenggaraan Operasi Di Perairan	98
TABEL-42	Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Penyelenggaraan Operasi Illegal Fishing Dan Illegal Logging Serta Bantuan Bantuan Kemanusiaan	99
TABEL-43	Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Operasi Pengamanan Di Wilayah Perbatasan	100
TABEL-44	Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Operasi Penanggulangan Perompakan Di Laut, Penyelundupan Dan Imigran Gelap	101
TABEL-45	Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Operasi Pengamanan AL.....	102
TABEL-46	Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Penyelenggaraan Operasi Kamla	103
TABEL-47	Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Operasi Penanggulangan Bencana Alam	103
TABEL-48	Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Operasi Muhibah	104

TABEL-49	Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Operasi Pemberdayaan Lingkungan Maritim	105
TABEL-50	Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Operasi Pemberdayaan Komponen Cadangan	106
TABEL-51	Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Operasi Peningkatan Gakkum Dan Gaklat Di Laut	106
TABEL-52	Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Koordinasi Instansi Kamla Dengan Pihak Terkait	107
TABEL-53	Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Upaya Memaksimalkan Kerjasama	108
TABEL-54	Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Upaya Memberikan Bantuan Hukum	109
TABEL-55	Rekapitulasi Tanggapan Responden Keberhasilan Fungsi Operasi Pada Aspek Kelancaran Penyelenggaraan Fungsi Operasi	109
TABEL-56	Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Operasi Penyelidikan Bidang Maritim	110
TABEL-57	Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Operasi Pengamanan Bidang Maritim	111
TABEL-58	Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Operasi Penggalangan Bidang Maritim	112
TABEL-59	Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Operasi Pertahanan Bidang Maritim	113
TABEL-60	Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Operasi Keamanan Bidang Maritim	114
TABEL-61	Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Dukungan Dalam Penyelenggaraan Operasi	115
TABEL-62	Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Latihan Operasi Matra	115
TABEL-63	Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Penyelenggaraan Latihan Operasi Gabungan	116
TABEL-64	Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Penyelenggaraan Latihan Bersama Dan <i>Meeting</i> Dengan Negara-Negara Sahabat	117

TABEL-65	Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Operasi Penyekatan Di Perairan	118
TABEL-66	Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Operasi Pengamanan Pantai	119
TABEL-67	Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Operasi Di Perairan	120
TABEL-68	Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Operasi Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> Dan <i>Illegal Logging</i> Serta Operasi Bantuan Kemanusiaan	121
TABEL-69	Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Operasi Pengamanan Di Wilayah Perbatasan	122
TABEL-70	Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Operasi Penanggulangan Perompakan Di Laut, Penyelundupan Dan Imigran Gelap	123
TABEL-71	Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Operasi Pengamanan ALKI	123
TABEL-72	Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Operasi Kamla	124
TABEL-73	Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Operasi Penanggulangan Bencana Alam	125
TABEL-74	Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Penyelenggaraan Operasi Muhibah	126
TABEL-75	Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Pemberdayaan Lingkungan Maritim Yang Kondusif	127
TABEL-76	Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Penyiapan Komponen Cadangan Dan Komponen Pendukung	128
TABEL-77	Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Peningkatan Gakkum Dan Gaklat Di Laut	129
TABEL-78	Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait	130
TABEL-79	Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum	131

TABEL-80	Rekapitulasi Tanggapan Responden Keberhasilan Fungsi Operasi Pada Aspek Efektivitas Dan Efisiensi	132
TABEL-81	Rekapitulasi hasil Interpretasi Responden Pada Variabel Yang Diteliti	133
TABEL-82	Rekapitulasi Nilai Variabel Yang Dikorelasikan	153



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR-01 Bagan Kerangka Pemikiran	39
GAMBAR-02 Model Konstelasi	52
GAMBAR-03 Besaran Koefisien Korelasi Antar Variabel	154



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN-1 ANGKET PENELITIAN
- LAMPIRAN-2 HASIL PENGUJIAN NORMALITAS DATA
- LAMPIRAN-3 NILAI JAWABAN RESPONDEN ASPEK KEBIJAKAN TNI AL
- LAMPIRAN-4 NILAI JAWABAN RESPONDEN ASPEK POTENSI PANGKALAN
- LAMPIRAN-5 NILAI JAWABAN RESPONDEN ASPEK RELATIF TIDAK ADA HAMBATAN DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI OPERASI
- LAMPIRAN-6 NILAI JAWABAN RESPONDEN ASPEK PENYELENGGARAAN FUNGSI OPERASI BERJALAN EFEKTIF DAN EFISIEN
- LAMPIRAN-7 NILAI JAWABAN RESPONDEN ASPEK KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN FUNGSI OPERASI
- LAMPIRAN-8 TABEL PENOLONG UNTUK MENGHITUNG KORELASI *PRODUCT MOMENT* HUBUNGAN KEBIJAKAN TNI AL DENGAN KEBERHASILAN FUNGSI OPERASI
- LAMPIRAN-9 TABEL PENOLONG UNTUK MENGHITUNG KORELASI *PRODUCT MOMENT* HUBUNGAN POTENSI PANGKALAN DENGAN KEBERHASILAN FUNGSI OPERASI
- LAMPIRAN-10 TABEL PENOLONG UNTUK MENGHITUNG KORELASI *PRODUCT MOMENT* HUBUNGAN KEBIJAKAN TNI AL DENGAN POTENSI PANGKALAN
- LAMPIRAN-11 REKAPITULASI HASIL TABULASI DATA ANGGKET PENELITIAN
- LAMPIRAN-12 NILAI-NILAI *PRODUCT MOMENT*



ABSTRAK

Tesis ini membahas hubungan kebijakan dan potensi pangkalan dengan keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi dengan mengambil studi khusus analisis efektivitas dukungan organisasi pangkalan dalam penyelenggaraan fungsi operasi di lingkungan TNI AL. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan seberapa besar hubungan kebijakan dan potensi pangkalan baik secara parsial maupun secara bersama-sama dengan keberhasilan fungsi operasi. Untuk mengetahui tingkat rasionalitas dan besarnya pengaruh pangkalan dalam penyelenggaraan fungsi operasi, serta untuk mengetahui masalah-masalah apa yang dihadapi dalam memacu keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi dan usaha-usaha apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Pokok masalah dalam penelitian adalah dukungan pangkalan dalam penyelenggaraan fungsi operasi diindikasikan kurang efektif dimana aspek “kebijakan” memberikan “*image struktural*” yang bersifat birokratif, sehingga fungsi pelayanan yang harus diberikan guna mendukung fungsi operasi menjadi kurang efektif dan lemah. Demikian pula “pangkalan” yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam mendukung fungsi operasi terhambat oleh lemahnya potensi yang ada selain memang kebijakan yang ada tidak mendukung pemberdayaan pangkalan. Akibat dari semua hal tersebut maka banyak terjadi peristiwa *illegal fishing*, *illegal logging* dan masalah-masalah keamanan laut lainnya yang berpengaruh kepada stabilitas politik, ekonomi dan keamanan serta ketertiban nasional.

Untuk menganalisa masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode *deskriptif* melalui pendekatan studi *kuantitatif*. Data penelitian dikumpulkan melalui pengamatan langsung di lapangan, dan dari hasil angket yang disebarakan kepada para responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan variabel kebijakan dengan keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi bersifat lemah (0,0591). Kontribusi yang diberikan oleh variabel kebijakan kepada keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi adalah sangat kecil (0,35%). Sedangkan hubungan variabel potensi pangkalan dengan variabel keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi adalah ‘kuat’ (signifikan) atau positif (0,6489). Kontribusi yang diberikan oleh variabel potensi pangkalan kepada variabel keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi adalah sebesar 42,11%.

Sedangkan hasil penelitian dari hubungan antara variabel kebijakan dan potensi pangkalan secara bersama-sama dengan keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi adalah ‘kuat’ dan positif tetapi tidak signifikan (r hitung < r tabel) (0,7116). Sedangkan kontribusi yang diberikan oleh variabel kebijakan dan variabel potensi pangkalan secara bersama-sama kepada variabel keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi adalah sebesar 50,64%.

Atas dasar hasil penelitian tersebut disarankan bahwa untuk mencapai keberhasilan yang optimal dalam penyelenggaraan fungsi operasi, maka variabel kebijakan dan variabel potensi pangkalan perlu ditingkatkan. Pada variabel kebijakan perlu prioritas untuk diperhatikan dan ditingkatkan, agar keberhasilan fungsi operasi dapat tercapai dengan optimal.

ABSTRACT

The thesis discusses about correlation between the policy and base potential with the successfulness of the implementation of operational function by taking specific study about effectiveness analysis of base organizational support in implementing operational function in Indonesian Navy environment. This research is intended to explain how great the correlation between policy and base potential both partially and impartially by the success of operational function is. To get to know the degree of rationality and the bigness of base influence in implementing operational function, and also to get to know about the problems faced in stimulating the success of implementing the operational function and what efforts which are supposed to do to overcome the problems. The main problem in doing the research is base support in implementing operational function, it is indicated less effective in which the aspect "policy" gives "image structural" in bureaucracy minded, so that the service function which must be given in order to support the operational function becomes less effective and weak. Thus, "base" in which it could be front liner in supporting the operational function, it will be impeded by the weakness of potential available; otherwise, the policy available doesn't support the usage of base.

The effects of those things will occur such illegal fishing, illegal logging, and the troubles of other sea securities which can influence the political stability and security, and national order as well.

Furthermore, to analyze the mentioned problems, this research uses descriptive method through quantitative study approach. Meanwhile, for collecting the data, this research is done through; 1) more deeply interview, and 2) direct field observation, and supported by the data from questionnaire results which are spread out to the respondents.

The result of research shows that the correlation between policy variable and the success of implementing negative and weak operational function (-0,0591). Contribution given by policy variable to the success of implementing operational function is very little (0,35%).

Meanwhile, the correlation between base potential variable and the successfulness variable of implementing operational function is "strong" (significant) or positive (0,6489). Contribution given by base potential variable to the successfulness variable of implementing operational function is 42,11%.

In the other hand, the research result of correlation between policy variable and base potential impartially with successfulness of implementing is "strong" and positive, however, it is not so significant (0,7116). Meanwhile, the contribution, which is given by policy variable and base potential variable in impartial towards the successfulness variable of implementing operational function, is about 50,64%.

Based on above research results, it is suggested that to reach the optimal success in implementing the operational function, so the policy variable and base potential variable needs to be increased. Policy variable requires the priority to be given attention and increased, so that the successfulness of operational function can be gained optimally.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pembangunan maritim yang dimulai sejak dasawarsa 19-an telah menjadi perhatian dunia terutama sejak Perang Dunia ke-2 berakhir dimana telah terbukti bahwa di dan lewat laut suatu peperangan dapat memiliki posisi yang menguntungkan. Demikian pula dalam konsep tatanan pembangunan nasional suatu bangsa, bahwa pembangunan maritim telah menjadi perhatian yang serius dan memiliki urgensi yang tinggi terutama pada negara-negara yang memiliki wilayah pantai atau terdiri dari suatu kepulauan seperti Jepang, Philipina, Fiji dan Indonesia.

Pembangunan nasional yang telah menjadi agenda nasional lima tahunan mulai Repelita ke I sampai dengan ke VII hingga saat ini secara garis besar dan berkesinambungan menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan kelautan atau pembangunan maritim merupakan kebutuhan pokok yang senantiasa tahun demi tahun semakin meningkat tingkat urgensitasnya. Hal ini disebabkan selain kondisi wilayah negara Indonesia hampir $\frac{3}{4}$ nya adalah lautan, juga posisi wilayahnya yang terletak di antara dua benua dan dua samudera, yaitu benua Asia dan Australia, serta antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia (Indonesia) yang bersifat strategis, sehingga mengakibatkan kepulauan wilayah Indonesia terutama di selat Malaka menjadi ajang gerak lalu lintas alur pelayaran yang paling padat di dunia.

Pembangunan kelautan secara konseptual mulai menjadi program terencana sejak sektor kelautan dimasukkan dalam GBHN Tahun 1993-1998. Hal ini sangat penting mengingat pembangunan kelautan melibatkan berbagai sektor dalam upaya pemanfaatan sumber daya yang terkandung di dalamnya, walaupun sampai saat ini perencanaannya belum dapat dilaksanakan secara terpadu (sektoral). Namun sudah dapat dipastikan bahwa pada masa yang akan datang sumber daya alam yang berasal dari laut akan memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap dunia ekonomi terutama pada sektor/subsektor, antara lain: Industri dan Jasa Maritim, Pariwisata Bahari, Transportasi Laut, Perikanan Laut, Pertambangan & Energi. Menurut data dari BPPS Tahun 2005 dengan potensi pantai seluas 81.000 Km dan potensi budi daya ikan air payau seluas 840.000 Ha, maka potensi sumber daya laut yang dapat dihasilkan adalah sebesar 6,6 juta ton/tahun.

Laut bagi bangsa Indonesia memiliki manfaat bukan hanya merupakan sebagai sumber kehidupan bangsa dan negara akan tetapi juga merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai medan wilayah pertahanan perjuangan bangsa dalam rangka mewujudkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya pembangunan kelautan yang terpadu dan berkelanjutan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi bangsa Indonesia dalam berpolitik, berekonomi, bersosial, Hankam dan Iptek.

Untuk itulah maka rencana pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan merupakan sistem pembangunan yang sangat dibutuhkan agar potensi-potensi yang ada dapat dioptimalkan pengembangannya. Karena apabila pembangunan yang dilakukan tidak berwawasan lingkungan dapat memberi

dampak pada perusakan lingkungan yang pada akhirnya menimbulkan pencemaran lingkungan dan merusak habitat laut, sehingga keseimbangan ekosistem sebagai prasyarat kehidupan menjadi terganggu.

Pada sisi lain dalam rangka memperoleh hasil yang optimal dalam pembangunan kelautan maka penguasaan teknologi kelautan merupakan prasyarat mutlak diperlukan terutama dalam melakukan penataan manajemen yang kondusif. Untuk itu maka peraturan perundang-undangan dan hukum yang jelas dan mampu menjangkau semua aspek permasalahan harus seimbang dengan penggunaan teknologi tepat guna yang dimanfaatkan.

Guna menyongsong semua tantangan tersebut di atas, maka peran TNI AL sebagai salah satu kekuatan pertahanan keamanan negara harus mampu untuk melaksanakan deteksi dini guna meningkatkan upaya pengawasan, keamanan dan pengendalian laut, serta mampu mencegah pemanfaatan sumber daya laut secara illegal. Selain itu TNI AL harus mampu melaksanakan operasi keamanan laut (Kamla) sepanjang tahun, guna mencegah setiap jenis pelanggaran atau tindak pidana yang terjadi di ZEE dan Laut Wilayah, seperti: penangkapan/pengangkutan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (racun atau bahan berbahaya lainnya), pelanggaran terhadap ketentuan/persyaratan yang tercantum di dalam surat izin penangkapan ikan, ekspor ikan tertentu yang dilarang, dan penelitian/riset tanpa izin.

Demikian pula sebagai bagian dari kekuatan maritim, maka TNI AL harus mampu memupuk jiwa dan semangat bahari dan mampu menciptakan kondisi dimana TNI AL dapat memberikan pengabdian bersama-sama dengan Pemerintahan Daerah setempat dalam upaya pemberdayaan daerah.

Pangkalan TNI AL yang merupakan bagian dari Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) sebagai ujung tombak dari TNI AL di daerah operasi mempunyai tugas pokok untuk memberikan dukungan logistik berupa dukungan pembekalan, pemeliharaan, perbaikan dan perawatan personel terhadap KRI yang melaksanakan operasi di luar Pangkalan. Sejalan dengan perkembangan peranan dan fungsi Pangkalan TNI AL di samping tugas tersebut di atas, Pangkalan juga mempunyai tugas tambahan melaksanakan Kamla, Bintermatla dan Binpotnaskuatmar. Oleh karena keberadaan Pangkalan TNI AL berada di daerah-daerah, maka dengan sendirinya mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah setempat khususnya dalam tugas keamanan laut di sepanjang pantai seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana Pemerintah Daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004 ini mengamanatkan Pemerintah Daerah otonomi dan kewenangan yang besar dalam pengelolaan sumber kekayaan alam termasuk kekayaan laut yang ada di wilayahnya.

Dengan semakin besarnya kewenangan dan keleluasaan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya, maka permasalahan perbatasan laut antar daerah maupun masalah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi laut secara illegal menjadi *issue* yang menonjol bagi Pemerintahan Daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, keberadaan Pangkalan TNI AL diharapkan mampu untuk mendukung operasi keamanan di laut dimasing-masing wilayah atau daerah tersebut.

Menyadari kondisi Pangkalan TNI AL saat ini dalam kondisi minimalis, maka sarana dan prasarana yang dimiliki seperti : kapal, dermaga maupun

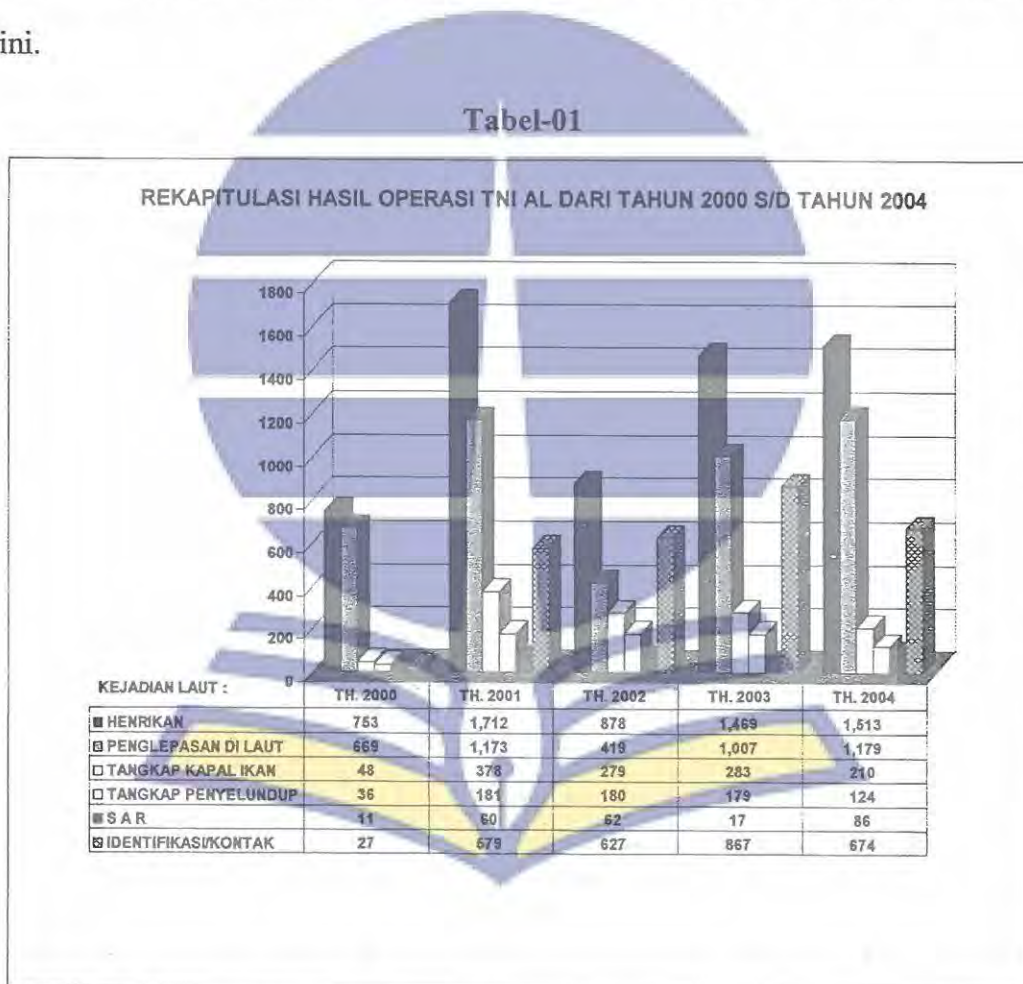
personel pengawak dapatlah dikatakan belum mampu secara optimal mendukung fungsi operasi baik dalam rangka pemberdayaan daerah maupun dalam rangka operasi keamanan laut di wilayah atau daerah masing-masing. Oleh karena itu keberadaan masing-masing pangkalan TNI AL perlu diteliti potensinya untuk dikembangkan sehingga dapat optimal dalam rangka mendukung fungsi operasi di daerah atau wilayah masing-masing. Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas perlu pula diteliti sejauh mana kebijakan Pimpinan TNI AL saat ini mampu memberikan dukungan yang optimal dalam penyelenggaraan fungsi operasi di tiap-tiap pangkalan tersebut.

Menyadari akan keterbatasan sarana dan prasana yang dimiliki oleh Pangkalan di satu sisi dan pada sisi lain dihadapkan kepada tuntutan tugas Pangkalan TNI AL kedepan yang semakin besar, maka diperlukan langkah-langkah terobosan untuk mengoptimalkan peranan Pangkalan terutama upaya-upaya peningkatan fungsi Pangkalan TNI AL dalam pelaksanaan operasi keamanan laut oleh Pangkalan TNI AL.

Guna mengimbangi dan mendukung seluruh tugas yang harus diemban TNI AL seperti dikemukakan di atas terutama dalam mendukung fungsi operasi, maka penataan struktur organisasi TNI AL yang berfungsi pelayanan yang bersifat mendukung fungsi operasi harus menjadi perhatian utama. Hal ini mengingat bahwa proses perumusan kebijakan sangat terkait dengan keberadaan struktur organisasi TNI AL terutama struktur organisasi yang bersifat pelayanan yang harus semakin dekat dan responsif dalam mendukung fungsi operasi. Artinya bahwa dalam proses penyusunan kebijakan dan proses pengambilan

kebijakan pun harus dikembangkan guna mendukung dan merespon fungsi operasi dapat berhasil guna dan berdaya guna.

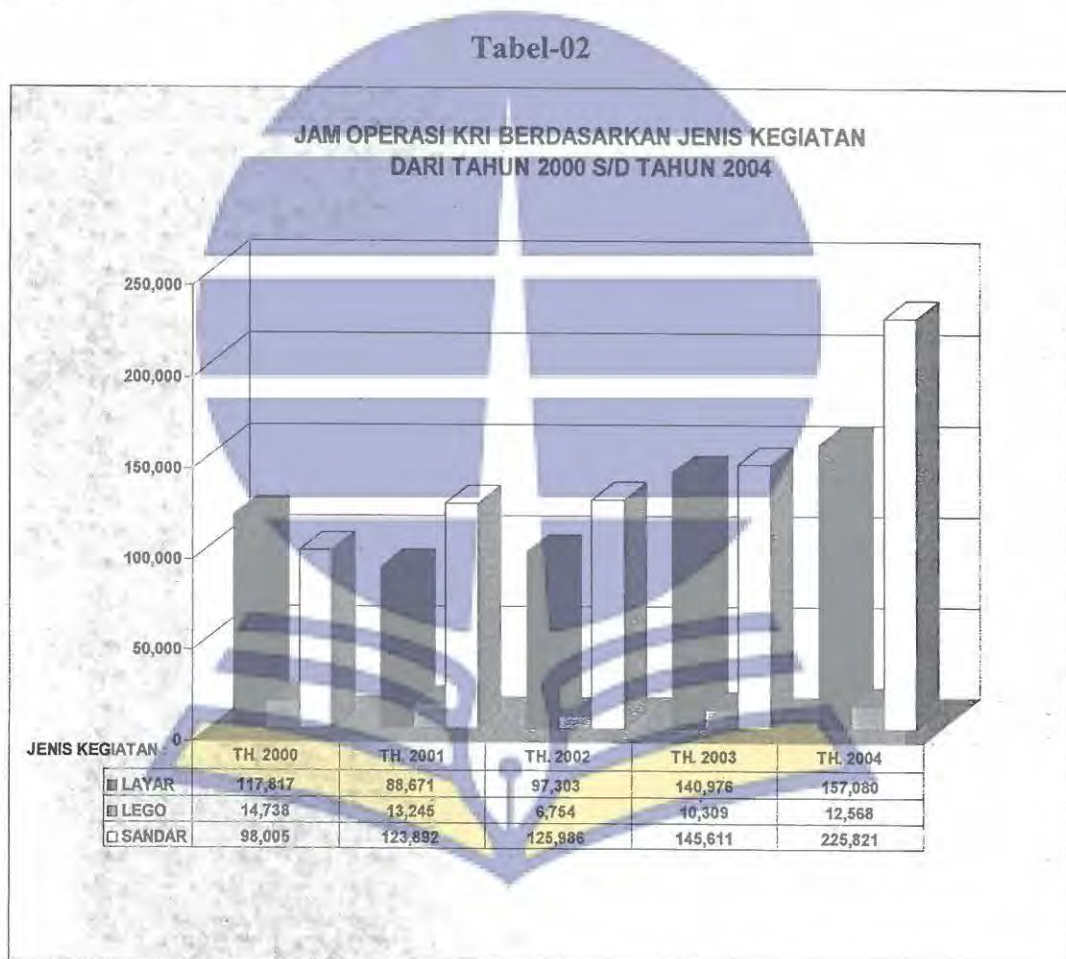
Dengan demikian sebagai akibat dari potensi pangkalan yang masih minim dan kebijakan yang adapun belum optimal dalam mendukung penyelenggaraan fungsi operasi di tiap pangkalan, maka tindak pidana kejahatan di laut tampaknya semakin meningkat, seperti terlihat pada Tabel-01 di bawah ini.



Sumber : Puskodal TNI AL, Tahun 2005.

Kondisi tersebut di atas, apabila dibandingkan dengan Tabel-02 di bawah ini dimana terdapat kecenderungan operasi KRI yang ada semakin menurun dikarenakan faktor penyusutan usia pemakaian KRI, sehingga jumlah jam sandar semakin meningkat, maka dapatlah dikatakan bahwa disatu sisi terdapat

peningkatan jumlah angka pelanggaran dan tindakan pidana kejahatan, sedangkan pada sisi lain dimana kemampuan KRI yang ada cenderung semakin menurun. Sungguh merupakan suatu realitas fungsi operasi yang menjadi tanggung jawab TNI AL tampak menjadi semakin berat. Oleh karena itu upaya penelitian potensi pangkalan dan kebijakan yang ada terutama dalam rangka mendukung penyelenggaraan fungsi operasi sangat penting dilakukan.



Sumber : Puskodal TNI AL, Tahun 2005.

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas maka judul Tesis yang diajukan adalah: **“Hubungan Kebijakan Dan Potensi Pangkalan Dengan Keberhasilan Penyelenggaraan Fungsi Operasi Di Lingkungan TNI AL”**.

B. Masalah.

Bertolak dari latar belakang penelitian tersebut di atas, dapat diperoleh suatu permasalahan pokok yang akan diteliti yaitu hubungan antara aspek kebijakan dan aspek potensi pangkalan dengan aspek keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi. Adapun hubungan ketiga aspek di atas adalah sebagai berikut: aspek “kebijakan” memberikan “*image struktural*” yang bersifat birokratif, sehingga fungsi pelayanan yang harus diberikan guna mendukung fungsi operasi menjadi kurang efektif dan lemah, selain itu “kebijakan” yang ada juga belum sepenuhnya mendukung pemberdayaan pangkalan, sedangkan aspek “pangkalan” yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam mendukung fungsi operasi masih terhambat oleh lemahnya potensi yang ada, oleh karenanya maka keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi kurang efektif.

Penelitian masalah ini hanya dibatasi pada 2 (dua) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat, sebagai berikut :

- a. Variabel Bebas yang terdiri dari : Kebijakan (X_1), dan Potensi Pangkalan (X_2);
- b. Variabel Terikat : Keberhasilan Fungsi Operasi (Y).

Sedangkan, variabel lainnya yang diduga memiliki kontribusi serta dapat berpengaruh terhadap variabel keberhasilan fungsi operasi seperti: perencanaan, pengawasan, kepemimpinan, dan lain sebagainya tidak diteliti. Dalam penelitian ini dianggap kurang mempunyai pengaruh langsung.

C. Perumusan Masalah Penelitian.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah terdapat hubungan kebijakan dengan keberhasilan fungsi operasi ?
- b. Apakah terdapat hubungan potensi pangkalan dengan keberhasilan fungsi operasi ?
- c. Apakah terdapat hubungan kebijakan dan potensi pangkalan secara bersama dengan keberhasilan fungsi operasi ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui tingkat rasionalitas dan besarnya hubungan kebijakan dan potensi pangkalan dalam penyelenggaraan fungsi operasi.
- b. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi.
- c. Mencari upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah untuk memperoleh dua nilai kemanfaatan, yaitu kemanfaatan teoritis dan kemanfaatan praktis, sebagai berikut:

- a. Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan rasionalitas dan pengaruh kebijakan dan potensi pangkalan terhadap keberhasilan fungsi operasi, yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang teori kebijakan pengelolaan

pangkalan-pangkalan yang merupakan bagian dari Administrasi Republik Indonesia.

- b. Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat diimplementasikan sebagai upaya revitalisasi kebijakan khususnya dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan fungsi operasi.





BAB II

KERANGKA TEORI

A. **Administrasi, Administrasi Publik dan Penyelenggaraan Administrasi Publik.**

1. **Administrasi.**

Untuk memahami administrasi dapat dilihat dari beberapa pendapat yang dikutip oleh Inu Kencana (2002 : 12), sebagai berikut :

- a. Herbert A. Simon : Administrasi sebagai kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan.
- b. Leonard D. White : Administrasi adalah proses dari kelompok baik pemerintah maupun swasta, sipil maupun Militer.
- c. Luther Gulick : Administrasi sebagai sistem pengetahuan dimana orang bekerja sama untuk suatu tujuan.
- d. The Liang Gie : Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan.
- e. Prajudi Atmosudirdjo : Administrasi sebagai fenomena sosial yang terdapat dalam suatu organisasi.
- f. Sondang P. Siagian : Administrasi adalah proses pelaksanaan daripada pengambilan keputusan yang pelaksanaannya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk suatu tujuan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya pengertian administrasi mempunyai pengertian: *kerjasama, beberapa orang, dan mempunyai tujuan bersama.*

2. **Administrasi Publik.**

Dalam bahasa Inggris bahwa arti kata 'publik' adalah berarti umum. Sedangkan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai 'praja'. Kata publik dalam

arti umum dikaitkan dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat umum. Administrasi publik sering diartikan sebagai administrasi negara maka kecenderungannya merupakan pelayanan dan penyelenggaraan roda pemerintahan dari suatu negara. Dengan maksud ingin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka istilah 'public administration' diberbagai kajian keilmuan tetap diterjemahkan sebagai 'administrasi publik'.

Pengertian administrasi Publik dapat dilihat dari beberapa pendapat di bawah ini seperti yang dikutip oleh Inu kencana (2002 : 14) dan Siagian (1983 : 8), sebagai berikut :

a. Piffner dan Presthus :

- 1) Administrasi Publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh perwakilan badan politik.
- 2) Koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah.
- 3) Proses pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

b. Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro :

- 1) Suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintah
- 2) Hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif
- 3) Bagian dari proses politik dalam merumuskan suatu kebijaksanaan
- 4) Pelayanan kepada masyarakat
- 5) Berbeda dengan pengertian administrasi perseorangan.

c. Prajudi Atmosudirdjo :

Administrasi Publik dapat diartikan sebagai suatu administrasi daripada negara sebagai organisasi untuk mencapai tujuan yang bersifat kenegaraan.

d. Arifin Abdulrachman : Administrasi publik merupakan pelaksanaan dari politik negara.

e. Edward H. Litchfield : Administrasi publik didefinisikan sebagai studi tentang pengorganisasian badan-badan pemerintah.

f. Dwight Waldo : Administrasi publik adalah manajemen dan organisasi daripada manusia dan peralatan guna mencapai tujuan pemerintah.

- g. Marshall E. Dimock : Administrasi publik adalah kegiatan pemerintah dalam melaksanakan politiknya.
- h. George J. Gordon : Administrasi publik adalah seluruh proses yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh legislatif, eksekutif serta lembaga peradilan.
- i. Siagian (1983:8) memberikan definisi Administrasi Publik sebagai “keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas sesuai dengan maksud dari penelitian ini maka administrasi publik dapat diartikan sebagai *suatu keseluruhan implementasi kebijakan publik yang diselenggarakan dalam suatu organisasi publik guna mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi publik.*

3. Penyelenggaraan Administrasi Publik.

Seperti disebutkan di atas bahwa administrasi publik merupakan *keseluruhan dari implementasi kebijakan publik yang diselenggarakan dalam suatu organisasi publik guna mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi publik.* Atas dasar hal tersebut maka bagaimana administrasi publik dapat diselenggarakan guna mencapai tujuan organisasi publik ? Hal ini tentunya harus dilihat dulu dimana administrasi dapat diselenggarakan dan apa yang harus dikerjakan ? Dalam berbagai literatur seringkali disebutkan bahwa delik pertanyaan tersebut akan mengarah pada ‘locus’ dan ‘focus’ dari administrasi publik.

Pada umumnya ‘locus’ atau wilayah penyelenggaraan administrasi publik mencakup wilayah-wilayah yang objek materialnya adalah negara, yang meliputi bidang pemerintahan, politik, Tata Negara dan masalah kenegaraan itu sendiri.

Sedangkan mengenai permasalahan 'focus' dari penyelenggaraan administrasi publik dapat dilihat dari pendapatnya H. George Frederickson yang memberikan konsepsi bahwa pemikiran administrasi publik (*Focus*) selain berada dalam koridor fungsi pelayanan yang lebih baik, akan tetapi juga dibarengi oleh pemakaian prinsip-prinsip dan teknologi administrasi yang memadai. Hal ini dimaksudkan agar dapat terlihat adanya perbedaan dan pemisahan antara fungsi politik dan fungsi administrasi.

Bila mengacu kepada pendapat Siagian (1983:8) dimana dijelaskan bahwa Administrasi Publik dapat didefinisikan sebagai "keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara". Maka dari pengertian tersebut menggambarkan suatu kewajiban kepada aparatur pemerintah untuk *melayani* semua warga negara dengan perlakuan yang sama, karena warga negara itu dimata hukum berkedudukan sama. Oleh karenanya kepada mereka harus diberikan pelayanan yang sama oleh aparatur negara sebagai abdi masyarakat.

Hal penting lainnya yang perlu digaris bawahi dari pengertian tersebut di atas adalah faktor tujuan yang ingin dicapai hendaklah semata-mata demi menjamin pencapaian *welfare state* dan *service* yang *efisien* serta *efektif*, mengingat sumber-sumber yang sangat terbatas pada satu sisi, sedangkan pada sisi lain terdapat tujuan negara yang relatif tidak terbatas.

Seiring dengan tujuan seperti yang diharapkan di atas dan merupakan hal yang penting dan harus dilaksanakan agar fungsi pelayanan yang diberikan

tersebut memberikan efek formal, maka tujuan yang harus dilaksanakan tersebut seyogyanya harus mendapat keputusan politis.

Pentingnya legalitas fungsi pelayanan seperti diungkapkan di atas juga diungkapkan oleh H.G. Frederickson ketika aktivitas pelayanan umum di Amerika Serikat pasca Perang Dunia ke II semakin meningkat. Walaupun timbul suatu keraguan dari Don K. Price (“1984 and beyond : Social Engineering or Political Values”) dengan pertanyaannya yang sangat mendasar :

“Bagaimanakah kita dapat membuat pemerintah menjadi kompeten dan otoritatif tanpa merusak nilai partisipasi demokratis dan nilai pertanggungjawaban ?”

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi aktivitas pelayanan oleh pemerintah kepada rakyatnya maka akan cenderung mengakibatkan matinya partisipasi rakyat. Oleh karena itu fungsi administrasi seyogyanya merupakan keputusan politis, agar partisipasi demokratis tidak menjadi mati. Frederickson mengutip ucapan dari Woodrow Wilson yang mengatakan :

“Administrasi berada diluar ruang lingkup politik yang sebenarnya. Persoalan-persoalan administrasi bukanlah persoalan-persoalan politik; meskipun politik menetapkan tugas-tugas bagi administrasi, ia tidak boleh dibiarkan untuk memanipulasikan jabatan-jabatan administrasi.”

Pendapat Woodrow Wilson tersebut lebih cenderung pada rasa kekhawatirannya pada tindakan kesewenang-wenangan pemerintah untuk menciptakan kepatuhan kepada rakyatnya (Miftah Thoha, 1984 : 45) dalam rangka memberikan pengaturan dan pelayanan publik, apalagi bahwa tindakan atau pelayanan publik tersebut dilandasi oleh adanya suatu keputusan politis.

Oleh karena itu Wilson menginginkan adanya pemisahan yang tegas antara administrasi dan politis.

Leonard White dalam bukunya *Introduction to the study of public administration* berusaha untuk mengawinkan ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi. Hal ini sejalan dengan pemikiran tersebut di atas dimana guna menghilangkan kekhawatiran adanya tindakan yang semena-mena dalam fungsi pelayanan umum, maka penemuan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen serta teknologi administrasi agar digunakan dalam fungsi pelayanan umum tersebut. Atau dapat dikatakan sebagai upaya bagaimana mengawinkan ilmu pemerintahan dengan ilmu administrasi agar bisa memaksimalkan fungsi pelayanan umum yang efisien dan efektif (1984:94). Hal tersebut akan semakin penting manakala kita menyadari bahwa "organisasi itu merupakan bagian dari anatomi administrasi dan manajemen adalah fisiologinya" (Ulbert Silalahi, 2002:95).

B. Asas dan Fungsi Penyelenggaraan Administrasi Publik.

Adanya penemuan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen serta teknologi administrasi yang sangat memungkinkan untuk diterapkan dalam fungsi pelayanan umum. Kemudian semakin disadarinya bahwa "organisasi itu merupakan bagian dari anatomi administrasi dan manajemen adalah merupakan fisiologinya" (Ulbert Silalahi, 2002:95). Maka pertumbuhan fungsi pelayanan baik oleh Negara maupun oleh lembaga pelayanan sosial terus ditumbuhkan dan bersifat profesional.

Adanya pergeseran tatanan kehidupan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang disebabkan adanya krisis bahan bakar dan krisis lingkungan yang ditandai oleh semakin banyaknya pengangguran dan memburuknya pusat-pusat kota, termasuk pada lembaga-lembaga *pelayanan masyarakat* seperti dalam perawatan kesehatan, transportasi dan sebagainya. Maka krisis tersebut secara langsung atau pun tidak langsung telah memberikan dampak berupa upaya-upaya mengubah cara-cara memikirkan dan mempraktekan administrasi negara. Hal ini dimunculkan dalam berbagai upaya gerakan pembaharuan yang menekankan pada aspek kompetensi netral dan kepemimpinan eksekutif, dimana nilai-nilai keadilan sosial mulai menjadi ciri sekaligus tuntutan yang harus dikembangkan.

Demikian pula penajaman pada fungsi-fungsi kelembagaan mulai ditanamkan seperti pada Polisi harus menerapkan hukum. Dinas kesehatan masyarakat harus mampu memperpanjang usia kehidupan dengan cara memerangi penyakit. Petugas-petugas pemadam kebakaran, petuga-petugas kebersihan, pekerja-pekerja kesejahteraan, para diplomat, tentara dan seterusnya, semuanya dipekerjakan oleh instansi negara. Masing-masing spesialisasi atau profesi mempunyai serangkaian sasaran pokok sendiri-sendiri dan karena itu juga memiliki dasar pemikirannya sendiri-sendiri.. Sehingga akhirnya Administrasi Negara yang konvensional (klasik) harus mampu menjawab tantangan-tantangan kritis tentang bagaimana negara mampu menyediakan pelayanan yang lebih baik dengan sumber-sumber daya yang tersedia (efisien). Juga bagaimana Negara dapat mempertahankan tingkat pelayanan yang optimal dengan biaya sehemat mungkin.

Selain dilakukan upaya penajaman pada fungsi-fungsi, juga dilakukan upaya bagaimana meningkatkan keadilan sosial pada setiap fungsi pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sangat penting mengingat bahwa nilai keadilan sosial mencakup pengertian seperangkat pilihan nilai, pilihan kerangka organisasi, dan pilihan corak manajemen. Selain itu juga keadilan sosial menekankan pada azas pertanggung jawaban atas keputusan-keputusan dan pelaksanaan program untuk manajer-manajer publik. Oleh karenanya keadilan sosial menekankan pada adanya perubahan dalam manajemen publik, selain menekankan adanya daya tanggap lebih terhadap kebutuhan warga negara ketimbang terhadap kebutuhan-kebutuhan organisasi publik. Selain itu keadilan sosial menekankan suatu pendekatan terhadap studi mengenai administrasi negara dan pendidikan administrasi negara yang bersifat interdisipliner, terapan, dan memecahkan masalah, serta secara teoritis sehat.

Selain bercirikan suatu tatanan nilai keadilan yang harus melekat pada administrasi negara, juga harus memperhitungkan ketimpangan yang mungkin terjadi, karena keadilan sosial berangkat dari adanya kecenderungan munculnya ketimpangan-ketimpangan sosial, terutama pada suatu tatanan pemerintahan pluralistis yang jelas-jelas secara sistematis melakukan diskriminasi dengan memihak pada birokrasi-birokrasi yang mapan dan stabil, dan pada minoritas klien yang istimewa (Departemen Pertanian dan petani-petani besar, misalnya) dan menentang minoritas-minoritas lain (misalnya, buruh-buruh tani, yang migran maupun yang permanen) yang miskin dalam sumber-sumber daya politik maupun ekonomi.

Namun seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan pentingnya pelayanan kepada publik ditengah-tengah upaya Negara melakukan efisiensi karena krisis energi, Barzelay (1992) mencoba menawarkan pemikiran baru setelah melihat roda birokrasi pemerintahan yang banyak melakukan kecurangan (korup) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu berupa paradigma *pascabirokrasi* yang intinya mengurangi sebanyak mungkin keterlibatan birokrasi di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini diyakini oleh suatu keyakinan bahwa masyarakat yang maju (sebagai suatu kesatuan) diyakini akan mampu mengurus sebagian besar kepentingannya oleh anggota masyarakatnya sendiri.

Sejalan dengan pemikiran dari Barzelay tersebut perubahan besar pada manajemen pemerintahan didukung pula oleh konsep pemikiran dari Osborne dan Gaebler (1993) yang menawarkan perlunya transformasi semangat kewirausahaan pada sektor publik. Osborne dan Gaebler (1993) mengemukakan sepuluh pokok pikiran yang intinya adalah mengurangi peranan pemerintah dengan cara memberdayakan masyarakat serta menjadikan sektor pemerintah lebih efisien. Inti pemikiran Osborne dan Gaebler (1993 : 198) melalui *Reinventing Government* menunjukkan tiga isu penting yaitu :

- 1) **Bagaimana mengembangkan berbagai alternatif organisasi dan manajerial yang semakin banyak memberikan kesempatan kepada masyarakat dan dunia swasta agar ikut berperan dalam memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa.**
- 2) **Bagaimana mengembangkan administrasi keuangan dan anggaran yang berorientasi pada misi dan visi organisasi (*Budgeting Reform*).**
- 3) **Bagaimana membangun organisasi dan suatu manajemen publik yang berorientasi pada permintaan dan kepuasan customer.**

Banyak negara di dunia mengusahakan untuk mengadopsi pendapat Osborne dan Gaebler termasuk pemerintah RI. Berdasarkan perubahan paradigma pemerintah tersebut di atas maka pemerintah atau negara akan beranjak dari paradigma yang: (1) *Berskala birokratis ke asas yang berskala "problem solving"*; (2) *Lebih menyerupai jaringan keseimbangan sebuah mesin*; (3) *Berubah dari lebih banyak memberi komando kepada menjadi innovator.*

Secara ringkas maka organisasi dan manajemen pemerintahan ditujukan kepada pembentukan organisasi pemerintah yang ramping, fleksibel, responsive sejalan dengan pendapat dari Rosabeth M. Kanter (1997 : 68) bahwa organisasi masa depan akan mengalami pergeseran yaitu : dari bentuk yang besar ke bentuk yang ramping, dalam prinsip kepegawaian yang baru adanya pergeseran dari bentuk "besar lebih baik" ke bentuk "kecil lebih indah"; dari vertikal yang bersifat komando ke horizontal yang bersifat fungsional; bentuk hierarki yang berdasarkan wewenang formal menjadi tidak penting apabila dibandingkan dengan profesionalisme yang dibutuhkan.

Organisasi pemerintah masa depan dengan dukungan aparatur pemerintah yang berpengetahuan disertai efisiensi yang tinggi diharapkan mampu menciptakan kinerja yang optimal.

Berkaitan dengan adanya upaya efisiensi seperti dikemukakan di atas, Stewart (1998 : 118) mengemukakan bahwa kegiatan organisasi pemerintah yang baik tidak cukup hanya memenuhi kriteria 2E (efisiensi dan efektivitas) saja, melainkan harus memenuhi kriteria 4E yang meliputi *Efisiensi, Efektivitas, Economic dan Equity*. Artinya bahwa setiap saat manajer perlu melihat dan

melihat kembali prinsip-prinsip manajemen yang dijalankannya, sehingga azas dan fungsi penyelenggaraan administrasi publik dapat diselenggarakan dengan baik.

C. Hubungan Penyelenggaraan Administrasi Publik Dengan Kebijakan Publik

Bila mengacu pada pengertian administrasi publik seperti yang telah dikemukakan di atas yaitu sebagai suatu *keseluruhan dari implementasi kebijakan publik yang diselenggarakan dalam suatu organisasi publik guna mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi publik*. Maka sudah seyogyanya guna mengoptimalkan tujuan organisasi publik terutama dalam meningkatkan mutu pelayanan umum, suatu administrasi negara harus bebas nilai. Artinya profesionalisme dalam penyelenggaraan administrasi publik betul-betul akan memberikan kepuasan dan keadilan sosial yang optimal. Oleh karenanya penggunaan prinsip-prinsip penggunaan teori dan teknologi administrasi merupakan kebutuhan yang azasi.

Namun upaya tersebut terutama dalam kehidupan praktek penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari bahwa dikotomi administrasi dengan kebijakan sulit untuk dilakukan karena para administrator justru seringkali melaksanakan dan menentukan kebijakan. Hubungan saling ketergantungan antara para penyelenggara administrasi publik dengan pembuatan kebijakan sangat erat dan sulit untuk dihindarkan. Oleh karenanya dalam dekade terakhir para ahli berusaha merumuskan suatu administrasi Negara baru dengan beranjak dari satu pertanyaan argumentasi bahwa : Para administrator tidaklah netral. Oleh

sebab itu mereka harus terikat sepenuhnya pada manajemen yang baik maupun keadilan sosial sebagai nilai-nilai, sasaran-sasaran yang ingin dicapai, ataupun dasar-dasar dalam pemikirannya. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan-kebijakan yang dibuat memiliki hubungan korelasional dengan penyelenggaraan administrasi yang dilakukan serta sekaligus bernilai keadilan sosial yang tinggi. Oleh karenanya para administrator, eksekutif, legislator, lembaga pengadilan, para pendidik, ahli pertanian, polisi, dan seterusnya harus berusaha bekerja semata-mata mewujudkan kemungkinan keadilan sosial yang semakin meningkat. Untuk itu, maka perangkat organisasi seperti sistem pemrograman-perencanaan-penganggaran (PPBS = Programming-Planning-Budgeting-Systems), analisis kebijakan, pengukuran produktivitas, penganggaran berdasar nol, dan reorganisasi, senantiasa harus *dipandang sebagai suatu upaya guna meningkatkan perubahan menuju keadilan sosial*. Upaya melakukan analisa kebijakan sekaligus juga upaya melakukan pengukuran produktivitas merupakan dasar yang menentukan kualitas dan distribusi biaya dan sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat. Oleh karenanya dapatlah dikatakan bahwa reorganisasi adalah perangkat pokok untuk meluruskan kembali kecakapan-kecakapan organisasi untuk secara terbaik memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sementara pada sisi lain terutama para ahli ekonomi dan ilmu politik dalam kelompok pluralis memandang alat-alat seperti PPBS sebagai suatu ancaman terhadap konsepsi mereka mengenai pemerintahan demokratis

Komitmen administrasi negara baru pada keadilan sosial menunjukkan suatu pemerintahan administratif maupun eksekutif yang kuat seperti apa yang disebut Alexander Hamilton sebagai “energi dalam eksekutif”. Administrasi

negara baru tidak hanya menyelenggarakan mandat legislatif se-efisien dan se-ekonomis mungkin, melainkan juga untuk mempengaruhi dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang secara lebih umum meningkatkan kualitas kehidupan bagi semua. Transparansi dalam kehidupan administrasi merupakan kebutuhan pokok dalam membangun kebijakan yang lebih baik dimasa mendatang. Kebiasaan egoisme unit-unit administrasi, dan kecenderungan pada tiap-tiap kepala departemen atau kepala biro untuk mencoba meningkatkan anggaran, gaji, fasilitas, dan kepentingan departemennya, merupakan dinamika korelasional antara penyelenggaraan administrasi publik dengan kebijakan yang dibuat.

Berdasarkan argumentasi yang dikemukakan di atas, maka administrasi negara klasik lebih menekankan pada *pengembangan dan pengokohan lembaga-lembaga* yang telah dirancang untuk mengurus masalah-masalah sosial. Sedangkan administrasi negara baru mencoba untuk memfokuskan kembali pada *pemecahan masalah* dan untuk mempertimbangkan pendekatan-pendekatan institusional alternatif dalam menghadapi masalah. Masalah-masalah masyarakat seperti kemiskinan di kota, pengangguran, dan perawatan kesehatan mendorong para administrator negara untuk dengan serius mempersoalkan investasi uang dan tenaga kerja yang selalu lebih banyak dalam lembaga-lembaga nampaknya justru hanya menambah masalah. Karena itu, mereka berusaha baik untuk mengubah lembaga-lembaga itu maupun untuk mengembangkan lembaga-lembaga yang baru dan lebih gampang diubah yang dirancang untuk memperoleh pemecahan yang lebih tepat. Mereka perlu dibangun dan dipertahankan, tetapi mereka akan berusaha supaya tidak menjadi birokrasi-birokrasi yang tidak bertanggungjawab, yang mapan, yang justeru menimbulkan masalah-masalah

masyarakat yang lebih besar ketimbang keadaan sosial yang semula menjadi sasaran usaha perbaikan oleh birokrasi-birokrasi itu.

Pergeseran dari penekanan pada pembangunan dan pemeliharaan lembaga menuju penekanan pada anomali-anomali sosial memberikan fokus perhatian pada teori organisasi berupa konsep-konsep umum seperti keputusan, peranan, dan teori kelompok. Selain itu juga bagaimana menggunakan ketrampilan-ketrampilan ilmiah untuk mendukung analisa, percobaan, dan penilaian kebijakan-kebijakan dan mode-mode administrative alternatif.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa penyelenggaraan administrasi publik yang berfokus pada fungsi pelayanan umum telah berevolusi seirama dengan perkembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan memberikan nilai tertinggi pada nilai-nilai intrinsik yang melekat pada manusia yang dilayaninya serta diwujudkan dalam perumusan kebijakan yang berkeadilan sosial.

D. Strategi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Fungsi Operasi

Pada era globalisasi maka akses unit organisasi untuk bisa menjadi pemain global akan sangat terbuka terutama pada sektor ekonomi. Oleh karenanya para penyelenggara negara dituntut untuk lebih responsive dan proaktif dalam menggali semua potensi yang terdapat di unit organisasi masing-masing. Potensi-potensi yang menyangkut sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), modal (capital) dan teknologi hendaknya diarahkan bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kesempatan yang

seluas-luasnya kepada setiap individu untuk berperan serta mewujudkan kesejahteraan tersebut.

Dengan demikian konsep *reinventing government* yang meliputi: *public private, partnership, budgeting reform* dan *costumer driven government* dapat dijadikan pijakan yang tepat bagi unit-unit organisasi dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Konsep *reinventing government* yang dimaksudkan tersebut di atas menggambarkan bahwa hendaknya pemerintah tidak mendominasi tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, tetapi hendaknya berperan mengarahkan masyarakat kepada upaya-upaya pemberdayaan yang erat kaitannya dengan pendekatan partisipatif.

Hal ini sejalan dengan pendapat David C. Korten yang mengemukakan betapa pentingnya peranan lembaga swadaya masyarakat, dan hakekat fokus pembangunan adalah peningkatan kapasitas perorangan dan kelembagaan. Demikian pula halnya pendapat Milton J. Esman yang menyatakan bahwa masyarakat perlu diikutsertakan dalam proses menghasilkan *public goods and service* dalam pola kemitraan. Sehubungan dengan hal itu maka kemampuan masyarakat hendaklah selalu ditingkatkan. Oleh sebab itu maka setiap keputusan dan kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat harus melalui mekanisme yang terbuka (transparan), tanpa harus berhadapan dengan peraturan dan prosedur yang berbelit-belit, keadilan, dan menghargai akan keragaman (diferensiasi). Agar semua kebijakan utama (yang menyangkut investasi, keuangan, industri, SDM, iptek) bisa terlaksana dengan efektif dan efisien, maka perlu didukung oleh berbagai kebijakan pendukung seperti adanya sarana fisik dan sosial yang memadai, tatanan kelembagaan yang kondusif termasuk

administrasi negara yang efisien dan responsive (Kotler, 1997; Porter, 1990). Untuk hal itulah maka menurut Michael E. Porter diperlukan suatu strategi dalam penyelenggaraan organisasi baik organisasi publik maupun swasta, termasuk para penyelenggara negara dalam mengambil keputusan-keputusannya maupun kebijakan-kebijakannya. Strategi yang diambil selama ini terutama dipergunakan oleh sektor swasta, tetapi akhir-akhir ini diadopsi oleh administrasi publik. Adapun strategi yang dimaksudkan adalah strategi agar organisasi bisa tetap *survive* dan *exist*, yaitu:

- a. *Product differential strategy,*
- b. *Segmented focus strategy, and*
- c. *Cost leader strategy.*

Strategi-strategi kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi penyelenggaraan administrasi publik termasuk dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan memuaskan serta dengan biaya yang lebih ringan, lebih baik dan lebih cepat (*cheaper, better and faster*).

- a. *Strategi Product differential.*

Organisasi baik publik maupun swasta pada level apapun hendaknya dalam membuat keputusan atau kebijakan agar mampu mengakomodir setiap situasi dan kondisi yang senantiasa berubah dengan serba cepat. Di samping itu dengan semakin banyaknya instansi yang mampu memberikan layanan atas kepuasan pelanggan (masyarakat) maka agar instansi tersebut tidak ditinggal oleh masyarakat pelanggan. Instansi tersebut harus membuat produk kebijakan yang beraneka ragam sebagai dampak dari keinginan yang beragam dari

masyarakatnya. Dengan demikian maka produk dari kebijakan organisasi pun seyogyanya harus beragam guna memberikan kesempatan kepada masyarakat pelanggan untuk memilih produk kebijakan yang terbaik (*the best policy*). Dengan disediakannya keragaman produk kebijakan maka diharapkan masyarakat pelanggan akan tetap loyal terhadap produk kebijakan organisasi karena tersedianya alternatif kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat sebagai pengguna atas kebijakan organisasi tersebut; artinya beragam dan mampu mengakomodir setiap situasi dan kondisi yang senantiasa berubah dengan cepat.

b. *Strategi Segmented Focus.*

Karena kebijakan ditujukan kepada pemakai/pengguna kebijakan maka kebijakan yang dihasilkan patut disesuaikan dengan situasi dan kondisi pengguna, artinya dalam hal ini kebijakan harus berupaya untuk membuat *customer satisfaction*. Oleh karenanya maka semua kebijakan harus berbasis pada konsiderasi tentang kebutuhan dan keinginan masyarakat pelanggan. Kesalahan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat akan menyebabkan kebijakan itu tidak berarti di mata masyarakat. Hal-hal yang dapat dipergunakan untuk penajaman ke arah *market targeting* adalah proses pengelompokkan (*segmentasi masyarakat konsumen-kebijakan*) yang dapat dipilih dari kategori-kategori: *behaviouristic*, *geographycal*, *psichographycal*, dan *demographycal*. Segmentasi kebijakan akan membantu mengenali *costomer choise criteria* serta karakteristik lainnya. Kebijakan organisasi harus jelas ditujukan kepada siapa, sehingga kebijakan tadi tidak bermakna ganda yang dimungkinkan dapat ditafsirkan berlainan. Pada gilirannya kebijakan yang tidak

fokus dapat dijadikan sebagai komoditas yang menguntungkan segelintir pihak saja. Oleh karenanya maka kebijakan organisasi harus terfokuskan segmennya baik yang menyangkut 5 W maupun + 1 H (What, Who, When, Where, Why + How). Oleh karena itu masa keterbukaan, keadilan dan keragaman atas produk kebijakan hendaknya patut untuk diperhatikan; artinya disesuaikan dengan situasi dan kondisi pengguna.

c. Strategi *Cost Leader*.

Cost leader maknanya adalah “harga” akan produk kebijakan semurah-murahnya. *Hernando de Soto* mengatakan bahwa pada dasarnya kita hidup pada kondisi ‘*high cost economy*’. Maka agar tidak tercipta ekonomi biaya tinggi, maka perlu dibuat kebijakan-kebijakan yang menghasilkan biaya hidup menjadi semurah-murahnya baik dilihat dari pihak pembuat kebijakan maupun pihak yang menggunakan kebijakan tersebut. Dengan *cost* (waktu, biaya, kesempatan) yang murah maka produk kebijakan tersebut akan diminati oleh masyarakat pengguna dan mereka tidak akan berpaling kepada kebijakan organisasi lain.

Dengan melihat strategi-strategi kebijakan di atas, maka kebijakan-kebijakan yang dilahirkan harus memiliki nilai tertentu yang dapat menciptakan masyarakat pelanggan terpuaskan baik dilihat dari segi kualitas produk, *cost* yang *competitive* maupun penyediaannya yang cepat. Dengan demikian langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain:

- a. Memulai mengenali dinamika *costumer needs want*.
- b. Mengembangkan suatu kerangka pendekatan ke arah pencapaian kepuasan pelanggan.

- c. Pertemukan antara tujuan organisasi dengan pencapaian kepuasan pelanggan.

Langkah-langkah eksternal tersebut perlu direspon oleh *decision maker* baik individu maupun lembaga ke arah integrasi proses pengembangan produk yang dibentuk dari visi dan kebijakan organisasi, yang pada intinya adalah suatu orientasi kepuasan masyarakat pelanggan guna meraih keunggulan daya saing yang berkelanjutan.

Strategi *product diferential, segmented focus and cost leader* pada hakekatnya adalah keragaman bukan keseragaman, sebab penyeragaman tidak hanya mewujudkan sistem pemerintahan yang sentralistis dan mengukuhkan “hegemoni” pusat, tetapi juga mengurangi kemampuan bahkan memandulkan prakarsa masyarakat setempat (*local governance*); artinya murah dan terjangkau. Sehingga setiap langkah harus berpedoman pada biaya yang murah dan terjangkau. Maka strategi biaya rendah ini dimasukkan untuk sektor swasta, tetapi para penyelenggara administrasi publik sebaiknya memikirkan pola serupa.

Mengacu pada pandangan dari pemikiran seperti tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa lingkungan yang penuh ketidakpastian dan sangat kompleks merupakan suatu tantangan sekaligus peluang yang harus disikapi oleh para penyelenggara negara terutama oleh TNI AL dimana wilayah kerjanya meliputi perairan yurisdiksi nasional yang sangat luas.

Luas lautan perairan wilayah yurisdiksi nasional yang lebih luas dari luas daratannya telah melahirkan konsepsi berpikir dan bertindak yang berbeda dengan para penyelenggara negara lainnya yang hanya memiliki orientasi berpikir daratan. Oleh karenanya strategi kebijakan yang harus dilakukan

seyogyanya berorientasi pada pandangan Porter tersebut di atas. Memperhatikan sumber daya yang terbatas dihadapkan pada lingkup wilayah kerja yang sangat luas serta minimnya perangkat keras dalam mendukung SSAT (Sistem Senjata Armada Terpadu) maka sudah menjadi suatu prioritas bahwa kebijakan yang dihasilkan haruslah kebijakan yang mampu membangkitkan potensi-potensi yang ada di seluruh wilayah yurisdiksi nasional. Karena keragaman potensi yang ada merupakan kekayaan yang harus menjadi keunikan dari masing-masing sektor, program dan proyek, serta sekaligus sebagai media alat pertahanan yang mampu mengoptimalkan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi.

Kebijakan TNI AL hendaknya menjadi pedoman dalam setiap langkah dalam penyelenggaraan fungsi operasi oleh pangkalan-pangkalan TNI AL. Hal ini sangat penting mengingat bahwa kebijakan pemimpin TNI AL merupakan suatu sikap pimpinan berupa kebijakan-kebijakan yang mengatur atas terselenggaranya fungsi operasi disesuaikan dengan perkembangan eskalasi ancaman yang sangat dinamis.

E. Strategi Pengembangan Potensi Pangkalan Dalam Penyelenggaraan Fungsi Operasi

Perubahan yang *turbulent* dan *uncertainty* terus berjalan dengan cepat adalah sangat signifikan bagi timbulnya masalah-masalah yang dihadapi tetapi juga sekaligus terciptanya peluang-peluang yang sangat strategis bagi organisasi untuk bisa tetap eksis secara berkelanjutan. Menurut Mc. Kinsey maka organisasi yang mampu eksis dapat ditinjau dari paling sedikitnya 7 S yakni: (1) *System*, (2)

Structure, (3) *Strategy*, (4) *Staff*, (5) *Skill*, (6) *Leadership style*, dan (7) *Share value*. Untuk perubahan organisasi yang sifatnya radikal maka perubahan yang patut dilakukan adalah 3 unsur “S” yang pertama. Sedangkan perubahan organisasi yang terdiri dari 4 unsur “S” lainnya merupakan perubahan yang bersifat bertahap (*incremental change*).

Lingkungan yang *turbulent*, *uncertainty* dan *complexity* dipandang oleh Rosabeth Moss Kanter sebagai lingkungan yang strategis untuk menjadi pemain kunci dalam ekonomi global, tetapi dengan syarat bahwa untuk menjadi pemain global harus memiliki kekayaan intangible assets “3-C”, yaitu: *Concept*; *Competence*; *Connection (networking)*.

Dengan harus dimiliki dan dikuasainya *intangible assets* didasarkan kepada asumsi bahwa kalau organisasi hanya menguasai *tangible assets* saja ternyata tidak menjamin akan terus berkelanjutan sebab *tangible assets* suatu saat akan habis dan tidak tersedia, sedangkan *intangible assets* mempunyai sifat *unstockable* dan tidak pernah kekurangan sepanjang organisasi yang dimaksud terus melakukan inovasi-inovasi dengan melalui proses pembelajaran baik individu-individu yang terlibat dalam organisasi maupun organisasi itu sendiri. Dengan dikuasainya *concept*, *competence* serta *connection* maka potensi-potensi yang dimiliki organisasi baik sektor publik maupun privat dan level apapun organisasi tersebut berada maka dapat terus menerus mengakses semua peluang yang ada.

a. *Concept*.

Pada saat *tangible assets* berlebih atau bahkan kekurangan, hal ini dipandang sebagai suatu peluang atau mungkin juga kendala pada saat organisasi tidak memiliki konsep. Karena konsep dibuat untuk mengarahkan pencapaian terhadap kecenderungan kondisi yang akan berlaku baik pada hari ini maupun pada masa yang akan datang. Dengan konsep yang *marketable* dan *predictable* maka setiap potensi organisasi akan digunakan se-efisien dan se-efektif mungkin. Dengan konsep yang menjangkau masa depan maka peluang-peluang dan masalah-masalah yang ada pada saat ini dapat teratasi.

b. *Competence.*

Kompetensi merupakan salah satu aset yang menjadi inti dari keberhasilan suatu organisasi. Dengan dimilikinya kompetensi maka organisasi pada dasarnya telah memenangkan persaingan karena dengan situasi dan kondisi apapun organisasi akan mampu beradaptasi dan mampu merespon lingkungan yang sarat dengan kompetisi. Masalah yang masih banyak didapati dalam organisasi adalah adanya *level of thinking* organisasi yang *unconscious incompetence* (tidak menyadari bahwa dirinya sebenarnya tidak mampu), sehingga dalam melakukan aktivitasnya lebih banyak didasarkan kepada “manajemen gaya lama” yang bersifat *trial and error*.

c. *Connection/Networking.*

Asset lain yang perlu dimiliki oleh organisasi adalah jaringan kerja yang merambah kemana-mana, sehingga akan memudahkan untuk mengakses dan “menjual” potensi yang dimiliki organisasi. Demikian pula dengan dimilikinya

connection maka *concept* dan *competence* organisasi akan dikenal dan “dikejar” serta tetap diperlukan oleh pihak lain. Jaringan kerja yang dimiliki dengan baik dapat mempercepat dan memperluas proses transformasi potensi organisasi oleh semua pihak yang berkepentingan dengan organisasi. Dengan demikian maka organisasi akan tetap diperlukan yang pada hakekatnya adalah organisasi tersebut akan tetap eksis dan survive serta berkelanjutan.

Pangkalan TNI AL merupakan unit atau satuan TNI AL yang tersebar diseluruh wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia. Bila dilihat dari segi kohesivitasnya maka Pangkalan TNI AL memiliki kekuatan yang paling memungkinkan untuk melakukan *connecting* dengan kekuatan lainnya yang ada di wilayahnya. Oleh karenanya dapatlah dikatakan bahwa Pangkalan TNI AL memiliki otonomi untuk menyelenggarakan pemerintahannya sekaligus sebagai ujung tombak TNI AL dalam memobilisasi kemampuannya dalam konsep jaringan SSAT (Sistem Senjata Armada Terpadu). Dengan demikian, maka dapatlah dikatakan bahwa Pangkalan harus memiliki konsep, kompetensi maupun jaringan kerja yang luas. Konsep yang dimaksudkan tentunya konsep yang diperlukan untuk mengembangkan potensi SDM maupun potensi SDA, serta potensi-potensi lainnya sehingga mampu mampu mengimbangi kebijakan TNI AL yang ditetapkan oleh Pusat (Mabes TNI AL). Sedangkan kompetensi yang dimaksudkan pada fungsi Pangkalan TNI AL adalah kemampuan Pangkalan TNI AL dalam mengakomodir semua permasalahan baik dari luar (Pemerintah Daerah) maupun dari dalam (Latihan). Permasalahan ini mungkin tidak begitu mengkhawatirkan apabila kemampuan *networking* Pangkalan TNI AL cukup baik terutama dengan stakeholder yang ada di wilayah kerjanya. Demikian pula

sebaliknya potensi-potensi yang dimiliki Pangkalan TNI AL dapat dimaksimalkan kemampuannya melalui peningkatan jaringan kerja yang luas, sehingga dapat memperlancar dan mempermudah potensi-potensi tersebut untuk terus dikembangkan.

Adanya potensi pangkalan yang beragam dengan segala dinamikanya merupakan aset yang harus disikapi dan dikembangkan. Oleh karena itu potensi pangkalan hendaknya diartikan sebagai potensi yang diserap dari adanya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sekaligus sebagai unsur yang berpengaruh dalam struktur organisasi pangkalan. Pranata dan budaya yang ada pada setiap pangkalan termasuk potensi yang harus dikembangkan sehingga menjadi unsur peluang dan memberikan kontribusi pada penyelenggaraan fungsi operasi.

F. Keberhasilan Penyelenggaraan Fungsi Operasi

Penentuan keberhasilan suatu penyelenggaraan fungsi operasi diwujudkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Penggunaan Kekuatan TNI AL.
 - a. Pembinaan kemampuan diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan TNI AL sampai kepada tingkat siap operasional. Hal tersebut dilaksanakan dengan menitikberatkan kepada peningkatan kesiapan SSAT dan perangkat lunaknya agar dapat mewujudkan empat kemampuan TNI AL yaitu kemampuan

intelijen maritim, kemampuan pertahanan, kemampuan keamanan dan kemampuan dukungan.

1) Kemampuan Intelmar. Diarahkan pada upaya peningkatan pembinaan personel intelijen, metoda, matsus intelijen dan kegiatan operasi intelijen maritim untuk mendukung kegiatan operasi laut baik di masa damai maupun perang.

2) Kemampuan Pertahanan. Diarahkan pada upaya peningkatan profesionalisme prajurit dan kesiapan Alutsista untuk melaksanakan kegiatan *naval diplomacy* dan penegakan kedaulatan melalui program pembangunan kekuatan, pelatihan dan pendidikan.

3) Kemampuan Keamanan. Diarahkan pada peningkatan profesionalisme prajurit dalam upaya penegakan hukum untuk menciptakan keamanan di wilayah perairan yurisdiksi nasional.

4) Kemampuan Dukungan. Diarahkan pada upaya peningkatan dukungan pada satuan operasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok.

b. Pembinaan latihan diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan keterampilan dan profesionalisme personel, baik perorangan maupun satuan. Pembinaan latihan harus dilaksanakan secara terus menerus agar dicapai tingkat kemampuan tempur yang dipersyaratkan melalui kegiatan latihan baik yang bertingkat dan berlanjut maupun tidak bertingkat dan berlanjut, meliputi:

- 1) Latihan Matra. Yaitu latihan yang hanya melibatkan personel dan unsur TNI AL.
- 2) Latihan Gabungan. Yaitu latihan yang melibatkan personel dan unsur TNI AL dengan angkatan lain.
- 3) Latihan Bersama dan *Meeting* dengan negara-negara sahabat.

c. Penggunaan kekuatan diarahkan untuk mencapai efektifitas operasi yang optimal melalui penggelaran kekuatan dan dukungan untuk menjamin mobilitas dan ketahananlamaan operasi satuan-satuan.

2. Pembinaan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut

- a. Mewujudkan lingkungan maritim yang kondusif dalam mendukung tugas pokok pangkalan.
- b. Memberikan pertimbangan dan perbantuan kepada pemerintah dalam penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung.

3. Pembinaan Hukum.

- a. Meningkatkan dukungan hukum terhadap operasional TNI AL khususnya di bidang penegakan hukum (Gakkum) dan penegakan kedaulatan (Gaklat) di laut.
- b. Meningkatkan koordinasi instansi Kamla terkait dalam rangka mengupayakan peran TNI AL sebagai penyidik dalam beberapa tindak pidana tertentu di laut yang belum mempunyai payung hukum.
- c. Memaksimalkan kerja sama dengan instansi-instansi terkait antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen Kelautan dan Perikanan

(DKP), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Sekretariat Negara RI, utamanya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan perbatasan wilayah laut dengan negara-negara tetangga.

d. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang hukum khususnya untuk mendukung operasional TNI AL sesuai dengan dinamika sosial dan ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini.

e. Memberikan bantuan hukum kepada Dinas, Anggota yang masih aktif dan Purnawirawan/Wredatama beserta keluarganya serta Badan-Badan Ekstra Struktural di lingkungan TNI AL serta melaksanakan pendataan dan menganalisa semua permasalahan yang berhubungan dengan hukum guna mendukung kebijakan Pemimpin TNI AL.

Ukuran keberhasilan dari penyelenggaraan fungsi operasi pada lingkup operasi tersebut merupakan keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi yang diwujudkan dalam suatu keadaan relatif dimana tidak ada hambatan dalam penyelenggaraan fungsi operasi; baik dalam penggunaan Kekuatan TNI AL, Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut, maupun dalam penegakkan hukum. Selain itu juga dilihat dan diukur dari bagaimana penyelenggaraan fungsi operasi bisa berjalan efektif dan efisien; baik dalam penggunaan Kekuatan TNI AL, pemberdayaan wilayah pertahanan laut, maupun dalam penegakkan hukum.

G. Hubungan Antar Variabel

Penyelenggaraan fungsi operasi merupakan kegiatan pengerahan segenap kekuatan berbagai elemen yang saling terintegrasi dengan dukungan kekuatan

pangkalan yang optimal. Pangkalan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan fungsi operasi. Oleh karenanya kebijakan yang mengatur dan terkait dengan fungsi pelayanan, harus diorientasikan guna mendukung penyelenggaraan keberhasilan fungsi operasi secara efektif, efisien dan lancar. Asumsi tersebut dapatlah kiranya menjadi landasan pemikiran bagaimana agar keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi tersebut bisa berjalan dengan optimal guna memenuhi tuntutan tugas dan sasaran operasi.

Untuk itulah, maka upaya pemberdayaan pada fungsi pangkalan mutlak harus dikembangkan. Sedangkan pada sisi lain aspek kebijakapun harus ditumbuh kembangkan melalui upaya validasi organisasi mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi.

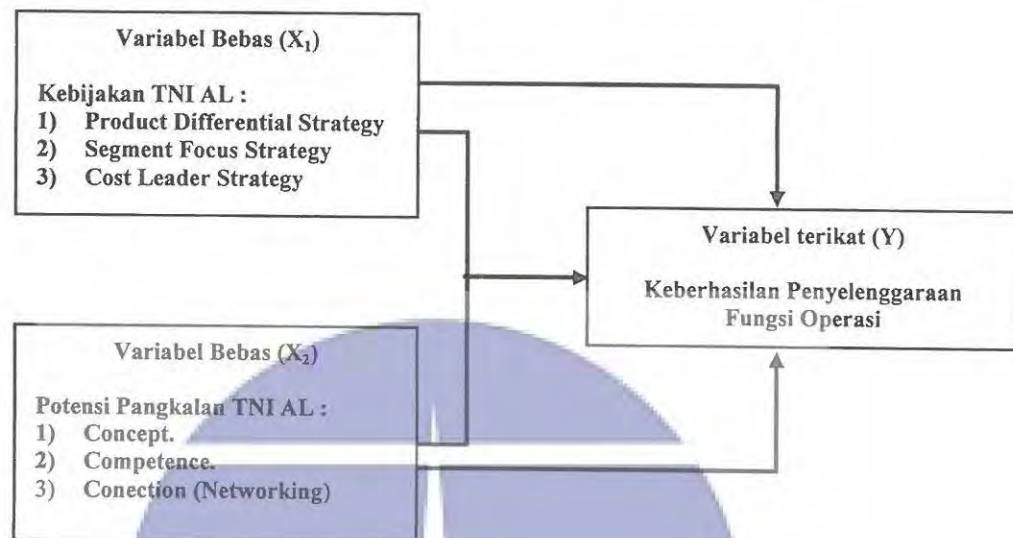
Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan ini peneliti kemukakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi dapat ditentukan oleh:

- a. Kebijakan yang "responsible dan proaktif" dengan strategi-strategi yang perlu dilakukan guna mengoptimalkan dukungan dalam penyelenggaraan operasi terutama oleh pangkalan-pangkalan.
- b. Potensi pangkalan yang "konduktivitas", yang mampu mengakses setiap perkembangan lingkungan strategis.

H. Bagan Kerangka Pemikiran/Kerangka Konsep

Konseptualisasi operasi hubungan korelasi dari variable-variabel yang akan diteliti peneliti gambarkan dalam bentuk Bagan seperti pada Gambar-01 di bawah ini.

Gambar – 01
Bagan Kerangka Pemikiran



Guna mengimplementasikan hubungan operasionalisasi dari variable-variabel tersebut diatas agar dapat diukur dengan menggunakan pendekatan survai, maka perlu diuraikan seperti tampak pada Tabel-03 di bawah ini.



Tabel-03
Variabel, Dimensi, Indikator, Sumber Data dan Item

Variabel	Dimensi	Indikator	Sumber Data	Item
Kebijakan TNI AL (X_1)	Product Differential Strategy (X_{1-1})	- Kebijakan berdasarkan potensi masyarakat	Primer	1
		- Kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakat	Primer	2
		- Kebijakan berdasarkan keinginan masyarakat	Primer	3
	Segmented Focus Strategy (X_{1-2})	- Kebijakan berdasarkan karakteristik wilayah	Primer	4
		- Kebijakan berdasarkan karakteristik mata pencaharian masyarakat	Primer	5
		- Kebijakan berdasarkan kesesuaian dengan potensi SDA wilayah	Primer	6
	Cost Leader (X_{1-3})	- Proses kebijakan mudah diwujudkan (ekonomis)	Primer	7
		- Pelaksanaan kebijakan mudah diimplementasikan	Primer	8
		- Evaluasi kebijakan mudah dilakukan	Primer	9
Potensi Pangkalan TNI AL (X_2)	Concept (X_{2-1})	- Rencana program pengembangan wilayah	Primer	10
		- Perencanaan anggaran	Primer	11
		- Pengembangan partisipasi masyarakat	Primer	12
		- Program pola kemitraan	Primer	13
		- Produk unggulan	Primer	14
	- Antisipasi kebijakan Pemda	Primer	15	
Competence (X_{2-2})	- Kemampuan administratif	Primer	16	
	- Kemampuan Pemerintah	Primer	17	
	- Kemampuan	Primer	18	

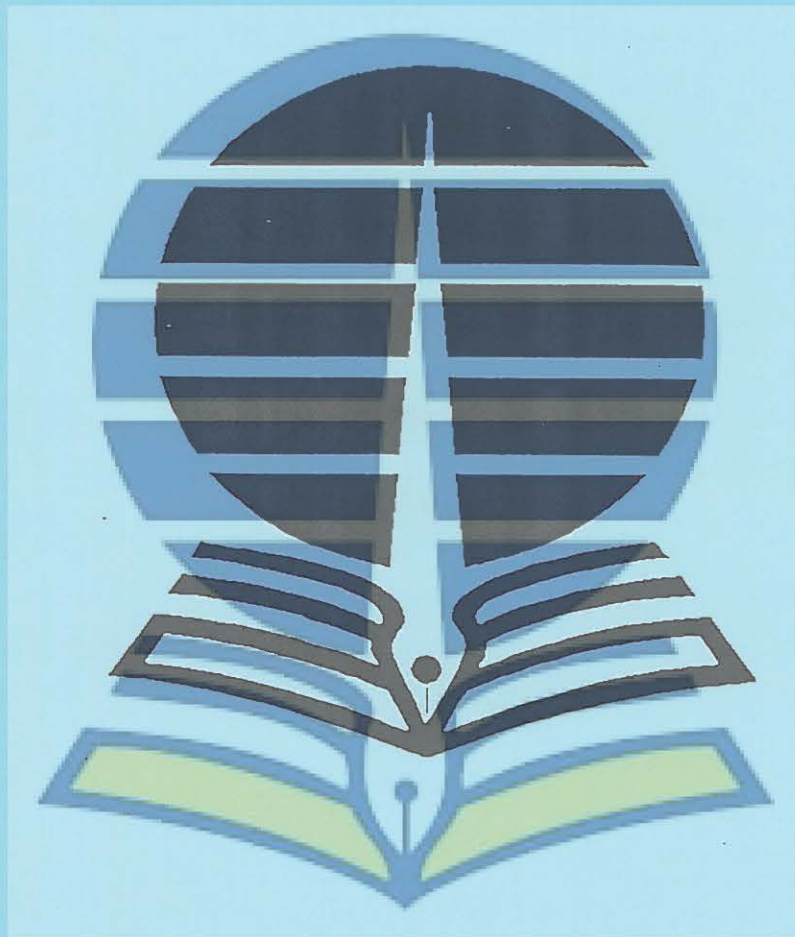
		menterjemahkan kebijakan		
		- Tingkat pendidikan memadai	Primer	19
		- Kemampuan dalam pelayanan	Primer	20
	Conection (networking) (X ₂₋₃)	- Hubungan dengan masyarakatnya (Tokoh Masyarakat, Pemuda, Alim Ulama)	Primer	21
		- Hubungan dengan pihak swasta	Primer	22
		- Hubungan dengan Pemda	Primer	23
Keberhasilan Penyelenggaraan fungsi Operasi (Y)	Penyelenggaraan fungsi operasi berjalan lancar, efektif dan efisien.	- Kelancaran Dalam Penggunaan Kekuatan.	Primer	24-42
		- Kelancaran Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut	Primer	43-44
		- Kelancaran Dalam Penegakkan Hukum	Primer	45-48
		- Efektivitas dan Efisien Dalam Penggunaan Kekuatan.	Primer	49-67
		- Efektivitas dan Efisiensi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut	Primer	68-69
		- Efektivitas dan Efisiensi Penegakkan Hukum	Primer	70-72

I. Hipotesis.

Guna lebih mengkonkritkan deskripsi operasionalisasi dari variable-variabel yang diteliti dan diukur seperti telah diuraikan di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis penelitian, sebagai berikut :

- a. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kebijakan dengan keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi.
- b. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara potensi pangkalan dengan keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi.
- c. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kebijakan dan potensi pangkalan secara bersama dengan keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi.





BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Definisi Konsep

Adapun definisi konsep dari variabel-variabel yang akan diukur dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel bebas (*independent variable* atau X), adalah Potensi Pangkalan dan Kebijakan dengan perincian sub variabel (dimensi) sebagai berikut :

X_1 = Kebijakan TNI AL diartikan sebagai suatu sikap pimpinan berupa kebijakan-kebijakan yang mengatur atas terselenggaranya fungsi operasi; sedangkan indikator variabelnya adalah 'strategi kebijakan pengembangan pangkalan' seperti yang dikemukakan oleh Michael E. Porter yaitu terdiri dari:

X_{1-1} = Strategi keragaman produk (*Product differential strategy*).

X_{1-2} = Strategy segmentasi fokus (*Segmented focus strategy*).

X_{1-3} = Pemimpin Biaya (*Cost Leader*).

X_2 = Potensi Pangkalan diartikan sebagai potensi yang diserap dari adanya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sekaligus sebagai unsur yang berpengaruh dalam struktur organisasi pangkalan; sedangkan indikator

variabelnya adalah 'strategi pengembangan potensi pangkalan' seperti yang dikemukakan oleh Rosabeth Moss Kanter yaitu terdiri dari:

$X_{2-1} = \text{Concept.}$

$X_{2-2} = \text{Competence.}$

$X_{2-3} = \text{Conection (networking).}$

2. Variabel terikat (*dependent variable* atau Y), adalah keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi. Penyelenggaraan fungsi operasi akan berjalan lancar, efektif dan efisien dengan indicator variable sebagai berikut :

$Y_1 = \text{Penggunaan Kekuatan TNI AL.}$

$Y_2 = \text{Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut}$

$Y_3 = \text{Penegakkan Hukum.}$

- Efisiensi fungsi operasi dapat dilihat dari *adanya penggunaan biaya operasi yang relatif kecil* dibandingkan dengan hasil operasi yang didapatkan.

- Efektivitas fungsi operasi dapat dilihat dari *adanya pencapaian sasaran operasi yang relatif lebih cepat* dibandingkan dengan waktu relatif pencapaian yang telah ditetapkan.

B. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yang disebut dengan dengan metode 'Penelitian Asosiatif' yaitu metode penelitian yang mencari hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Dengan menggunakan metode penelitian asosiatif, maka peneliti dapat mengetahui hubungan antara kebijakan TNI AL dan potensi pangkalan dengan keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi. Apakah ada hubungan atau tidak, apabila ada hubungan maka seberapa besar kuatnya hubungan tersebut.

Usaha mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi variable penelitian semata-mata ditujukan agar dapat mengungkapkan secara jelas dan lengkap gejala dari aspek yang diselidiki, sehingga segera dapat dilakukan pengukuran terhadap hubungan kedua variabel tersebut. Hal ini dimaksudkan akan mempermudah untuk menguraikan dan menganalisis data mengenai fenomena-fenomena yang berhubungan dengan efektivitas penyelenggaraan fungsi operasi, sehingga dapat diketahui masalahnya untuk segera dicari alternatif pemecahannya.

C. Pendekatan Penelitian

Dalam rangka mendukung penelitian dan agar diperoleh data yang *valid* dan obyektif, maka digunakanlah kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Hal ini sejalan dengan pendapat Masri Singarimbun (1989 : 3) yang mengatakan bahwa : Penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok, disebut penelitian *survei*.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. **Populasi.** Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah semua Pangkalan TNI AL (dalam hal ini Komandan Pangkalan) di seluruh Indonesia.
2. **Sampel.** Untuk keperluan menentukan jumlah responden digunakan ‘Tabel Krejcie’ (2002:65) yaitu dari jumlah populasi sebanyak 41 Pangkalan TNI AL (Lanal) diperoleh sampel sebanyak 36 Pangkalan TNI AL. Dengan tingkat kesalahan 5 % seperti ditunjukkan pada Tabel-04 di bawah ini.

Tabel-04
Jumlah Sampel Penelitian

No.	Lantamal	Lanal	
		N	n
1	Lantamal I/BLW	4	4
2	Lantamal II/TRT	4	4
3	Lantamal III/SBY	8	6
4	Lantamal IV/UPG	6	4
5	Lantamal V/JPR	4	4
6	Lantamal VI/BTG	4	4
7	Lantamal VII/TPI	6	5
8	Lantamal VIII/ABN	3	3
9	Lantamal IX/KPG	2	2
	Jumlah	41	36

Sumber: Sopsal, 2006

Dengan demikian jumlah sampel yang diambil adalah 36 Pangkalan TNI AL yang respondennya terdiri dari : Para Komandan Pangkalan TNI AL (sebagai data primer).

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Dasar untuk menentukan teknik pengumpulan data adalah bersumber dari pendapat Kartini Kartono (1993 : 64) yang mengemukakan bahwa : Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakan yang dilakukan masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya. Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah dan bertujuan.

Atas dasar pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data adalah merupakan penghimpunan dengan terencana dan sistematis data yang relevan, sehingga tujuan penelitian untuk menyelesaikan permasalahan maupun membuktikan hipotesis dapat terpenuhi dengan didukung data maupun penyiapan instrument penelitian yang memadai.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah peralatan manual sederhana dimana angket yang telah diisi oleh responden disusun dalam bentuk tabulasi sederhana, sehingga diketahui prosentase dari tiap pertanyaan yang diajukan. Sedangkan data sekunder yang diperlukan untuk melengkapi pengujian hipotesis diperoleh melalui observasi langsung di lapangan sekaligus sambil melakukan wawancara dengan para Komandan Pangkalan baik pada tingkat Lantamal maupun Lanal serta Kepala Daerah/Tokoh Masyarakat setempat dimana Pangkalan TNI AL berada.

Adapun sumber data yang peneliti peroleh dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

(1) Studi Kepustakaan.

Yaitu teknik pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yang sifatnya teoritis dan sehubungan dengan bidang-bidang sedang diteliti, seperti buku-buku, majalah, dokumen jurnal penelitian, dan berbagai literatur lainnya. Penelaahan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.

(2) Studi lapangan.

Yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung ke tempat penelitian dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi.

Sumitro (1985 : 62) mengatakan bahwa: Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala fisik untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam penelitian ini dilakukan observasi secara non-partisipatif. Joko Subagio (1991 : 66) mengatakan bahwa observasi non-partisipatif adalah pengamat (observer) tidak melibatkan diri ke dalam observer hanya pengamatan dilakukan secara sepintas pada saat tertentu kegiatan observernya.

Dengan demikian penelitian tidak terlibat secara langsung dalam proses pekerjaan, akan tetapi hanya mengamati aktivitas yang sedang berlangsung, yaitu dengan mendatangi Pangkalan-Pangkalan TNI AL yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Air Indonesia, terutama mengamati kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kebijakan TNI AL dan potensi pangkalan yang dimilikinya.

b. Angket.

Angket menurut Suharsimi Arikunto (1993 : 124) merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Dalam penelitian ini digunakan angket yang berupa daftar pertanyaan tertulis dan berstruktur serta tertutup (terbatas), artinya daftar pertanyaan yang diajukan disertai dengan alternatif jawaban untuk dipilih oleh responden guna memperoleh keterangan mengenai masalah yang dibahas. Selanjutnya angket (questionare) disebarikan kepada seluruh responden yang akan diteliti.

2. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diterima dalam bentuk hasil angket kemudian diolah agar data tersebut mampu berbicara dan memberikan informasi

tentang gambaran keadaan responden serta implikasinya. Langkah-langkah pengolahan data tersebut yaitu sebagai berikut:

(1) Pengujian normalitas data dari tiap-tiap pernyataan dalam angket yang biasa disebut analisis item (hasil periksa Lampiran-2), yaitu dengan memeriksa kelengkapan jumlah dokumen (daftar isian) yang terkumpul, dan menyeleksi angket-angket tersebut apakah sudah terisi dengan baik oleh responden atau belum, sekaligus memilihnya, maka penulis melakukan pemberian angket secara ulang kepada responden yang belum sempurna mengisi angket tersebut.

(2) Jawaban angket diukur dengan menggunakan Skala Likert, menurut Sugiono (1998 : 31) bahwa setiap item instruments yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang berupa pernyataan: (1) Setuju; (2) Kurang Setuju; (3) Tidak Setuju.

(3) Berdasarkan pendapat di atas penulis menggunakan skala 5 (lima), kemudian untuk kepentingan analisis secara kualitatif maka jawaban ini diberi skors dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Untuk jawaban a dengan kriteria Selalu diberi skor 5.
- Untuk jawaban b dengan kriteria Sering diberi skor 4.
- Untuk jawaban c dengan kriteria Kadang-kadang diberi skor 3.
- Untuk jawaban d dengan kriteria Tidak Pernah diberi skor 2.
- Untuk jawaban e dengan kriteria Tidak Tahu diberi skor 1.

(4) Dalam pemberian Skors seperti di atas maka akan diperoleh variasi jawaban yang bergerak dari 1 – 5. Karena itu interval antara satu kriteria dengan kriteria lainnya diperoleh angka

= 0,80. Hal ini diperoleh setelah adanya pengurangan dari nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi banyaknya alternatif jawaban, yang dalam bentuk angkanya:

$$\frac{5 - 1}{5} = \frac{4}{5} = 0,80$$

(5) Berangkat dari ketentuan tersebut di atas, maka tingkat kategori jawaban yang diperoleh untuk *kebijakan* dan *potensi pangkalan* dilakukan dengan kriteria penafsiran sebagai berikut:

- 1,00 – 1,80 berarti sangat buruk
- 1,81 – 2,61 berarti buruk
- 2,62 – 3,42 berarti cukup.
- 3,43 – 4,23 berarti baik
- 4,24 – 5,00 berarti sangat baik.

(6) Kemudian untuk memperoleh angka penafsiran digunakan rumus:

$$M = \frac{\sum (f(X)/N)}{N}$$

Keterangan:

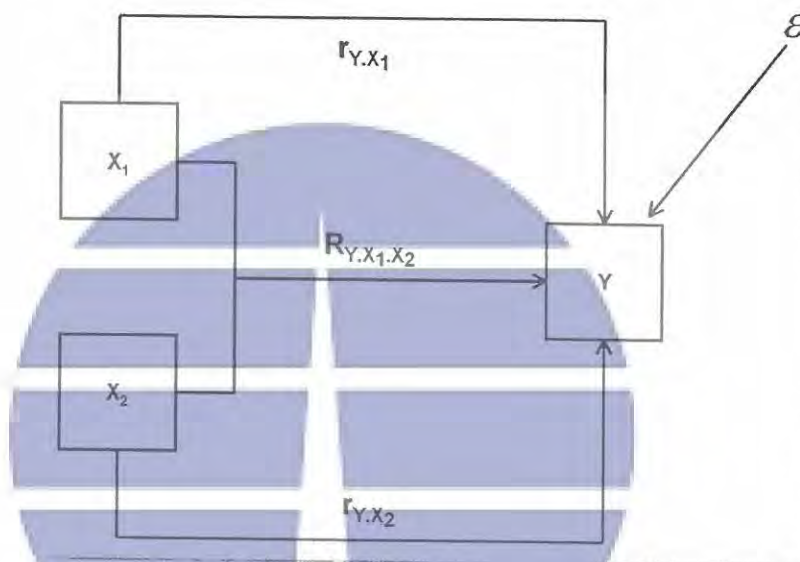
- M = Perolehan angka kriteria penafsiran
- F = Frekuensi jawaban
- X = Pembobotan
- N = Jumlah seluruh jawaban (jumlah responden)
- Σ = Penjumlahan

F. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa korelasional paradigma ganda dengan menggunakan dua variabel independen (bebas). Dalam hal ini ditunjukkan dengan ada hubungan bersama-sama antara

X_1 dengan X_2 terhadap Y , yang dapat digambarkan dalam model konstelasi sebagai berikut:

Gambar - 02
Model Konstelasi



Keterangan:

- Kebijakan TNI AL (X_1) dan Potensi Pangkalan TNI AL (X_2) adalah variabel independen (bebas).
- Keberhasilan Penyelenggaraan Fungsi Operasi (Y) adalah variabel dependen (terikat).
- Variabel lain (ε), di luar X_1 dan X_2 yang mempengaruhi Y , tetapi tidak dimasukkan ke dalam model, jadi tidak diukur atau diuji.

Selanjutnya untuk menguji hipotesisnya dilakukan dengan menggunakan tes statistik berupa uji Korelasi Product Moment dan Ganda dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Melalui tabel pembantu tentukan dan hitung korelasi sederhana Product Moment dari Pearson baik r_{X1Y} , r_{X2Y} maupun r_{X1X2} .

Rumus korelasi sederhana (salah satunya) yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$R_{yx_1} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

Keterangan:

$$\begin{aligned} R_{yx_1} &= \text{Korelasi antara variabel } X_1 \text{ dengan } Y \\ y &= (X_i - \bar{X}) \\ y &= (Y_i - \bar{Y}) \end{aligned}$$

b. Setelah dihitung masing-masing korelasi parsial kemudian menghitung korelasi ganda Product Moment ($R_{Y.X_1X_2}$) yang merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel bebas secara bersama-sama dengan satu variabel terikat.

Rumus korelasi ganda yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$R_{YX_1X_2} = \sqrt{\frac{r^2_{YX_1} + r^2_{YX_2} - 2r_{YX_1}r_{YX_2}r_{X_1X_2}}{1 - r^2_{X_1X_2}}}$$

Keterangan:

$$\begin{aligned} R_{YX_1X_2} &= \text{Korelasi ganda antara variabel } X_1 \text{ dan } X_2 \text{ secara} \\ &\quad \text{bersama-sama dengan variabel } Y \\ r_{YX_1} &= \text{Korelasi Product Moment antara } X_1 \text{ dengan } Y \\ r_{YX_2} &= \text{Korelasi Product Moment antara } X_2 \text{ dengan } Y \\ r_{X_1X_2} &= \text{Korelasi Product Moment antara } X_1 \text{ dengan } X_2 \end{aligned}$$

Adapun pedoman yang dipergunakan untuk menginterpretasikan nilai koefisien korelasi yang didapat, akan dipergunakan kriteria berdasarkan pendapat Sugiono (2002 : 149).

Tabel – 05
Kriteria Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (2002 : 149)

G. Lokasi dan Jadwal Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Lanal-Lanal (Pangkalan TNI AL) yang berada di wilayah yurisdiksi NKRI. Adapun lamanya penelitian diperkirakan memerlukan tempo waktu selama 6 bulan sejak awal kegiatan berupa pengamatan obyek yang akan diteliti sampai dengan proses pengolahan data dan penyusunannya dalam bentuk laporan hasil penelitian.

2. Jadwal Penelitian

Susunan jadwalnya adalah sebagai berikut:

WAKTU KEGIATAN	01/06 (1)	02/06 (2)	03/06 (3)	05/06 (4)	10/06 (5)	11/06 (6)
1. Pengamatan	xxxx					
2. Bimbingan		xxxx				
3. Mengajukan UP			xxxx			
4. Penelitian Lapangan				xxxx		
5. Pengolahan Data					xxxx	xxxx
6. Ujian Tesis						xxxx



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Kondisi Umum

Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dibentuk berdasarkan Skep Pangab Nomor : Kep/08/VII/1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang Penyempurnaan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur TNI AL. Perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional yang berubah secara dinamis, cepat dan sulit diprediksi mempunyai pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk tantangan tugas TNI AL ke depan, sesuai UU TNI Nomor 34 tahun 2004 pasal 9 tugas TNI AL adalah:

- a. Melaksanakan tugas TNI Matra Laut di bidang pertahanan.
- b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
- c. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan Politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah.
- d. Melaksanakan tugas TNI dalam membangun dan mengembangkan kekuatan Matra Laut.
- e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Mencermati kecenderungan perkembangan lingkungan strategik yang terjadi pada akhir-akhir ini, maka beberapa tantangan tugas ke depan yang perlu diwaspadai dan diantisipasi oleh TNI AL adalah:

- a. Antisipasi terhadap masalah Wilayah Perbatasan Laut.
- b. Antisipasi terhadap corong-corong strategik.
- c. Antisipasi terhadap berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut.
- d. Antisipasi terhadap pengamanan ALKI.
- e. Antisipasi untuk menunjang Operasi Keamanan Dalam Negeri.
- f. Antisipasi terhadap perimbangan kekuatan negara-negara tetangga.
- g. Antisipasi terhadap tugas-tugas internasional di bawah naungan PBB.

Perubahan Konsep strategik TNI AL. TNI AL sebagai bagian integral dari TNI, secara proporsional mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan kedaulatan negara di laut dengan mewujudkan kondisi laut terkendali. Terwujudnya kondisi laut yang terkendali, berarti laut yuridiksi nasional secara leluasa dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional baik dalam aspek kesejahteraan maupun keamanan, sedangkan di sisi lain laut yuridiksi nasional tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lawan atau calon lawan.

Sementara itu, pada pasal 2 ayat (2) UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menyebutkan bahwa Pertahanan Negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Hal ini mempertegas bahwa strategi pertahanan negara harus mengedepankan strategi pertahanan laut nusantara. Mau tidak mau, dalam merealisasikan terwujudnya kondisi laut yang

bebas dari ancaman kekerasan dengan penggunaan kekuatan bersenjata, bebas dari ancaman navigasi bagi kelancaran jalur perdagangan ekonomi dunia, bebas dari ancaman terhadap eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya laut serta bebas dari ancaman pelanggaran hukum, perlu Angkatan Laut yang mampu mengendalikan lautan demi kepentingannya. Perlu Angkatan Laut yang disegani oleh para pelaku pelanggar hukum maupun sebagai deterrence agar disegani oleh pihak-pihak asing yang akan mengganggu keamanan dan keutuhan wilayah negara. Konsep strategik TNI AL yang selama ini ada yaitu Kecil, Efektif dan Efisien tidak memungkinkan memiliki kemampuan untuk menjamin kepentingan nasional di dan atau lewat laut, sehingga TNI AL memandang perlu mengubah konsep strategiknya dan juga menjadi visi TNI AL ke depan. Adapun perubahan tersebut adalah:

- a. TNI AL yang besar, dimaksudkan bahwa jumlah unsur yang dimiliki TNI AL sebanding dengan rasio perairan yang harus dijaga.
- b. TNI AL yang kuat, dimaksudkan bahwa kemampuan pukul strategis dari unsur yang dimiliki mampu memberikan dampak penangkalan dan daya hancur terhadap musuh yang akan mengganggu kedaulatan negara.
- c. TNI AL yang profesional, dimaksudkan bahwa kemampuan tempur prajurit TNI AL dapat diandalkan dan memenuhi standar profesionalisme prajurit dengan selalu berorientasi pada perkembangan teknologi Alat Utama Sistem Senjata (Alut Sista) yang diwakinya.

2. Struktur Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

Berdasarkan Keputusan Pangab Nomor Kep/08/VII/1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang Penyempurnaan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur TNI AL, secara umum profil Organisasi TNI AL saat ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Unsur Pimpinan : Kasal
- b. Unsur Pembantu Pimpinan
 - 1) Wakasal.
 - 2) Irjenal.
 - 3) Koorsahli Kasal terdiri dari 6 Kelompok Sahli.
 - 4) Asisten Kasal terdiri atas 5 Asisten.
 - 5) Spri Kasal.
- c. Unsur Pelayanan/Pelaksana
 - 1) Puskodal.
 - 2) Denmako.
 - 3) Setumal.
- d. Unsur Pelaksana Pusat terdiri dari 21 Kedinasan, 2 Balakpus dan 28 Unsur Pelaksana Teknis (UPT).
- e. Kotama Fungsional : Kodikal.
- f. Kotama Pembinaan : Kormar.
- g. Kotama Pembinaan/Operasional :
 - 1) Kolinlamil.
 - 2) Koarmatim dan Koarmabar yang masing-masing membawahi Lantamal, Lanal dan Lanudal.

3. Profil Pangkalan TNI AL Sebagai Pendukung SSAT

Profil Pangkalan TNI AL sebagai pendukung SSAT dapat dilihat atau dibagi dalam tiga bentuk atau jenis pangkalan yaitu : Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal), Pangkalan TNI AL (Lanal) dan Pangkalan Udara TNI AL (Lanudal). Masing-masing pangkalan tersebut fungsi dan tugas serta tanggung jawabnya dapat dilihat dibawah ini.

a. Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal)

Dalam melaksanakan tugas pokok, Lantamal menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- 1) Fungsi penyelenggara dukungan logistik dan administrasi:
 - a) Menyusun dan melaksanakan rencana dan program pembinaan kemampuan dukungan logistik dan administrasi Lantamal II beserta sarana dan prasarana pendukungnya berdasarkan rencana dan program Koarmabar.
 - b) Menyediakan fasilitas labuh, sandar dan pemangkalan bagi kapal perang, pesawat udara dan pasukan Marinir.
 - c) Melaksanakan perawatan personel termasuk penampungan, perumahan, pelayanan serta dukungan kesehatan, angkutan, rekreasi, penegakan dan pembinaan tata tertib dan disiplin, pembinaan mental dan jasmani serta bantuan hukum.
 - d) Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan kapal dan Pesud tingkat menengah dan pemeliharaan darurat, kegiatan penyelamatan dan penyelaman bawah air serta penyediaan

fasilitas untuk pengujian dan kalibrasi peralatan navigasi dan senjata.

e) Melaksanakan dukungan pembekalan bekal umum, bekal teknik dan bekal khusus melalui kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penghapusan sesuai tingkat dan lingkup kewenangannya.

f) Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Lantamal II guna menjamin tercapainya sasaran program secara berhasilguna dan berdayaguna.

g) Membina kekuatan dan kemampuan jajaran Lantamal II meliputi perencanaan, penyiapan dan pelaksanaannya.

2) Fungsi penyelenggara Kamla:

a) Melaksanakan pembinaan kemampuan guna meningkatkan kesiapan unsur-unsur Kamla organiknya.

b) Menyelenggarakan operasi keamanan laut dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum laut.

c) Melaksanakan pengendalian unsur Kamla (KAL) yang beroperasi di bawah komandonya, termasuk unsur dari instansi lain yang di BKO-kan.

d) Melaksanakan proses penyelesaian hukum terhadap pelanggar tindak pidana tertentu di laut, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- e) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di kawasan Lantamal II, baik operasional di laut maupun proses penyelesaian kasus yang terjadi.
- f) Membantu SAR di laut, penyelamatan dan penanggulangan bencana alam.

3). Fungsi penyelenggara Binpotnaskuatmar:

- a) Mengumpulkan data potensi wilayah bidang maritim untuk disampaikan kepada Pangarmabar.
- b) Menyelenggarakan pembinaan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di bidang maritim berdasarkan rencana dan pengarahannya Pangarmabar
- c) Melaksanakan koordinasi dengan Pemda dan komponen kekuatan maritim terkait dalam rangka pelaksanaan pembinaan.
- d) Menyelenggarakan Pembinaan Masyarakat Nelayan dan Desa Pesisir, sebagai program yang secara khusus ditetapkan oleh Pimpinan TNI AL, bagi kepentingan Hankamneg bidang Maritim.

4) Fungsi penyelenggara Bintermatla:

- a) Melaksanakan pembinaan teritorial matra laut terhadap wilayah dan masyarakat maritim untuk membentuk ruang, alat, dan kondisi juang bagi operasi laut, berdasarkan rencana dan program Pangarmabar.

- b) Melaksanakan pembinaan Pramuka Saka Bahari dan Bintal Juang Remaja Bahari secara terprogram dan berlanjut di wilayah Lantamal II dan jajarannya.
- c) Mengembangkan olah raga laut dan perairan di wilayah Lantamal II dan jajarannya.

b. Pangkalan TNI AL (Lanal)

Dalam melaksanakan tugas pokok, Lanal menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- 1) Pangkalan TNI AL disingkat Lanal adalah satuan pelaksana Lantamal II yang bertugas pokok menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-unsur TNI AL, pembinaan Peran TNI, pembinaan potensi maritim menjadi kekuatan pertahanan keamanan di laut dan operasi keamanan laut terbatas.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Lanal menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut
 - a) Menyusun dan melaksanakan rencana dan program pembinaan kemampuan Lanal beserta sarana dan prasarana pendukungnya dalam jajaran Lanal berdasarkan rencana dan program Lantamal II.
 - b) Menyediakan fasilitas labuh dan pemangkalan bagi kapal, Pesud dan Marinir serta kegiatan pengamanan magnetik/degausing.

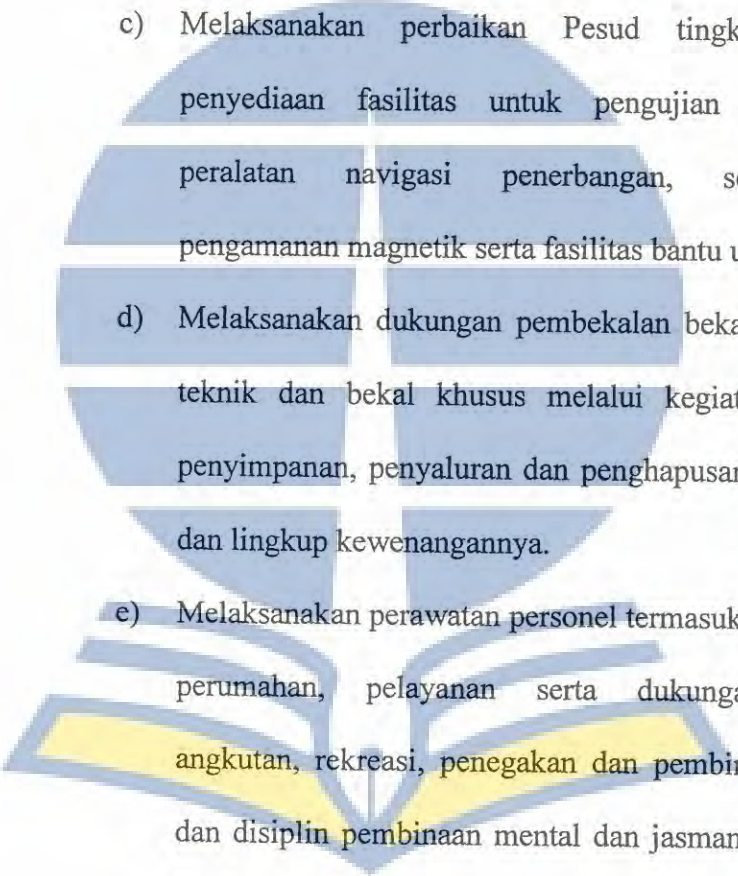
- c) Menyediakan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal maupun Pesud.
- d) Melaksanakan dukungan pembekalan bekal umum, bekal teknik dan bekal khusus melalui kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penghapusan sesuai tingkat dan lingkup kewenangannya.
- e) Melaksanakan perawatan personel termasuk penampungan, perubahan, pelayanan serta dukungan kesehatan, angkutan, rekreasi, penegakan dan pembinaan tata tertib dan disiplin, pembinaan mental dan jasmani serta bantuan hukum.
- f) Membina kekuatan dan kemampuan jajaran Lanal meliputi perencanaan, penyusunan, pelabuhan, penyiapan dan pelaksanaannya.
- g) Merencanakan dan melaksanakan latihan gladi tugas tempur 1 (P1) sampai dengan gladi tugas tempur 3 (P3) dalam rangka memelihara dan meningkatkan kemampuan tempurnya.
- h) Menyelenggarakan operasi keamanan laut terbatas dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut serta melaksanakan koordinasi dan pengaturan pertahanan pangkalan, menindaklanjuti proses penyelesaian perkara tindak pidana tertentu di laut.
- i) Melaksanakan pembinaan Peran TNI di lingkungannya berdasarkan rencana dan program Lantamal II.

- j) Menyelenggarakan pembinaan potensi maritim menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di laut berdasarkan rencana dan program Lantamal II.
- k) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan komando, badan dan instansi baik di dalam maupun di luar TNI AL guna kepentingan pelaksanaan tugas pokoknya, sesuai tingkat dan lingkup kewenangannya.
- l) Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Lanal guna menjamin pencapaian sasaran programnya secara berhasilguna dan berdayaguna.
- m) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Danlantamal II khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

c. Pangkalan Udara TNI AL (Lanudal)

Dalam melaksanakan tugas pokok, Lanudal menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- 1) Pangkalan Udara TNI AL disingkat Lanudal adalah satuan pelaksana Lantamal II yang bertugas pokok menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi kepada unsur-unsur udara TNI AL dan tugas-tugas lain sesuai kebijaksanaan pemimpin TNI AL.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Lanudal menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 
- a) Menyusun dan melaksanakan rencana dan program pembinaan kemampuan Lanudal beserta sarana dan prasarana pendukungnya dalam jajaran Lanudal berdasarkan rencana dan program Lantamal II.
- b) Menyediakan fasilitas labuh dan pemangkalan bagi Pesud TNI AL.
- c) Melaksanakan perbaikan Pesud tingkat menengah, penyediaan fasilitas untuk pengujian dan kalibrasi peralatan navigasi penerbangan, senjata udara, pengamanan magnetik serta fasilitas bantu udara.
- d) Melaksanakan dukungan pembekalan bekal umum, bekal teknik dan bekal khusus melalui kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penghapusan sesuai tingkat dan lingkup kewenangannya.
- e) Melaksanakan perawatan personel termasuk penampungan, perumahan, pelayanan serta dukungan kesehatan, angkutan, rekreasi, penegakan dan pembinaan tata tertib dan disiplin pembinaan mental dan jasmani serta bantuan hukum.
- f) Menyelenggarakan pembinaan kemampuan pertahanan pangkalan.
- g) Membina kekuatan dan kemampuan jajaran Lanudal meliputi perencanaan, penyusunan, pelatihan, penyiapan dan pelaksanaannya.

- h) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan komando, badan dan instansi baik di dalam maupun di luar TNI AL guna kepentingan pelaksanaan tugas pokoknya.
- i) Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program Lanudal guna menjamin pencapaian sasaran programnya secara berhasilguna dan berdayaguna.
- j) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Danlantamal II khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

B. Analisa Deskriptif Hubungan Kebijakan dan Potensi Pangkalan TNI AL Dengan Keberhasilan Penyelenggaraan Fungsi Operasi

1. Aspek Kebijakan TNI AL

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap aspek kebijakan TNI AL secara deskriptif analisis dapat digambarkan melalui indikasi-indikasi sebagai berikut :

- *Product Differential Strategy (X₁₋₁)*

Interpretasi suatu kebijakan yang dapat menyentuh suatu kepentingan merupakan harapan utama dari maksud kebijakan tersebut dibuat atau diciptakan. Oleh karenanya suatu kebijakan yang baik haruslah mampu menghasilkan tercapainya berbagai 'keragaman' kepentingan atau *Product Differential Strategy (X₁₋₁)*.

- **Kebijakan berdasarkan potensi pangkalan**

Pada Tabel-06 dibawah ini tampak bahwa pemahaman responden terhadap Peraturan Dinas Dalam sebagai kebijakan rutin yang mendasar dalam menjaga kehidupan kesatrian tetap berjalan sesuai ciri khas TNI AL merupakan indikasi dasar dan awal bahwa tujuan keberadaan pangkalan dapat dipahami oleh Para Komandan Pangkalan. Namun sampai sejauh mana kebijakan tersebut mampu dilaksanakan dan sesuai dengan potensi atau kemampuan yang dimiliki pangkalan adalah hal penting yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan *Product Differential Strategy* yang pada intinya kebijakan tersebut sudah sesuai dengan potensi pangkalan, yaitu : diperoleh angka kriteria penilaian 4 dimana hasil tersebut termasuk kriteria penilaian *Baik*. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 44,44% menyatakan jawaban 'sering' , 27,78% menyatakan jawaban 'selalu' dan 27,78% menyatakan jawaban 'kadang-kadang' (Tabel-06).

Tabel – 06
Tanggapan Responden
Tentang Kebijakan Berdasarkan Potensi Pangkalan

Alternatif Jawaban	f	%	X	f(x)	B
Selalu	10	27,78	5	50	M = $\frac{144}{36}$
Sering	16	44,44	4	64	
Kadang-Kadang	10	27,78	3	30	
Tidak Pernah	-	-	2	-	= 4,00
Tidak Tahu	-	-	1	-	
Jumlah	36	100		144	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

- **Kebijakan berdasarkan kebutuhan pangkalan**

Sedangkan pada sisi lain yang dipandang amat penting oleh pihak para Komandan Pangkalan adalah bahwa kebijakan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan Pangkalan. Hal ini ternyata bahwa kebijakan dapat diinterpretasikan sudah sesuai dengan kebutuhan Pangkalan dengan kriteria penilaian 'Baik'. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 47,22% menyatakan jawaban 'sering', 27,78% menyatakan jawaban 'selalu' dan 25% menyatakan jawaban 'kadang-kadang' (Tabel-07).

Tabel – 07
Tanggapan Responden
Tentang Kebijakan Berdasarkan Kebutuhan Pangkalan

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	10	27,78	5	50	M = $\frac{145}{36}$ = 4,03
Sering	17	47,22	4	68	
Kadang-Kadang	9	25	3	27	
Tidak Pernah	-	-	2		
Tidak Tahu	-	-	1		
Jumlah	36	100		145	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

- **Kebijakan berdasarkan keinginan Pangkalan**

Pada sisi lain yang patut menjadi perhatian utama dari Pandangan Para Komandan Pangkalan adalah bahwa kebijakan senantiasa berdasarkan keinginan Pangkalan. Artinya, bahwa kebijakan-kebijakan yang mengatur tercapainya tugas pokok pangkalan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pangkalan. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh Tabel-08 dimana kriteria penilaiannya menunjukkan angka 3,92 atau Baik. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 47,22% menyatakan jawaban 'sering', 22,22% menyatakan jawaban 'selalu' dan 30,56% menyatakan jawaban 'kadang-kadang' (Tabel-08).

Tabel – 08
Tanggapan Responden
Tentang Kebijakan Berdasarkan Keinginan Masyarakat

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	8	22,22	5	40	$M = \frac{141}{36} = 3,92$
Sering	17	47,22	4	68	
Kadang-Kadang	11	30,56	3	33	
Tidak Pernah	-	-	2	-	
Tidak Tahu	-	-	1	-	
Jumlah	36	100		141	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

- ***Segmented Focus Strategy (X₁₋₂)***

Kebijakan yang ideal hendaknya dapat menghasilkan tercapainya kepentingan yang berfokus pada kepentingan dari obyek kebijakan itu sendiri baik untuk kebijakan pada tingkat pusat maupun kebijakan pada tingkat daerah atau *Segmented Focus Strategy (X₁₋₂)*. Berbagai jenis kebutuhan dan kepentingan Pangkalan dapat terpenuhi dan terwadahi oleh berbagai jenis kebijakan, sehingga setiap langkah atau tindakan dalam penyelenggaraan fungsi Pangkalan dapat difasilitasi oleh adanya kebijakan yang memayunginya.

• **Kebijakan berdasarkan karakteristik wilayah**

Suatu kebijakan yang memiliki karakteristik sesuai dengan situasi dan kondisi dari karakteristik suatu wilayah merupakan harapan dari Para Komandan Pangkalan. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan tersebut mampu merespon setiap perubahan yang terjadi di lingkungannya masing-masing. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh Tabel-04 dimana kriteria penilaiannya menunjukkan angka 3,97 atau Baik. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 41,67% menyatakan jawaban 'sering', 30,56% menyatakan jawaban 'selalu' dan 25% menyatakan jawaban 'kadang-kadang', serta 2,78% menyatakan 'Tidak Tahu'

(Tabel-09). Berdasarkan penyusunan ulang pada obyek yang diteliti ternyata alasan bahwa 'ketidak tahuannya' tersebut disebabkan oleh tingkat 'kemauan' Komandan Pangkalan untuk memahami lingkungan strategis disekitarnya.

Tabel – 09
Tanggapan Responden
Tentang Kebijakan Berdasarkan Karakteristik Wilayah

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	11	30,56	5	55	M = $\frac{143}{36}$ = 3,97
Sering	15	41,67	4	60	
Kadang-Kadang	9	25	3	27	
Tidak Pernah	-	-	2	-	
Tidak Tahu	1	2,78	1	1	
Jumlah	36	100		143	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

- **Kebijakan berdasarkan karakteristik mata pencaharian masyarakat**

Karakteristik mata pencaharian masyarakat merupakan lingkungan dimana Pangkalan berada dan memberikan saling interaksi yang saling menguntungkan baik masalah personel maupun dalam pencapaian tugas pokok TNI AL. Berdasarkan Tabel-10 di bawah ini dapat diketahui bahwa nilai interpretasinya adalah baik atau 3,86. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 47,22% menyatakan jawaban 'sering', 25% menyatakan jawaban 'selalu' dan 16,67% menyatakan jawaban 'kadang-kadang', serta 11,11% menyatakan 'Tidak Pernah' (Tabel-10). Berdasarkan penyusunan ulang pada obyek yang diteliti ternyata bahwa alasan 11,11% menyatakan "tidak pernah" tersebut disebabkan oleh soliditas keberadaan pangkalan yang stabil dan jauh dari lingkungan masyarakat dengan segala aspeknya.

Tabel – 10
Tanggapan Responden
Tentang Kebijakan Berdasarkan Karatersitik Mata Pencapaian
Masyarakat

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	9	25	5	45	$M = \frac{139}{36}$ = 3,86
Sering	17	47,22	4	68	
Kadang-Kadang	6	16,67	3	18	
Tidak Pernah	4	11,11	2	8	
Tidak Tahu	-	-	1	-	
Jumlah	36	100		139	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

- **Kebijakan berdasarkan kesesuaian dengan potensi SDA wilayah**

Sumber Daya Alam (SDA) adalah salah satu bahan pertimbangan dalam penentuan sebuah organisasi yang dalam hal ini Pangkalan seperti : Kualitas air tawar, Kontur Pantai yang cocok untuk sebuah pelabuhan, tanah yang subur, dll. Namun berdasarkan hasil angket seperti tampak pada Tabel-11 di bawah ini interpretasi responden menunjukkan angka 2,89 atau cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 50% menyatakan jawaban 'kadang-kadang' , 13,89% menyatakan jawaban 'sering', 13,89% menyatakan jawaban 'tidak pernah', 13,89% menyatakan 'Tidak Tahu' dan hanya 8,33% yang menyatakan 'selalu' (Tabel-11). Berdasarkan penyusuran ulang pada obyek yang diteliti ternyata bahwa alasan 13,89% menyatakan "tidak pernah" dan 13,89% menyatakan "tidak tahu" tersebut disebabkan oleh dasar asumsi keberadaan tidak selalu harus didukung oleh SDA yang memadai akan tetapi didasarkan atas tantangan dan ancaman yang merongrong NKRI atau tugas pokok TNI AL. Oleh karena itu antara kebijakan berupa Peraturan Dinas Dalam yang menggerakkan penyelenggaraan Tugas Pokok TNI AL 'sedikit' terpengaruh oleh keberadaan SDA atau kondisi wilayah.

Tabel – 11
Tanggapan Responden
Tentang Kebijakan Berdasarkan Kesesuaian Dengan Potensi SDA
Wilayah

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	3	8,33	5	15	$M = \frac{104}{36} = 2,89$
Sering	5	13,89	4	20	
Kadang-Kadang	18	50,00	3	54	
Tidak Pernah	5	13,89	2	10	
Tidak Tahu	5	13,89	1	5	
Jumlah	36	100		104	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

- ***Cost Leader (X₁₋₃)***

Kebijakan yang menghasilkan tatanan penyelenggaraan pencapaian tujuan pokok dapat terlaksana dengan murah dan mudah pada umumnya merupakan harapan dari para penyelenggara atau penanggung jawab implementasi kebijakan.

• **Proses kebijakan mudah diwujudkan (ekonomis)**

Berdasarkan hasil angket yang disebarkan pada responden seperti tampak pada Tabel-12 di bawah ini dapat diketahui bahwa tingkat interpretasi responden sebesar 4,56 atau Sangat Baik. Artinya bahwa kebijakan yang ada sudah dapat diimplementasikan dengan mudah dan murah. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 72,22% menyatakan jawaban 'selalu' , 16,67% menyatakan jawaban 'kadang-kadang' dan 11,11 % yang menyatakan 'sering' (Tabel-12). Berdasarkan pendapat responden tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa kebijakan yang ada mampu difasilitasi dengan mudah dan murah atau terjangkau dan sesuai dengan kemampuan pembiayaan pangkalan.

Tabel – 12
Tanggapan Responden
Tentang Proses Kebijakan Mudah Diwujudkan (ekonomis)

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	26	72,22	5	130	M = $\frac{164}{36}$ = 4,56
Sering	4	11,11	4	16	
Kadang-Kadang	6	16,67	3	18	
Tidak Pernah	-	-	2	-	
Tidak Tahu	-	-	1	-	
Jumlah	36	100		164	Sangat Baik

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

- **Pelaksanaan kebijakan mudah diimplementasikan**

Sedangkan tingkat interpretasi responden bahwa kebijakan tersebut mudah diimplementasikan dapat dilihat pada Tabel-13 di bawah ini yaitu sebesar 4,47% atau Sangat Baik. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 47,22% menyatakan jawaban 'selalu' dan 52,78% menyatakan 'sering' (Tabel-13).

Tabel – 13
Tanggapan Responden
Tentang Pelaksanaan Kebijakan Mudah Diimplementasikan

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	17	47,22	5	85	M = $\frac{161}{36}$ = 4,47
Sering	19	52,78	4	76	
Kadang-Kadang	-	-	3		
Tidak Pernah	-	-	2		
Tidak Tahu	-	-	1		
Jumlah	36	100		161	Sangat Baik

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

- **Evaluasi kebijakan mudah dilakukan**

Pada sisi manajerial berupa evaluasi dan pengendalian pun hendaknya dapat difasilitasi oleh berbagai kebijakan yang ada. Berdasarkan pada Tabel-14

tampaknya evaluasi dan pengendalian dapat diinterpretasikan dengan nilai 4,08 atau Baik. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 50% menyatakan jawaban 'kadang-kadang', 47,22% menyatakan jawaban 'sering' dan 30,56% yang menyatakan 'sering' (Tabel-14). Berdasarkan penyusuran pada responden dapat diketahui bahwa alasan 'kadang-kadang' sebesar 50% tersebut disebabkan oleh banyaknya kebijakan yang cenderung bersifat perintah dan bersifat rahasia, sehingga menyulitkan untuk bisa dievaluasi dengan mudah.

Tabel – 14
Tanggapan Responden
Tentang Tugas yang Rumit dan Sulit Sebagai Proses Pembelajaran

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	11	30,56	5	55	$M = \frac{147}{36} = 4,08$
Sering	17	47,22	4	68	
Kadang-Kadang	18	50,00	3	24	
Tidak Pernah	-	-	2	-	
Tidak Tahu	-	-	1	-	
Jumlah	36	100		147	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rekapitulasi interpretasi jawaban responden dari aspek kebijakan TNI AL mulai dari Tabel-06 sampai dengan Tabel-14 memiliki nilai rata-rata 3,98 atau Baik (Tabel-15).

Tabel – 15
Rekapitulasi Tanggapan Responden Aspek Kebijakan TNI AL

Alternatif Jawaban	Kriteria
Tabel-06	4,00
Tabel-07	4,03
Tabel-08	3,92
Tabel-09	3,97
Tabel-10	3,86
Tabel-11	2,89
Tabel-12	4,56
Tabel-13	4,47
Tabel-14	4,08
Nilai Rata-rata	3,98 atau Baik

2. Aspek Potensi Pangkalan TNI AL

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap aspek Potensi Pangkalan TNI AL dapat digambarkan melalui indikasi-indikasi sebagai berikut :

- *Concept (X₂₋₁)*

Pada hakekatnya bila dipandang dari asset yang tidak kelihatan (*intangible assets*) pada dasarnya konsep (*Concept*) merupakan salah satu potensi yang sangat penting dari keberadaan suatu obyek. Konsep akan menggambarkan suatu eksistensi dari obyek tersebut berada. Demikian pula dengan konsep Pangkalan TNI AL yang tersebar di seluruh wilayah yurisdiksi NKRI baik langsung maupun tidak langsung akan menentukan eksistensi dan sekaligus potensi dari keberadaan Pangkalan TNI AL berada.

• **Rencana program pengembangan wilayah**

Salah satu indikasi konsep dari keberadaan suatu Pangkalan adalah adanya Rencana program pengembangan wilayah. Hal ini dimaksudkan bahwa eksistensi Pangkalan akan tetap terpelihara dan terjaga apabila Pangkalan tersebut senantiasa mampu mengimbangi setiap perubahan pada lingkungan strategis disekitarnya. Berdasarkan pada Tabel-15 di bawah ini dapat dilihat dimana tingkat interpretasi responden terhadap aspek program pengembangan wilayah kerja laut sebesar 3,03 atau cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 52,78% menyatakan jawaban 'kadang-kadang' , 19,44% menyatakan jawaban 'sering' dan 16,67% yang menyatakan 'tidak pernah', 5,56% yang menyatakan 'selalu' dan 5,56% menyatakan 'tidak tahu'. Berdasarkan penelusuran pada sejumlah responden dapat diketahui bahwa alasan 'ketidak tahuan' dan 'tidak pernah' terlibat dalam penyusunan program

pengembangan wilayah pangkalan disebabkan oleh perencanaan terpusat (Mabes TNI AL) pada bidang-bidang tertentu yang bersifat strategis dan rahasia.

Tabel – 15
Tanggapan Responden
Tentang Rencana Program Pengembangan Wilayah.

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	2	5,56	5	10	$M = \frac{109}{36} = 3,03$
Sering	7	19,44	4	28	
Kadang-Kadang	19	52,78	3	57	
Tidak Pernah	6	16,67	2	12	
Tidak Tahu	2	5,56	1	2	
Jumlah	36	100		109	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

- **Perencanaan anggaran**

Eksistensi pangkalan bila dilihat dari perencanaan anggaran dapat dilihat pada Tabel-16 di bawah ini dimana tingkat interpretasi responden hanya tercapai pada angka 2,67 atau cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 38,89% menyatakan jawaban 'tidak pernah', 30,56% menyatakan jawaban 'kadang-kadang', 22,22% yang menyatakan 'sering' dan 8,33% yang menyatakan 'tidak tahu'. Berdasarkan penyusuran pada responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak tahu' sebesar 8,33% dan alasan 'tidak pernah' sebesar 30,56% tersebut disebabkan oleh adanya faktor intervensi pusat (Mabes TNI AL) dalam perencanaan anggaran dan faktor keberadaan Pangkalan TNI AL rata-rata berada pada titik-titik tertentu yang cukup jauh dari pusat kota dan cukup potensial untuk kepentingan pada dukungan pertahanan wilayah kerja laut.

Tabel – 16
Tanggapan Responden Tentang Perencanaan Anggaran

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	-	-	5	-	96
Sering	8	22,22	4	32	$M = \frac{36}{96}$
Kadang-Kadang	11	30,56	3	33	36
Tidak Pernah	14	38,89	2	28	
Tidak Tahu	3	8,33	1	3	= 2,67
Jumlah	36	100		96	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

- **Pengembangan partisipasi masyarakat**

Pangkalan sebagai bagian dari wilayah dari suatu daerah maka aspek eksistensinya terhadap masyarakat sekitar akan menjadi penting. Oleh karena itu konsepsi pengembangan potensi pangkalan dengan melibatkan segenap potensi pihak-pihak lain yang terkait merupakan salah satu identitas yang perlu diketahui. Berdasarkan pada Tabel-17 di bawah ini dapat diketahui bahwa tingkat interpretasi responden adalah 4,19 atau Baik. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 41,67% menyatakan jawaban 'sering' , 38,89% menyatakan jawaban 'selalu' dan 19,44% yang menyatakan 'kadang-kadang'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'kadang-kadang' sebesar 19,44% tersebut disebabkan oleh adanya beberapa hal yang menyangkut aspek kerahasiaan dari suatu program.

Tabel – 17
Tanggapan Responden
Tentang Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	14	38,89	5	70	$M = \frac{151}{36} = 4,19$
Sering	15	41,67	4	60	
Kadang-Kadang	7	19,44	3	21	
Tidak Pernah	-	-	2	-	
Tidak Tahu	-	-	1	-	
Jumlah	36	100		151	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

- **Program pola kemitraan**

Demikian pula dengan konsep program pola kemitraan dengan pihak-pihak terkait ternyata tingkat interpretasi responden adalah sebesar 3,56 atau Baik. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 58,33 % menyatakan jawaban 'kadang-kadang', 27,78 % menyatakan jawaban 'sering' dan 13,89 % yang menyatakan 'selalu' (Tabel-18). Berdasarkan penyusuran pada responden dapat diketahui bahwa alasan 'kadang-kadang' sebesar 58,33 % tersebut disebabkan oleh posisi pangkalan yang cukup jauh dari pusat kota atau pemerintahan dan juga menyangkut aspek kerahasiaan.

Tabel – 18
Tanggapan Responden Tentang Program Pola Kemitraan

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	5	13,89	5	25	$M = \frac{128}{36} = 3,56$
Sering	10	27,78	4	40	
Kadang-Kadang	21	58,33	3	63	
Tidak Pernah	-	-	2		
Tidak Tahu	-	-	1		
Jumlah	36	100		128	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

- **Produk unggulan**

Pada sisi lain dapat dikemukakan bahwa eksistensi sebuah pangkalan seyogyanya memberikan kontribusi pada masyarakat lingkungan sekitar. Berdasarkan pada Tabel-19 di bawah ini dapat diketahui bahwa tingkat interpretasi responden terhadap masalah ini adalah 2,92 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 36,11% menyatakan jawaban 'kadang-kadang', 27,78% menyatakan jawaban 'sering', 25,00% menyatakan 'tidak pernah', 8,33% menyatakan 'tidak tahu' dan 2,78% yang menyatakan 'selalu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 25,00% dan alasan 'tidak tahu' sebesar 8,33% tersebut disebabkan oleh adanya responden yang baru menjabat sebagai Komandan dan juga intervensi aparat keamanan lain seperti Koramil/Kodim dan Polsek/Polres yang cukup kuat membina wilayah territorial wilayah sekitarnya. Sedangkan para nelayan yang menikmati rasa aman dari adanya keberadaan Pangkalan TNI AL yang ada di sekitar lingkungan wilayah Pangkalan TNI AL relatif sangat sedikit.

Tabel – 19
Tanggapan Responden Tentang Produk Unggulan

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	1	2,78	5	5	$M = \frac{105}{36} = 2,92$
Sering	10	27,78	4	40	
Kadang-Kadang	13	36,11	3	39	
Tidak Pernah	9	25,00	2	18	
Tidak Tahu	3	8,33	1	3	
Jumlah	36	100		105	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

- **Kebijakan Yang Bersifat Antisipatif**

Konsep perencanaan pengembangan suatu pangkalan seyogyanya mendapat perhatian dari berbagai pihak termasuk pusat (Mabes TNI AL) terutama yang bersifat kebijakan antisipatif. Hal ini dimaksudkan bahwa konsep pengembangan Pangkalan sesuai dengan lingkungan strategis sudah menjadi perhatian para pemegang kebijakan. Pada Tabel-20 dapat diketahui bahwa tingkat interpretasi responden terhadap masalah ini adalah 3,61 atau Baik. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 47,22% menyatakan jawaban 'sering', 41,67% menyatakan jawaban 'kadang-kadang', 8,33 menyatakan selalu' dan 2,78% menyatakan 'tidak pernah'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 2,78% tersebut disebabkan oleh adanya responden yang baru menjabat sebagai Komandan Pangkalan, sehingga tidak tahu perkembangan kebijakan antisipatif ke depan.

Tabel – 20
Tanggapan Responden Tentang Kebijakan Yang Bersifat Antisipatif

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	3	8,33	5	15	M = $\frac{130}{36}$
Sering	17	47,22	4	68	
Kadang-Kadang	15	41,67	3	45	
Tidak Pernah	1	2,78	2	2	
Tidak Tahu	-	-	1	-	= 3,61
Jumlah	36	100		130	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

- **Competence ($X_{2.2}$)**

Aspek kemampuan (Competence) merupakan salah satu aspek yang sangat dibutuhkan oleh organisasi agar tetap senantiasa eksis dan tetap

berkembang. Oleh karenanya competence merupakan potensi yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi yang dalam hal ini Pangkalan TNI AL.

- **Kemampuan administrative**

Kemampuan administrative dapat penulis indentifikasikan sebagai salah satu faktor yang dapat mendukung pada aspek kemampuan atau potensi Pangkalan. Pada Tabel-21 di bawah ini dapat dilihat bahwa tingkat interpretasi responden terhadap masalah ini adalah sebesar 3,80 atau Baik. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 41,67% menyatakan jawaban 'sering', 38,89% menyatakan jawaban 'kadang-kadang' dan 19,44% menyatakan 'selalu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'kadang-kadang' sebesar 38,89% tersebut disebabkan oleh adanya personel PNS yang juga mengawaki Pangkalan TNI AL yang kurang responsive dalam menerima pendidikan dan pelatihan. Selain itu juga tingkat pergeseran personel atau mutasi personel TNI AL yang kerap kali terjadi sehingga personel yang baru cenderung belum mampu optimal mendukung aktivitas kerja administratif.

Tabel – 21
Tanggapan Responden Tentang Kemampuan Administratif

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	7	19,44	5	35	M = $\frac{137}{36}$
Sering	15	41,67	4	60	
Kadang-Kadang	14	38,89	3	42	
Tidak Pernah	-	-	2	-	
Tidak Tahu	-	-	1	-	= 3,80
Jumlah	36	100		137	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

- **Kemampuan Pusat.**

Dalam upaya mengembangkan Pangkalan TNI AL dibutuhkan kemampuan dari Pusat (Mabesal) baik dalam perencanaan maupun penganggaran. Hal ini dimaksudkan bahwa Pangkalan TNI AL akan menjadi potensial apabila memang mendapat dukungan yang optimal dari Pusat (Mabesal). Pada Tabel-22 di bawah ini dapat dilihat bahwa tingkat interpretasi responden terhadap masalah ini adalah 2,75 atau Baik. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 47,22% menyatakan jawaban 'kadang-kadang', 36,11% menyatakan jawaban 'tidak pernah', 11,11% menyatakan 'sering', 2,78% menyatakan 'selalu' dan menyatakan 'tidak tahu' 2,78%. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 36,11% dan 2,78% menyatakan 'tidak tahu' tersebut disebabkan oleh banyaknya kebijakan-kebijakan yang kurang aspiratif, sehingga responden menjadi apatis dan kurang peduli kepada program-program yang berasal dari Pusat.

Tabel – 22
Tanggapan Responden Tentang Kemampuan Pemerintah.

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	1	2,78	5	5	M = $\frac{99}{36}$ = 2,75
Sering	4	11,11	4	16	
Kadang-Kadang	17	47,22	3	51	
Tidak Pernah	13	36,11	2	26	
Tidak Tahu	1	2,78	1	1	
Jumlah	36	100		99	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

- **Kemampuan menterjemahkan kebijakan**

Kebijakan yang responsive pada dasarnya akan mudah diimplementasikan. Oleh karenanya tingkat responsivitas Pusat (Mabesal) dalam

mengakses setiap usulan atau aspirasi dari unit-unit atau Pangkalan TNI AL. Demikian pula sebaliknya kebijakan-kebijakan Pusat (Mabes TNI AL) terutama yang bersifat perintah atau instruksi sudah seyogyanya harus mampu diterjemahkan dengan cepat dan tepat. Pada Tabel-23 di bawah ini tingkat interpretasi responden dalam masalah ini sebesar 3,67 atau Baik. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 38,89% menyatakan 'sering', 30,56% menyatakan 'kadang-kadang', 19,44% menyatakan 'selalu' dan 11,11% menyatakan 'tidak pernah'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 11,11% tersebut disebabkan oleh banyaknya kebijakan-kebijakan yang kurang aspiratif, sehingga responden menjadi apatis dan kurang peduli kepada program-program yang berasal dari Pusat (Mabes TNI AL).

Tabel – 23
Tanggapan Responden Tentang Kemampuan Menterjemahkan Kebijakan

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	7	19,44	5	35	M = $\frac{132}{36}$ = 3,67
Sering	14	38,89	4	56	
Kadang-Kadang	11	30,56	3	33	
Tidak Pernah	4	11,11	2	8	
Tidak Tahu	-	-	1	-	
Jumlah	36	100		132	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

- **Tingkat pendidikan memadai**

Aspek kemampuan juga dapat ditenggerai oleh adanya tingkat pendidikan yang memadai. Pada Tabel-24 di bawah ini dapat dilihat bahwa tingkat interpretasi responden dalam masalah ini adalah 3,47 atau Baik. Hasil tersebut

didasarkan pada pendapat responden, dimana 44,44% menyatakan 'kadang-kadang', 22,22% menyatakan 'selalu', 19,44% menyatakan 'sering', 11,11% menyatakan 'tidak pernah' dan 2,78% menyatakan 'Tidak Tahu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 11,11% tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain bahwa di dalam organisasi Pangkalan banyak di isi oleh PNS yang rata-rata kurang mendapatkan pendidikan yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi operasi sebagai Pangkalan TNI AL. Selain itu juga ada responden yang memberikan tanggapan 'tidak tahu' sebesar 2,78% hal itu disebabkan bahwa jabatan Komandan Pangkalan yang ia pegang baru tahu bagaimana potensi dari Pangkalan yang ia pimpin.

Tabel – 24
Tanggapan Responden Tentang Tingkat Pendidikan Memadai

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	8	22,22	5	40	M = $\frac{125}{36}$ = 3,47
Sering	7	19,44	4	28	
Kadang-Kadang	16	44,44	3	48	
Tidak Pernah	4	11,11	2	8	
Tidak Tahu	1	2,78	1	1	
Jumlah	36	100		125	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

- **Kemampuan dalam pelayanan**

Kompetensi juga dapat dilihat dari kemampuan dalam memberikan pelayanan publik yang cukup memadai. Pada Tabel-25 di bawah ini dapat dilihat bahwa terhadap masalah ini tingkat interpretasi responden sebesar 3,61 atau Baik. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 38,89% menyatakan 'kadang-kadang', 27,78% menyatakan 'selalu', 19,44% menyatakan 'sering' dan

13,89% menyatakan 'tidak pernah'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 19,44% tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain bahwa memang bahwa organisasi Pangkalan TNI AL memiliki tugas pokok yang berbeda dengan organisasi seperti Polisi atau Kodim yang cenderung memiliki tugas pokok melayani masyarakat, sedangkan organisasi Pangkalan banyak memberikan pelayanan hanya kepada dukungan KRI atau Muspida yang berkaitan dengan dukungan strategis bersifat ke-kamla-an.

Tabel – 25
Tanggapan Responden Tentang Kemampuan Dalam Pelayanan

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	10	27,78	5	50	M = $\frac{130}{36}$ = 3,61
Sering	7	19,44	4	28	
Kadang-Kadang	14	38,89	3	42	
Tidak Pernah	5	13,89	2	10	
Tidak Tahu	-	-	1	-	
Jumlah	36	100		130	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

- ***Conection (networking) (X₂₋₃)***

Dalam era 'border world' (dunia tanpa batas) bahwa kemampuan melakukan hubungan dengan lingkungannya merupakan salah satu indikator dari sebuah potensi yang dimilikinya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kemampuan dalam berhubungan (conection) maka semakin meningkat potensi yang dimilikinya. Demikian pula dalam penelitian ini bahwa pangkalan yang memiliki kemampuan berhubungan komunikasi dengan lingkungan sekitarnya maka semakin tinggi potensi pangkalan tersebut.

- **Hubungan dengan Instansi Yang Terkait.**

Pada Tabel-26 di bawah ini dapat terlihat bahwa tingkat interpretasi responden pada masalah ini adalah sebesar 3,22 atau cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 44,44% menyatakan 'kadang-kadang', 27,78% menyatakan 'sering', 16,67% menyatakan 'tidak pernah', 8,33% menyatakan 'selalu' dan 2,78% menyatakan 'tidak tahu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 8,33% tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain bahwa memang bahwa posisi dan lokasi Pangkalan TNI AL yang cukup jauh dari pusat pemerintahan daerah dan tidak ada permasalahan yang harus dibahas dengan instansi lainnya. Sedangkan alasan 2,78% menyatakan 'tidak tahu' disebabkan karena responden baru menduduki jabatannya, sehingga belum memahami permasalahan dari jabatan yang dipegangnya.

Tabel – 26
Tanggapan Responden Tentang Hubungan Dengan Instansi Yang Terkait

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	3	8,33	5	15	M = $\frac{116}{36}$ = 3,22
Sering	10	27,78	4	40	
Kadang-Kadang	16	44,44	3	48	
Tidak Pernah	6	16,67	2	12	
Tidak Tahu	1	2,78	1	1	
Jumlah	36	100		116	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

- **Hubungan dengan pihak masyarakat.**

Pada Tabel-27 di bawah ini dapat diketahui bahwa tingkat interpretasi responden terhadap masalah ini adalah 3,42 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 27,78% menyatakan 'kadang-

kadang', 25% menyatakan sering, 22,22% menyatakan 'selalu', 22,22% menyatakan 'tidak pernah' dan 2,78% menyatakan 'tidak tahu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 22,22% tersebut disebabkan karena memang belum pernah ada program yang melibatkan masyarakat dalam pencapaiannya. Sedangkan menyatakan 'tidak tahu' sebesar 2,78% disebabkan responden sebagai pejabat baru.

Tabel – 27
Tanggapan Responden Tentang Hubungan Dengan Pihak Swasta

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	8	22,22	5	40	M = $\frac{123}{36}$ = 3,42
Sering	9	25	4	36	
Kadang-Kadang	10	27,78	3	30	
Tidak Pernah	8	22,22	2	16	
Tidak Tahu	1	2,78	1	1	
Jumlah	36	100		123	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

- **Hubungan dengan Pemerintah Daerah**

Pada Tabel-28 di bawah ini dapat diketahui bahwa tingkat interpretasi responden terhadap masalah ini adalah 3,36 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 30,56% menyatakan 'kadang-kadang', 25% menyatakan 'sering', 22,22% menyatakan 'tidak pernah', 19,45% menyatakan 'selalu' dan 2,78% menyatakan 'tidak tahu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 22,22% tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain bahwa Pemerintah Daerah setempat tidak pernah mengundangnya dan memang pangkalan TNI AL yang ada hanya bersifat Detasemen Markas (Tidak ada laut).

Sedangkan 5,56% menyatakan 'tidak tahu' disebabkan responden baru menjabat sebagai Komandan pangkalan.

Tabel – 28
Tanggapan Responden
Tentang Hubungan Dengan Pemerintah Daerah (Pemda)

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	7	19,45	5	35	M = $\frac{121}{36}$ = 3,36
Sering	9	25,00	4	36	
Kadang-Kadang	11	30,56	3	33	
Tidak Pernah	8	22,22	2	16	
Tidak Tahu	1	2,78	1	1	
Jumlah	36	100		121	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Berdasarkan rekapitulasi dari Tabel-15 sampai dengan Tabel-28 maka dapat diketahui aspek Potensi Pangkalan memiliki rata-rata tingkat interpretasi sebesar 3,14 atau Cukup (Tabel-29) :

Tabel – 29
Rekapitulasi Tanggapan Responden Aspek *Conection*

Alternatif Jawaban	Kriteria
Tabel-15	3,03
Tabel-16	2,67
Tabel-17	4,19
Tabel-18	3,56
Tabel-19	2,92
Tabel-20	3,61
Tabel-21	3,80
Tabel-22	2,75
Tabel-23	3,67
Tabel-24	3,47
Tabel-25	3,61
Tabel-26	3,22
Tabel-27	3,42
Tabel-28	3,36
Nilai Rata-rata	3,14 atau Cukup

3. Aspek Keberhasilan Fungsi Operasi (Y).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap aspek Keberhasilan Fungsi Operasi (Y) secara deskriptif analisis dapat digambarkan melalui indikasi-indikasi sebagai berikut :

- **Relatif tidak ada hambatan dalam penyelenggaraan fungsi operasi (Y₁)**
 - **Penggunaan Kekuatan TNI AL.**

Pada Tabel-30 di bawah ini dapat diketahui tingkat interpretasi responden dalam hal penggunaan kekuatan berupa kemampuan intelmar dalam operasi *penyelidikan* bidang maritime adalah sebesar 3,25 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 47,22% menyatakan 'kadang-kadang', 33,33% menyatakan 'sering', 8,33% menyatakan 'tidak pernah', 5,56% menyatakan 'selalu' dan 5,56% menyatakan 'tidak tahu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 8,33 % tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain bahwa sebagai Komandan Denal tidak pernah menggunakan fungsi intelmar dan yang ada hanya bersifat dukungan pada Detasemen Markas (tidak ada laut). Sedangkan 5,56% menyatakan 'tidak tahu' disebabkan responden baru menjabat sebagai Komandan pangkalan.

Tabel – 30
Tanggapan Responden
Tentang Hambatan Dalam Operasi Penyelidikan Bidang Maritim

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	2	5,56	5	10	$M = \frac{117}{36} = 3,25$
Sering	12	33,33	4	48	
Kadang-Kadang	17	47,22	3	51	
Tidak Pernah	3	8,33	2	6	
Tidak Tahu	2	5,56	1	2	
Jumlah	36	100		117	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-31 di bawah ini dapat diketahui tingkat interpretasi responden dalam hal penggunaan kekuatan berupa kemampuan intelmar dalam operasi *pengamanan* bidang maritime adalah sebesar 2,89 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 44,44% menyatakan 'kadang-kadang', 27,78% menyatakan 'tidak pernah', 5,56% menyatakan 'selalu', 5,56% menyatakan 'tidak tahu' dan 2,78% menyatakan 'sering'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 27,78 % tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain bahwa sebagai Komandan Denal tidak pernah menggunakan fungsi intelmar dan yang ada hanya bersifat dukungan pada Detasemen Markas (Tidak ada laut). Sedangkan 5,56% menyatakan 'tidak tahu' disebabkan responden baru menjabat sebagai Komandan pangkalan.

Tabel – 31
Tanggapan Responden
Tentang Hambatan Dalam Operasi Pengamanan Bidang Maritim

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	2	5,56	5	10	M = $\frac{104}{36}$ = 2,89
Sering	6	2,78	4	24	
Kadang-Kadang	16	44,44	3	48	
Tidak Pernah	10	27,78	2	20	
Tidak Tahu	2	5,56	1	2	
Jumlah	36	100		104	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-32 di bawah ini dapat diketahui tingkat interpretasi responden dalam hal penggunaan kekuatan berupa kemampuan intelmar dalam operasi *penggalangan* bidang maritime adalah sebesar 3,28 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 41,67% menyatakan 'kadang-kadang', 19,44% menyatakan 'sering', 19,44% menyatakan 'tidak pernah' ,

16,67% menyatakan 'selalu' dan 2,78% menyatakan 'tidak tahu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 19,44% tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain bahwa sebagai Komandan Denal tidak pernah menggunakan fungsi intelmar dan yang ada hanya bersifat dukungan pada Detasemen Markas (Tidak ada laut) serta tidak ada kebijakan yang khusus untuk dilakukan oleh Komandan Pangkalan yang berkaitan dengan fungsi tersebut. Sedangkan 2,78% menyatakan 'tidak tahu' disebabkan responden baru menjabat sebagai Komandan pangkalan.

Tabel – 32
Tanggapan Responden
Tentang Hambatan Dalam Operasi Penggalangan Bidang Maritim

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	6	16,67	5	30	M = $\frac{118}{36}$ = 3,28
Sering	7	19,44	4	28	
Kadang-Kadang	15	41,67	3	45	
Tidak Pernah	7	19,44	2	14	
Tidak Tahu	1	2,78	1	1	
Jumlah	36	100		118	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-33 di bawah ini diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam hal penggunaan kekuatan berupa kemampuan operasi pertahanan maritim adalah sebesar 3,03 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 41,67 % menyatakan 'kadang-kadang', 30,56 % menyatakan 'sering', 19,44% menyatakan 'tidak pernah', 5,56% menyatakan 'selalu' dan 2,78% menyatakan 'tidak tahu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 19,44 % tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain bahwa sebagai Komandan Denal tidak pernah menggunakan fungsi intelmar dan yang ada hanya bersifat

dukungan pada Detasemen Markas (Tidak ada laut) serta tidak ada kebijakan yang khusus untuk dilakukan oleh Komandan Pangkalan yang berkaitan dengan fungsi tersebut. Sedangkan 2,78% menyatakan 'tidak tahu' disebabkan responden baru menjabat sebagai Komandan pangkalan.

Tabel – 33
Tanggapan Responden
Tentang Hambatan Dalam Operasi Pertahanan Bidang Maritim

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	2	5,56	5	10	M = $\frac{114}{36}$ = 3,17
Sering	11	30,56	4	44	
Kadang-Kadang	15	41,67	3	45	
Tidak Pernah	7	19,44	2	14	
Tidak Tahu	1	2,78	1	1	
Jumlah	36	100		114	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-34 di bawah ini diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam hal penggunaan kekuatan berupa kemampuan operasi *keamanan* maritim adalah sebesar 3,17 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 47,22% menyatakan 'kadang-kadang', 19,44% menyatakan 'sering', 16,67% menyatakan 'tidak pernah', 8,33% menyatakan 'selalu' dan 8,33% menyatakan 'tidak tahu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 16,67% tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain bahwa sebagai Komandan Denal tidak pernah menggunakan fungsi intelmar dan yang ada hanya bersifat dukungan pada Detasemen Markas (Tidak ada laut) serta tidak ada kebijakan yang khusus untuk dilakukan oleh Komandan Pangkalan yang berkaitan dengan fungsi tersebut. Sedangkan 8,33% menyatakan 'tidak tahu' disebabkan responden baru menjabat sebagai Komandan pangkalan dan ada juga yang meyakini bahwa

tugas keamanan adalah tugas bersama dari berbagai pihak terkait seperti Polisi Air, Dephub, dll.

Tabel – 34
Tanggapan Responden
Tentang Hambatan Dalam Operasi Keamanan Maritim

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	3	8,33	5	15	M = $\frac{109}{36}$ = 3,03
Sering	7	19,44	4	28	
Kadang-Kadang	17	47,22	3	51	
Tidak Pernah	6	16,67	2	12	
Tidak Tahu	3	8,33	1	3	
Jumlah	36	100		109	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-35 di bawah ini diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam hal penggunaan kekuatan berupa kemampuan *dukungan operasi maritim* adalah sebesar 3,17 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 52,78% menyatakan 'kadang-kadang', 19,44% menyatakan 'sering', 19,44% menyatakan 'tidak pernah' dan 8,33% menyatakan 'selalu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 19,44% tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain bahwa sebagai Komandan Denal tidak pernah menggunakan fungsi intelmar dan yang ada hanya bersifat dukungan pada Detasemen Markas (Tidak ada laut) serta tidak ada kebijakan yang khusus untuk dilakukan oleh Komandan Pangkalan yang berkaitan dengan fungsi tersebut.

Tabel – 35
Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Dukungan Operasi

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	3	8,33	5	15	M = $\frac{114}{36}$ = 3,17
Sering	7	19,44	4	28	
Kadang-Kadang	19	52,78	3	57	
Tidak Pernah	7	19,44	2	14	
Tidak Tahu	-	-	1	-	
Jumlah	36	100		114	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-36 di bawah ini diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam hal penggunaan kekuatan berupa *latihan operasi matra* adalah sebesar 2,89 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 52,78% menyatakan 'kadang-kadang', 30,56% menyatakan 'tidak pernah', 13,89% menyatakan 'sering' dan 2,78% menyatakan 'selalu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 19,44% tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain bahwa sebagai Komandan Denal tidak pernah menggunakan fungsi intelmar dan yang ada hanya bersifat dukungan pada Detasemen Markas (Tidak ada laut) serta tidak ada kebijakan yang khusus untuk dilakukan oleh Komandan Pangkalan yang berkaitan dengan fungsi tersebut.

Tabel – 36
Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Operasi Matra

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	1	2,78	5	5	M = $\frac{104}{36}$ = 2,89
Sering	5	13,89	4	20	
Kadang-Kadang	19	52,78	3	57	
Tidak Pernah	11	30,56	2	22	
Tidak Tahu	-	-	1	-	
Jumlah	36	100		104	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-37 di bawah ini diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam hal penggunaan kekuatan berupa kemampuan *operasi pertahanan maritim* adalah sebesar 4,00 atau Baik. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 38,89% menyatakan 'sering', 30,56% menyatakan 'selalu' dan 30,56% menyatakan 'kadang-kadang'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'kadang-kadang' sebesar 30,56% tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain bahwa wilayah operasi Gabungan menentukan pangkalan mana saja yang terlibat atau dilibatkan.

Tabel – 37
Tanggapan Responden
Tentang Hambatan Dalam Latihan Operasi Gabungan

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	11	30,56	5	55	M = $\frac{144}{36}$ = 4
Sering	14	38,89	4	56	
Kadang-Kadang	11	30,56	3	33	
Tidak Pernah	-	-	2	-	
Tidak Tahu	-	-	1	-	
Jumlah	36	100		144	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-38 di bawah ini diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam hal penggunaan kekuatan berupa *latihan bersama dan meeting dengan Negara-negara sahabat* adalah sebesar 3,25 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 50,00% menyatakan 'kadang-kadang', 22,22% menyatakan 'sering', 13,89% menyatakan 'tidak pernah', 11,11% menyatakan 'selalu' dan 2,78% menyatakan 'tidak tahu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 19,44% tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain bahwa

responden memang tidak dilibatkan dalam masalah tersebut dan tidak ada kebijakan yang khusus untuk dilakukan oleh Komandan Pangkalan yang berkaitan dengan fungsi tersebut. Sedangkan 2,78% menyatakan 'tidak tahu' disebabkan responden baru menjabat sebagai Komandan pangkalan.

Tabel – 38
Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Latihan Bersama Dan Meeting Dengan Negara Sahabat

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	4	11,11	5	20	M = $\frac{117}{36}$ = 3,25
Sering	8	22,22	4	32	
Kadang-Kadang	18	50	3	54	
Tidak Pernah	5	13,89	2	10	
Tidak Tahu	1	2,78	1	1	
Jumlah	36	100		117	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-39 di bawah ini diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam hal penggunaan kekuatan berupa *penyelenggaraan operasi penyekatan di perairan* adalah sebesar 2,89 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 44,44% menyatakan 'kadang-kadang', 25% menyatakan 'tidak pernah', 13,89% menyatakan 'sering', 8,33% menyatakan 'selalu' dan 8,33% menyatakan 'tidak tahu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 25 % tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain bahwa responden memang tidak dilibatkan dalam masalah tersebut mengingat posisi dan lokasi operasi dan tidak ada kebijakan yang khusus untuk dilakukan oleh Komandan Pangkalan yang berkaitan dengan fungsi tersebut. Sedangkan 8,33 % menyatakan 'tidak tahu' disebabkan responden baru menjabat sebagai Komandan pangkalan dan tidak merasa ada kewajiban untuk melakukan pelibatan operasi.

Tabel – 39
Tanggapan Responden
Tentang Hambatan Dalam Operasi Penyekatan Di Perairan

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	3	8,33	5	15	M = $\frac{104}{36}$ = 2,89
Sering	5	13,89	4	20	
Kadang-Kadang	16	44,44	3	48	
Tidak Pernah	9	25	2	18	
Tidak Tahu	3	8,33	1	3	
Jumlah	36	100		104	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-40 di bawah ini diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam hal penggunaan kekuatan berupa *penyelenggaraan operasi pengamanan pantai* adalah sebesar 3,53 atau Baik. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 41,67% menyatakan 'kadang-kadang', 30,56% menyatakan 'sering', 16,67% menyatakan 'selalu' dan 11,11% menyatakan 'tidak pernah'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 11,11% tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain bahwa responden sebagai Komandan pangkalan yang bersifat Detasemen markas (Tidak ada Pantai) dan memang tidak ada kebijakan khusus yang berkaitan dengan fungsi tersebut.

Tabel – 40
Tanggapan Responden
Tentang Hambatan Dalam Operasi Pengamanan Pantai

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	6	16,67	5	30	M = $\frac{127}{36}$ = 3,53
Sering	11	30,56	4	44	
Kadang-Kadang	15	41,67	3	45	
Tidak Pernah	4	11,11	2	8	
Tidak Tahu	-	-	1	-	
Jumlah	36	100		127	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-41 di bawah ini diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam hal penggunaan kekuatan berupa *penyelenggaraan operasi di perairan* adalah sebesar 3,44 atau Baik. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 36,11% menyatakan 'kadang-kadang', 22,22% menyatakan 'selalu', 8,33% menyatakan 'tidak pernah' dan 8,33% menyatakan 'tidak tahu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 8,33% tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain bahwa responden memang tidak dilibatkan dalam masalah tersebut mengingat posisi dan lokasi operasi dan tidak ada kebijakan yang khusus untuk dilakukan oleh Komandan Pangkalan yang berkaitan dengan fungsi tersebut (Denal). Sedangkan 8,33 % menyatakan 'tidak tahu' disebabkan responden baru menjabat sebagai Komandan pangkalan dan tidak merasa ada kewajiban untuk melakukan dukungan pelibatan dalam operasi tersebut.

Tabel – 41
Tanggapan Responden
Tentang Hambatan Dalam Penyelenggaraan Operasi Di Perairan

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	8	22,22	5	40	M = $\frac{124}{36}$ = 3,44
Sering	9	25	4	36	
Kadang-Kadang	13	36,11	3	39	
Tidak Pernah	3	8,33	2	6	
Tidak Tahu	3	8,33	1	3	
Jumlah	36	100		124	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-42 di bawah ini diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam hal penggunaan kekuatan berupa *penyelenggaraan Operasi penanggulangan illegal fishing dan illegal logging serta melaksanakan operasi bantuan kemanusiaan dalam bentuk operasi Pasar Berjalan (Mobile Market) di*

pulau-pulau terluar/terpencil adalah sebesar 3,36 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 44,44% menyatakan 'kadang-kadang', 25% menyatakan 'sering', 16,67% menyatakan 'tidak pernah' dan 13,89% menyatakan 'selalu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 16,67% tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain bahwa responden memang tidak dilibatkan dalam masalah tersebut mengingat posisi dan lokasi operasi dan tidak ada kebijakan yang khusus untuk dilakukan oleh Komandan Pangkalan yang berkaitan dengan fungsi tersebut (Denal).

Tabel – 42
Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Penyelenggaraan Operasi Illegal Fishing Dan Illegal Logging Serta Bantuan Kemanusiaan

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	5	13,89	5	25	M = $\frac{121}{36}$ = 3,36
Sering	9	25	4	36	
Kadang-Kadang	16	44,44	3	48	
Tidak Pernah	6	16,67	2	12	
Tidak Tahu	-	-	1	-	
Jumlah	36	100		121	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-43 di bawah ini diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam hal penggunaan kekuatan berupa *penyelenggaraan operasi pengamanan di wilayah perbatasan* adalah sebesar 3,64 atau Baik. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 30,56% menyatakan 'kadang-kadang', 30,56% menyatakan 'selalu', 22,22% menyatakan 'sering', 13,89% menyatakan 'tidak pernah' dan 2,78% menyatakan 'tidak tahu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 13,89% tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain bahwa

responden memang tidak dilibatkan dalam masalah tersebut mengingat posisi dan lokasi operasi dan tidak ada kebijakan yang khusus untuk dilakukan oleh Komandan Pangkalan yang berkaitan dengan fungsi tersebut (Denal). Sedangkan 2,78% menyatakan 'tidak tahu' disebabkan responden baru menjabat sebagai Komandan pangkalan dan tidak merasa ada kewajiban untuk melakukan dukungan pelibatan dalam operasi tersebut.

Tabel – 43
Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Operasi Pengamanan
Di Wilayah Perbatasan

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	11	30,56	5	55	$M = \frac{131}{36}$ $= 3,64$
Sering	8	22,22	4	32	
Kadang-Kadang	11	30,56	3	33	
Tidak Pernah	5	13,89	2	10	
Tidak Tahu	1	2,78	1	1	
Jumlah	36	100		131	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-44 di bawah ini diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam hal penggunaan kekuatan berupa *penyelenggaraan operasi terhadap ancaman perompakan di laut, penyelundupan dan imigran gelap* adalah sebesar 3,31 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 41,67% menyatakan 'kadang-kadang', 30,56% menyatakan 'sering', 11,11% menyatakan 'selalu', 11,11% menyatakan 'tidak pernah' dan 5,56% menyatakan 'tidak tahu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 11,11% tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain bahwa responden memang tidak dilibatkan dalam masalah tersebut mengingat posisi dan lokasi operasi dan tidak ada kebijakan yang khusus untuk dilakukan oleh Komandan Pangkalan yang berkaitan dengan

fungsi tersebut (Denal). Sedangkan 5,56% menyatakan 'tidak tahu' disebabkan responden baru menjabat sebagai Komandan pangkalan dan tidak merasa ada kewajiban untuk melakukan dukungan pelibatan dalam operasi tersebut.

Tabel – 44
Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Operasi Penanggulangan Perompakan Di laut, Penyelundupan Dan Imigran Gelap

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	4	11,11	5	20	M = $\frac{119}{36}$ = 3,31
Sering	11	30,56	4	44	
Kadang-Kadang	15	41,67	3	45	
Tidak Pernah	4	11,11	2	8	
Tidak Tahu	2	5,56	1	2	
Jumlah	36	100		119	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-45 di bawah ini diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam hal penggunaan kekuatan berupa *berupa penyelenggaraan operasi pengamanan ALKI* adalah sebesar 3,58 atau Baik. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 44,44% menyatakan 'kadang-kadang', 36,11% menyatakan 'sering', 13,89% menyatakan 'selalu' dan 5,56% menyatakan 'tidak pernah'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 5,56% tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain bahwa responden memang tidak dilibatkan dalam masalah tersebut mengingat posisi dan lokasi pangkalan tidak pada posisi ALKI dan tidak ada kebijakan yang khusus untuk dilakukan oleh Komandan Pangkalan yang berkaitan dengan fungsi tersebut (Denal).

Tabel – 45
Tanggapan Responden
Tentang Hambatan Dalam Operasi Pengamanan ALKI

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	5	13,89	5	25	$M = \frac{129}{36} = 3,58$
Sering	13	36,11	4	52	
Kadang-Kadang	16	44,44	3	48	
Tidak Pernah	2	5,56	2	4	
Tidak Tahu	-	-	1	-	
Jumlah	36	100		129	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-46 di bawah ini diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam hal penggunaan kekuatan berupa *penyelenggaraan operasi Kamla* adalah sebesar 3,06 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 47,22% menyatakan 'kadang-kadang', 19,44% menyatakan 'sering', 19,44% menyatakan 'tidak pernah', 8,33% menyatakan 'selalu' dan 5,56% menyatakan 'tidak tahu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 19,44% tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain bahwa responden memang tidak dilibatkan dalam masalah tersebut mengingat posisi dan lokasi operasi dan tidak ada kebijakan yang khusus untuk dilakukan oleh Komandan Pangkalan yang berkaitan dengan fungsi tersebut (Denal). Sedangkan 5,56% menyatakan 'tidak tahu' disebabkan responden baru menjabat sebagai Komandan pangkalan dan tidak merasa ada kewajiban untuk melakukan dukungan pelibatan dalam operasi tersebut.

Tabel – 46
Tanggapan Responden
Tentang Hambatan Dalam Penyelenggaraan Operasi Kamla

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	3	8,33	5	15	$M = \frac{110}{36} = 3,06$
Sering	7	19,44	4	28	
Kadang-Kadang	17	47,22	3	51	
Tidak Pernah	7	19,44	2	14	
Tidak Tahu	2	5,56	1	2	
Jumlah	36	100		110	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-47 di bawah ini diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam hal penggunaan kekuatan berupa *penyelenggaraan operasi penanggulangan Bencana Alam* adalah sebesar 3,56 atau Baik. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 47,22% menyatakan 'kadang-kadang', 25% menyatakan 'sering', 19,44% menyatakan 'selalu' dan 8,33% menyatakan 'tidak pernah'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 8,33% tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain karena memang belum pernah ada bencana alam yang mendorong Pangkalan TNI AL untuk terjun operasi.

Tabel – 47
Tanggapan Responden
Tentang Hambatan Dalam Operasi Penanggulangan Bencana Alam

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	7	19,44	5	35	$M = \frac{128}{36} = 3,56$
Sering	9	25	4	36	
Kadang-Kadang	17	47,22	3	51	
Tidak Pernah	3	8,33	2	6	
Tidak Tahu	-	-	1	-	
Jumlah	36	100		128	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-48 di bawah ini diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam hal penggunaan kekuatan berupa *penyelenggaraan operasi muhibah* adalah sebesar 3,25 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 52,78% menyatakan 'kadang-kadang', 19,44% menyatakan 'sering', 16,67% menyatakan 'tidak pernah' dan 11,11% menyatakan 'selalu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 16,67% tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain bahwa responden memang tidak dilibatkan dalam masalah tersebut.

Tabel – 48
Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Operasi Muhibah

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	4	11,11	5	20	M = $\frac{117}{36}$ = 3,25
Sering	7	19,44	4	28	
Kadang-Kadang	19	52,78	3	57	
Tidak Pernah	6	16,67	2	12	
Tidak Tahu	-	-	1	-	
Jumlah	36	100		117	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

- **Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut**

Pada Tabel-49 di bawah ini diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam hal pemberdayaan wilayah pertahanan laut berupa *upaya mewujudkan lingkungan maritim yang kondusif dalam mendukung tugas pokok pangkalan* adalah sebesar 3,28 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 55,56% menyatakan 'kadang-kadang', 19,44% menyatakan 'sering' dan 13,89% menyatakan 'tidak pernah' dan 11,11% menyatakan 'selalu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat

diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 13,89% tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain bahwa responden memang tidak dilibatkan dalam masalah tersebut mengingat posisi dan lokasi operasi dan tidak ada kebijakan yang khusus untuk dilakukan oleh Komandan Pangkalan yang berkaitan dengan fungsi tersebut (Denal).

Tabel – 49
Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Operasi Pemberdayaan Lingkungan Maritim

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	4	11,11	5	20	M = $\frac{118}{36}$ = 3,28
Sering	7	19,44	4	28	
Kadang-Kadang	20	55,56	3	60	
Tidak Pernah	5	13,89	2	10	
Tidak Tahu	-	-	1	-	
Jumlah	36	100		118	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-50 di bawah ini diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam hal pemberdayaan wilayah pertahanan laut berupa upaya memberikan pertimbangan dan perbantuan kepada pemerintah dalam penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung adalah sebesar 3,64 atau Baik. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 33,33% menyatakan 'sering', 33,33% menyatakan 'kadang-kadang', 22,22% menyatakan 'selalu' dan 8,33% menyatakan 'tidak pernah' dan 2,78 % menyatakan 'tidak tahu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 8,33% tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain bahwa responden memang tidak dilibatkan (tidak ada perintah) dalam masalah tersebut. Sedangkan 2,78 % menyatakan 'tidak tahu' disebabkan karena responden sebagai pejabat baru dalam Pangkalan tersebut.

Tabel – 50
Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Operasi Pemberdayaan
Komponen Cadangan

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	8	22,22	5	40	M = $\frac{131}{36}$ = 3,64
Sering	12	33,33	4	48	
Kadang-Kadang	12	33,33	3	36	
Tidak Pernah	3	8,33	2	6	
Tidak Tahu	1	2,78	1	1	
Jumlah	36	100		131	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

- **Penegakkan Hukum**

Pada Tabel-51 di bawah ini diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam hal penegakkan hukum *berupa upaya meningkatkan Gakkum dan Gaklat* adalah sebesar 3,39 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 52,78% menyatakan 'kadang-kadang', 22,22% menyatakan 'sering', 13,89% menyatakan 'selalu, dan 11,11% menyatakan 'tidak pernah'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 11,11% tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain bahwa responden memang tidak dilibatkan mengingat posisi dan lokasi serta fungsi dari pangkalan tersebut.

Tabel – 51
Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Operasi Peningkatan
Gakkum Dan Gaklat Di Laut

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	5	13,89	5	25	M = $\frac{122}{36}$ = 3,39
Sering	8	22,22	4	32	
Kadang-Kadang	19	52,78	3	57	
Tidak Pernah	4	11,11	2	8	
Tidak Tahu	-	-	1	-	
Jumlah	36	100		122	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-52 di bawah ini diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam hal penegakkan hukum *berupa upaya meningkatkan koordinasi instansi Kamla dengan pihak terkait* adalah sebesar 3,06 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 55,56% menyatakan 'kadang-kadang', 22,22% menyatakan 'sering', 11,11% menyatakan 'tidak tahu', 5,56% menyatakan 'selalu' dan 5,56% menyatakan 'tidak pernah'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak tahu' sebesar 11,11% tersebut disebabkan oleh responden tidak tahu akan adanya tugas tersebut. Sedangkan pernyataan 'tidak pernah' karena responden memang tidak dilibatkan mengingat posisi dan lokasi serta fungsi dari pangkalan tersebut serta responden beranggapan belum ada permasalahan yang dianggap penting

Tabel – 52
Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Koordinasi Instansi Kamla Dengan Pihak Terkait

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	2	5,56	5	10	M = $\frac{110}{36}$ = 3,06
Sering	8	22,22	4	32	
Kadang-Kadang	20	55,56	3	60	
Tidak Pernah	2	5,56	2	4	
Tidak Tahu	4	11,11	1	4	
Jumlah	36	100		110	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-53 di bawah ini diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam hal penegakkan hukum *berupa upaya memaksimalkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait* adalah sebesar 3,56 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 41,67% menyatakan 'kadang-kadang', 30,56% menyatakan 'sering', 19,44% menyatakan 'selalu', 5,56% menyatakan 'tidak tahu' dan 2,78% menyatakan 'tidak pernah'.

Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak tahu' sebesar 5,56% tersebut disebabkan oleh karena responden memang tidak tahu akan kewajiban tersebut. Sedangkan 2,78% tidak pernah karena tidak kebijakan atau perintah untuk tugas tersebut.

Tabel – 53
Tanggapan Responden
Tentang Hambatan Dalam Upaya Memaksimalkan Kerjasama

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	7	19,44	5	35	$M = \frac{128}{36} = 3,56$
Sering	11	30,56	4	44	
Kadang-Kadang	15	41,67	3	45	
Tidak Pernah	1	2,78	2	2	
Tidak Tahu	2	5,56	1	2	
Jumlah	36	100		128	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-54 di bawah ini diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam hal penegakkan hukum *berupa upaya memberikan bantuan hukum* adalah sebesar 3,31 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 41,67% menyatakan 'kadang-kadang', 30,56% menyatakan 'sering', 11,11% menyatakan 'selalu, dan 11,11% menyatakan 'tidak pernah' dan 5,56% menyatakan 'tidak tahu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 11,11 % tersebut disebabkan oleh tidak adanya Perwira Hukum yang dapat diandalkan untuk tugas tersebut. Sedangkan 5,56% menyatakan 'tidak tahu' disebabkan karena memang tidak tahu akan adanya tugas dalam fungsi tersebut.

Tabel – 54
Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Upaya
Memberikan Bantuan Hukum

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	4	11,11	5	20	$M = \frac{119}{36}$ $= 3,31$
Sering	11	30,56	4	44	
Kadang-Kadang	15	41,67	3	45	
Tidak Pernah	4	11,11	2	8	
Tidak Tahu	2	5,56	1	2	
Jumlah	36	100		119	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Tabel – 55
Rekapitulasi Tanggapan Responden Keberhasilan Fungsi Operasi Pada
Aspek Kelancaran Penyelenggaraan Fungsi Operasi

Alternatif Jawaban	Kriteria
Tabel-30	3,25
Tabel-31	2,89
Tabel-32	3,28
Tabel-33	3,17
Tabel-34	3,03
Tabel-35	3,17
Tabel-36	2,89
Tabel-37	4,00
Tabel-38	3,25
Tabel-39	2,89
Tabel-40	3,53
Tabel-41	3,44
Tabel-42	3,36
Tabel-43	3,64
Tabel-44	3,31
Tabel-45	3,58
Tabel-46	3,06
Tabel-47	3,56
Tabel-48	3,25
Tabel-49	3,28
Tabel-50	3,64
Tabel-51	3,39
Tabel-52	3,06
Tabel-53	3,56
Tabel-54	3,31
Nilai Rata-rata	3,45 atau Baik

Dari Tabel-55 diatas, diketahui bahwa rata-rata interpretasi responden dari variabel Keberhasilan Fungsi Operasi Pada Aspek Kelancaran Dalam Penyelenggaraan Fungsi Operasi adalah sebesar 3,45 atau Baik.

- ***Penyelenggaraan fungsi operasi berjalan efektif dan efisien (Y₂).***

• **Penggunaan Kekuatan TNI AL.**

Pada Tabel-56 di bawah ini dapat diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam hal penggunaan kekuatan TNI AL berupa kemampuan operasi *penyelidikan* bidang maritime dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan adalah sebesar 2,97 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 36,11% menyatakan 'kadang-kadang', 25,00% menyatakan 'sering', 16,67% menyatakan 'tidak pernah', 5,56% menyatakan 'selalu, dan 5,56% menyatakan 'tidak tahu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 16,67% tersebut disebabkan oleh adanya akumulasi biaya yang cukup mahal dan capaian waktu melebihi target yang ditentukan dalam operasi tersebut. Sedangkan 5,56% menyatakan 'tidak tahu' disebabkan karena memang tidak tahu akan adanya tugas dalam fungsi tersebut.

Tabel – 56
Tanggapan Responden
Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Operasi Penyelidikan Bidang Maritim

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	2	5,56	5	10	M = $\frac{107}{36}$ = 2,97
Sering	8	25	4	32	
Kadang-Kadang	17	36,11	3	51	
Tidak Pernah	5	16,67	2	10	
Tidak Tahu	4	5,56	1	4	
Jumlah	36	100		107	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-57 di bawah ini dapat diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam penggunaan kemampuan intelmar berupa kemampuan operasi *pengamanan* bidang maritime dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan adalah sebesar 3,31 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 36,11% menyatakan 'kadang-kadang', 25% menyatakan 'sering', 16,67% menyatakan 'selalu', 16,67% menyatakan 'tidak pernah', 5,56% menyatakan 'selalu, dan 5,56% menyatakan 'tidak tahu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 16,67% tersebut disebabkan oleh adanya akumulasi biaya yang cukup mahal dan capaian waktu yang relatif melebihi target yang ditentukan dalam operasi tersebut. Sedangkan 5,56% menyatakan 'tidak tahu' disebabkan karena memang tidak tahu akan adanya tugas dalam fungsi tersebut.

Tabel – 57
Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Operasi
Pengamanan Bidang Maritim

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	6	16,67	5	30	M = $\frac{119}{36}$ = 3,31
Sering	9	25	4	36	
Kadang-Kadang	13	36,11	3	39	
Tidak Pernah	6	16,67	2	12	
Tidak Tahu	2	5,56	1	2	
Jumlah	36	100		119	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-58 di bawah ini dapat diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam penggunaan kemampuan intelmar berupa kemampuan operasi *penggalangan* bidang maritime dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan adalah sebesar 3,06 atau Cukup.

Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 47,22% menyatakan 'kadang-kadang', 25% menyatakan 'sering', 13,89% menyatakan 'tidak pernah', 8,33% menyatakan 'tidak tahu' dan 5,56% menyatakan 'selalu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 16,67% tersebut disebabkan oleh adanya akumulasi biaya yang cukup mahal dan capaian waktu yang relatif melebihi target yang ditentukan dalam operasi tersebut. Sedangkan 5,56% menyatakan 'tidak tahu' disebabkan karena memang tidak tahu akan adanya tugas dalam fungsi tersebut.

Tabel – 58
Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Operasi
Penggalangan Bidang Maritim

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	2	5,56	5	10	M = $\frac{110}{36}$ = 3,06
Sering	9	25	4	36	
Kadang-Kadang	17	47,22	3	51	
Tidak Pernah	5	13,89	2	10	
Tidak Tahu	3	8,33	1	3	
Jumlah	36	100		110	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-59 di bawah ini dapat diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam penggunaan kemampuan operasi *pertahanan* bidang maritime dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan adalah sebesar 2,69 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 33,33% menyatakan 'kadang-kadang', 33,33% menyatakan 'tidak pernah', 19,44% menyatakan 'sering', 11,11% menyatakan 'tidak tahu' dan 2,78% menyatakan 'selalu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 33,33% tersebut disebabkan oleh adanya akumulasi biaya yang cukup tinggi dan capaian

waktu yang relatif melebihi target yang ditentukan dalam operasi tersebut. Sedangkan 11,11% menyatakan 'tidak tahu' disebabkan karena memang tidak tahu akan adanya tugas dalam fungsi tersebut.

Tabel – 59
Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Operasi
Pertahanan Bidang Maritim

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	1	2,78	5	5	M = $\frac{97}{36}$ = 2,69
Sering	7	19,44	4	28	
Kadang-Kadang	12	33,33	3	36	
Tidak Pernah	12	33,33	2	24	
Tidak Tahu	4	11,11	1	4	
Jumlah	36	100		97	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-60 di bawah ini dapat diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam penggunaan kemampuan operasi *keamanan* bidang maritime dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan adalah sebesar 3,00 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 47,22% menyatakan 'kadang-kadang', 25% menyatakan 'sering', 13,89% menyatakan 'tidak tahu', 8,33% menyatakan 'tidak pernah' dan 5,56% menyatakan 'selalu. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 8,33% tersebut disebabkan oleh adanya akumulasi biaya yang cukup tinggi dan capaian waktu yang relatif melebihi target yang ditentukan dalam operasi tersebut. Sedangkan 13,89% menyatakan 'tidak tahu' disebabkan karena beranggapan bahwa untuk fungsi tersebut berada pada tugas satuan lain seperti Guskamla dan Armada.

Tabel – 60
Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Operasi
Keamanan Bidang Maritim

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	2	5,56	5	10	$M = \frac{108}{36}$ $= 3$
Sering	9	25	4	36	
Kadang-Kadang	17	47,22	3	51	
Tidak Pernah	3	8,33	2	6	
Tidak Tahu	5	13,89	1	5	
Jumlah	36	100		108	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-61 di bawah ini dapat diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam penggunaan *kemampuan dukungan dalam penyelenggaraan suatu operasi* maritime dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan adalah sebesar 3,00 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 36,11% menyatakan 'kadang-kadang', 22,22% menyatakan 'sering', 16,67% menyatakan 'tidak pernah', 13,89% menyatakan 'tidak tahu' dan 11,11% menyatakan 'selalu. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 16,67% tersebut disebabkan oleh adanya akumulasi biaya yang cukup tinggi dan capaian waktu yang relatif melebihi target yang ditentukan dalam operasi tersebut. Sedangkan 13,89% menyatakan 'tidak pernah' disebabkan karena beranggapan bahwa untuk fungsi tersebut berada pada tugas satuan lain seperti Guskamla dan Armada.

Tabel – 61
Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Dukungan
Dalam Penyelenggaraan Operasi

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	4	11,11	5	20	$M = \frac{108}{36}$ $= 3$
Sering	8	22,22	4	32	
Kadang-Kadang	13	36,11	3	39	
Tidak Pernah	6	16,67	2	12	
Tidak Tahu	5	13,89	1	5	
Jumlah	36	100		108	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-62 di bawah ini dapat diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam penyelenggaraan *latihan operasi matra* dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan adalah sebesar 3,17 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 38,89% menyatakan 'kadang-kadang', 27,78% menyatakan 'tidak pernah', 22,22% menyatakan 'sering' dan 11,11% menyatakan 'selalu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 27,78% tersebut disebabkan oleh adanya akumulasi biaya yang cukup tinggi dan capaian waktu yang relatif melebihi target yang ditentukan dalam operasi tersebut.

Tabel – 62
Tanggapan Responden
Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Latihan Operasi Matra

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	4	11,11	5	20	$M = \frac{114}{36}$ $= 3,17$
Sering	8	22,22	4	32	
Kadang-Kadang	14	38,89	3	42	
Tidak Pernah	10	27,78	2	20	
Tidak Tahu	-	-	1	-	
Jumlah	36	100		114	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-63 di bawah ini dapat diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam penyelenggaraan *latihan operasi gabungan* dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan adalah sebesar 3,42 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 30,56% menyatakan 'kadang-kadang', 27,78% menyatakan 'sering', 19,44% menyatakan 'selalu', 19,44% menyatakan 'tidak pernah', 2,78% menyatakan 'tidak tahu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 19,44 % tersebut disebabkan oleh adanya akumulasi biaya yang cukup tinggi dan capaian waktu yang relatif melebihi target yang ditentukan dalam operasi tersebut. Sedangkan 2,78% menyatakan 'tidak tahu' disebabkan karena responden sebagai pejabat baru.

Tabel – 63
Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas
Penyelenggaraan Latihan Operasi Gabungan

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	7	19,44	5	35	M = $\frac{123}{36}$ = 3,42
Sering	10	27,78	4	40	
Kadang-Kadang	11	30,56	3	33	
Tidak Pernah	7	19,44	2	14	
Tidak Tahu	1	2,78	1	1	
Jumlah	36	100		123	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-64 di bawah ini dapat diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam penyelenggaraan *latihan bersama dan meeting dengan Negara-negara sahabat* dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan adalah sebesar 3,06 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 58,33% menyatakan

'kadang-kadang', 19,44% menyatakan 'sering', 19,44% menyatakan 'tidak pernah' dan 2,78% menyatakan 'selalu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 19,44% tersebut disebabkan oleh adanya akumulasi biaya yang cukup tinggi dan capaian waktu yang relatif melebihi target yang ditentukan dalam operasi tersebut.

Tabel – 64
Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Penyelenggaraan Latihan Bersama Dan Meeting Dengan Negara Sahabat

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	1	2,78	5	5	$M = \frac{110}{36} = 3,06$
Sering	7	19,44	4	28	
Kadang-Kadang	21	58,33	3	63	
Tidak Pernah	7	19,44	2	14	
Tidak Tahu	-	-	1	-	
Jumlah	36	100		110	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-65 di bawah ini dapat diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam *penggunaan kekuatan berupa penyelenggaraan operasi penyekatan di perairan* dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan adalah sebesar 3,08 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 47,22% menyatakan 'kadang-kadang', 22,22% menyatakan 'tidak pernah', 19,44% menyatakan 'sering', 8,33% menyatakan 'selalu' dan 2,78% menyatakan 'tidak tahu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 22,22% tersebut disebabkan oleh adanya akumulasi biaya yang cukup tinggi dan capaian waktu yang relatif melebihi target yang ditentukan dalam operasi tersebut. Sedangkan 2,78 menyatakan 'tidak tahu' karena responden sebagai pejabat baru.

Tabel – 65
Tanggapan Responden
Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Operasi Penyekatan Di Perairan

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	3	8,33	5	15	$M = \frac{111}{36}$ $= 3,08$
Sering	7	19,44	4	28	
Kadang-Kadang	17	47,22	3	51	
Tidak Pernah	8	22,22	2	16	
Tidak Tahu	1	2,78	1	1	
Jumlah	36	100		111	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-66 di bawah ini dapat diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam *penggunaan kekuatan berupa penyelenggaraan operasi pengamanan pantai* dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan adalah sebesar 2,67 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 58,33% menyatakan 'kadang-kadang', 22,22% menyatakan 'tidak tahu', 8,33% menyatakan 'selalu', 8,33% menyatakan 'tidak pernah' dan 2,78% menyatakan 'sering'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak tahu' sebesar 22,22% tersebut disebabkan oleh adanya anggapan bahwa tugas tersebut dilaksanakan oleh Guskamla/Guspurla. Sedangkan 8,33% menyatakan 'tidak pernah' karena memang operasi tersebut menyebabkan akumulasi biaya yang cukup tinggi dan capaian waktu yang relatif melebihi target yang ditentukan.

Tabel – 66
Tanggapan Responden
Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Operasi Pengamanan Pantai

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	3	8,33	5	15	$M = \frac{96}{36}$ $= 2,67$
Sering	1	2,78	4	4	
Kadang-Kadang	21	58,33	3	63	
Tidak Pernah	3	8,33	2	6	
Tidak Tahu	8	22,22	1	8	
Jumlah	36	100		96	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-67 di bawah ini dapat diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam *penggunaan kekuatan berupa penyelenggaraan operasi di perairan* dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan adalah sebesar 3,17 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 30,56% menyatakan 'sering', 27,78% menyatakan 'kadang-kadang', 25% menyatakan 'tidak pernah', 11,11% menyatakan 'selalu' dan 5,56% menyatakan 'tidak tahu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 25 % tersebut disebabkan oleh adanya akumulasi biaya yang cukup tinggi dan capaian waktu yang relatif melebihi target yang ditentukan. Sedangkan 5,56% menyatakan 'tidak tahu' karena hal itu bukan tanggung jawabnya.

Tabel – 67
Tanggapan Responden
Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Operasi Di Perairan

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	4	11,11	5	20	$M = \frac{114}{36}$ $= 3,17$
Sering	11	30,56	4	44	
Kadang-Kadang	10	27,78	3	30	
Tidak Pernah	9	25	2	18	
Tidak Tahu	2	5,56	1	2	
Jumlah	36	100		114	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-68 di bawah ini dapat diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam penggunaan kekuatan berupa penyelenggaraan Operasi penanggulangan illegal fishing dan illegal logging serta melaksanakan operasi bantuan kemanusiaan dalam bentuk operasi Pasar Berjalan (Mobile Market) di pulau-pulau terluar/terpencil, dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan adalah sebesar 3,17 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 61,11% menyatakan 'kadang-kadang', 19,44% menyatakan 'sering', 13,89% menyatakan 'tidak pernah', 5,56% menyatakan 'selalu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 13,89% tersebut disebabkan oleh adanya akumulasi biaya yang cukup tinggi dan capaian waktu yang relatif melebihi target yang ditentukan.

Tabel – 68
Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Operasi
Penanggulangan Illegal Fishing Dan Illegal Logging Serta Operasi Bantuan
Kemanusiaan

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	2	5,56	5	10	$M = \frac{114}{36}$ $= 3,17$
Sering	7	19,44	4	28	
Kadang-Kadang	22	61,11	3	66	
Tidak Pernah	5	13,89	2	10	
Tidak Tahu	-	-	1	-	
Jumlah	36	100		114	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-69 di bawah ini dapat diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam *penggunaan kekuatan berupa penyelenggaraan operasi pengamanan di wilayah perbatasan*, dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan adalah sebesar 3,17 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 52,78% menyatakan 'kadang-kadang', 19,44% menyatakan 'tidak pernah', 16,67% menyatakan 'selalu', 8,33% menyatakan 'sering' dan 2,78% menyatakan 'tidak tahu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 19,44% tersebut disebabkan oleh adanya akumulasi biaya yang cukup tinggi dan capaian waktu yang relatif melebihi target yang ditentukan. Sedangkan 2,78% menyatakan 'tidak tahu' disebabkan responden sebagai pejabat baru.

Tabel – 69
Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Operasi
Pengamanan Di Wilayah Perbatasan

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	6	16,67	5	30	$M = \frac{114}{36}$ $= 3,17$
Sering	3	8,33	4	12	
Kadang-Kadang	19	52,78	3	57	
Tidak Pernah	7	19,44	2	14	
Tidak Tahu	1	2,78	1	1	
Jumlah	36	100		114	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-70 di bawah ini dapat diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam *penggunaan kekuatan berupa penyelenggaraan operasi terhadap perompakan di laut, penyelundupan dan imigran gelap*, dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan adalah sebesar 3,06 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 44,44% menyatakan 'kadang-kadang', 25% menyatakan 'sering', 19,44% menyatakan 'tidak pernah', 5,56% menyatakan 'selalu' dan 5,56% menyatakan 'tidak tahu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 19,44% tersebut disebabkan oleh adanya akumulasi biaya yang cukup tinggi dan capaian waktu yang relatif melebihi target yang ditentukan. Sedangkan 2,78% menyatakan 'tidak tahu' disebabkan responden sebagai pejabat baru dan untuk tugas tersebut bukan tanggung jawabnya.

Tabel – 70
Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Operasi
Penanggulangan Perompakan Di Laut, Penyelundupan Dan Imigran Gelap

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	2	5,56	5	10	M = $\frac{110}{36}$ = 3,06
Sering	9	25	4	36	
Kadang-Kadang	16	44,44	3	48	
Tidak Pernah	7	19,44	2	14	
Tidak Tahu	2	5,56	1	2	
Jumlah	36	100		110	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-71 di bawah ini dapat diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam *penggunaan kekuatan berupa penyelenggaraan operasi pengamanan ALKI*, dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan adalah sebesar 2,97 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 61,11% menyatakan 'kadang-kadang', 25% menyatakan 'tidak pernah', 8,33% menyatakan 'selalu' dan 5,56% menyatakan 'sering'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 25% tersebut disebabkan oleh adanya akumulasi biaya yang cukup tinggi dan capaian waktu yang relatif **melebihi target** yang ditentukan.

Tabel – 71
Tanggapan Responden
Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Operasi Pengamanan ALKI

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	3	8,33	5	15	M = $\frac{107}{36}$ = 2,97
Sering	2	5,56	4	8	
Kadang-Kadang	22	61,11	3	66	
Tidak Pernah	9	25	2	18	
Tidak Tahu	-	-	1	-	
Jumlah	36	100		107	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-72 di bawah ini dapat diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam *penggunaan kekuatan berupa penyelenggaraan operasi Kamla*, dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan adalah sebesar 3,25 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 47,22% menyatakan 'kadang-kadang', 22,22% menyatakan 'sering', 13,89% menyatakan 'selalu', 8,33% menyatakan 'tidak pernah' dan 8,33% menyatakan 'tidak tahu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 8,33% tersebut disebabkan oleh adanya akumulasi biaya yang cukup tinggi dan capaian waktu yang relatif melebihi target yang ditentukan. Sedangkan 8,33% menyatakan 'tidak tahu' disebabkan responden betul-betul tidak tahu biaya yang digunakan atau dihabiskan serta program waktu yang ditargetkan.

Tabel – 72
Tanggapan Responden
Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Operasi Kamla

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	5	13,89	5	25	M = $\frac{117}{36}$
Sering	8	22,22	4	32	
Kadang-Kadang	17	47,22	3	51	36
Tidak Pernah	3	8,33	2	6	= 3,25
Tidak Tahu	3	8,33	1	3	
Jumlah	36	100		117	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-73 di bawah ini dapat diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam *penggunaan kekuatan berupa penyelenggaraan operasi penanggulangan Bencana Alam*, dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan adalah sebesar 3,25 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 47,22% menyatakan

'kadang-kadang', 19,44% menyatakan 'sering', 16,67% menyatakan 'tidak pernah', 13,89% menyatakan 'selalu' dan 2,78% menyatakan 'tidak tahu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 16,67% tersebut disebabkan oleh adanya akumulasi biaya yang cukup tinggi dan capaian waktu yang relatif melebihi target yang ditentukan. Sedangkan 2,78% menyatakan 'tidak tahu' disebabkan responden betul-betul tidak tahu biaya yang digunakan atau dihabiskan serta program waktu yang ditargetkan.

Tabel – 73
Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Operasi
Penanggulangan Bencana Alam

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	5	13,89	5	25	$M = \frac{117}{36}$ $= 3,25$
Sering	7	19,44	4	28	
Kadang-Kadang	17	47,22	3	51	
Tidak Pernah	6	16,67	2	12	
Tidak Tahu	1	2,78	1	1	
Jumlah	36	100		117	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-74 di bawah ini dapat diketahui bahwa tingkat interpretasi responden *dalam penggunaan kekuatan berupa penyelenggaraan operasi muhibah*, dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan adalah sebesar 3,25 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 47,22% menyatakan 'kadang-kadang', 19,44% menyatakan 'selalu', 13,89% menyatakan 'sering', 11,11% menyatakan 'tidak pernah' dan 8,33% menyatakan 'tidak tahu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 11,11% tersebut disebabkan oleh adanya akumulasi biaya yang

cukup tinggi dan capaian waktu yang relatif melebihi target yang ditentukan. Sedangkan 8,33% menyatakan 'tidak tahu' disebabkan responden betul-betul tidak tahu adanya program tersebut.

Tabel – 74
Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Penyelenggaraan Operasi Muhibah

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	7	19,44	5	35	$M = \frac{117}{36}$ $= 3,25$
Sering	5	13,89	4	20	
Kadang-Kadang	17	47,22	3	51	
Tidak Pernah	4	11,11	2	8	
Tidak Tahu	3	8,33	1	3	
Jumlah	36	100		117	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

- **Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut**

Pada Tabel-75 di bawah ini dapat diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam pemberdayaan wilayah pertahanan laut berupa upaya mewujudkan lingkungan maritim yang kondusif dalam mendukung tugas pokok pangkalan, dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan adalah sebesar 3,11 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 41,67% menyatakan 'kadang-kadang', 25% menyatakan 'sering', 13,89% menyatakan 'tidak tahu', 11,11% menyatakan 'selalu' dan 8,33% menyatakan 'tidak pernah'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 8,33% tersebut disebabkan oleh adanya akumulasi biaya yang cukup tinggi dan capaian waktu yang relatif melebihi target yang ditentukan. Sedangkan 13,89% menyatakan 'tidak tahu' disebabkan responden betul-betul tidak tahu adanya program tersebut.

Tabel – 75
Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Pemberdayaan
Lingkungan Maritim Yang Kondusif

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	4	11,11	5	20	$M = \frac{112}{36}$ $= 3,11$
Sering	9	25	4	36	
Kadang-Kadang	15	41,67	3	45	
Tidak Pernah	3	8,33	2	6	
Tidak Tahu	5	13,89	1	5	
Jumlah	36	100		112	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-76 di bawah ini dapat diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam pemberdayaan wilayah pertahanan laut berupa upaya memberikan pertimbangan dan perbantuan kepada pemerintah dalam penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung, dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan adalah sebesar 3,08 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 33,33% menyatakan 'kadang-kadang', 30,56% menyatakan 'tidak pernah', 22,22% menyatakan 'sering', 11,11% menyatakan 'selalu' dan 2,78% menyatakan 'tidak tahu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 30,56% tersebut disebabkan oleh adanya akumulasi biaya yang sangat tinggi dan capaian waktu yang relatif panjang melebihi target yang ditentukan. Sedangkan 2,78% menyatakan 'tidak tahu' disebabkan responden betul-betul tidak tahu adanya program tersebut.

Tabel – 76
Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Penyiapan
Komponen Cadangan Dan komponen Pendukung

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	4	11,11	5	20	$M = \frac{111}{36}$ $= 3,08$
Sering	8	22,22	4	32	
Kadang-Kadang	12	33,33	3	36	
Tidak Pernah	11	30,56	2	22	
Tidak Tahu	1	2,78	1	1	
Jumlah	36	100		111	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

- **Penegakkan Hukum**

Pada Tabel-77 di bawah ini dapat diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam penegakkan hukum berupa upaya meningkatkan Gakkum dan Gaklat di laut, dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan adalah sebesar 3,19 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 52,78% menyatakan 'kadang-kadang', 19,44% menyatakan 'tidak pernah', 16,67% menyatakan 'sering' dan 11,11% menyatakan 'selalu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 19,44% tersebut disebabkan oleh adanya akumulasi biaya yang cukup tinggi dan capaian waktu yang relatif lama melebihi target yang ditentukan.

Tabel – 77
Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Peningkatan Gakkum Dan Gaklat Di Laut

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	4	11,11	5	20	M = $\frac{115}{36}$ = 3,19
Sering	6	16,67	4	24	
Kadang-Kadang	19	52,78	3	57	
Tidak Pernah	7	19,44	2	14	
Tidak Tahu	-	-	1	-	
Jumlah	36	100		115	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-78 di bawah ini dapat diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam penegakkan hukum berupa upaya memaksimalkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan adalah sebesar 3,17 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 33,33% menyatakan 'kadang-kadang', 22,22% menyatakan 'sering', 19,44% menyatakan 'selalu', 19,44% menyatakan 'tidak tahu' dan 5,56% menyatakan 'tidak pernah'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 5,56% tersebut disebabkan oleh adanya akumulasi biaya yang cukup tinggi dan capaian waktu yang relatif panjang melebihi target yang ditentukan. Sedangkan 19,44% menyatakan 'tidak tahu' disebabkan responden betul-betul tidak tahu adanya program tersebut.

Tabel – 78
Tanggapan Responden
Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Kerjsama Dengan Instansi Terkait

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	7	19,44	5	35	$M = \frac{114}{36}$ $= 3,17$
Sering	8	22,22	4	32	
Kadang-Kadang	12	33,33	3	36	
Tidak Pernah	2	5,56	2	4	
Tidak Tahu	7	19,44	1	7	
Jumlah	36	100		114	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Pada Tabel-79 di bawah ini dapat diketahui bahwa tingkat interpretasi responden dalam penegakkan hukum berupa upaya memberikan bantuan hukum, dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan adalah sebesar 2,78 atau Cukup. Hasil tersebut didasarkan pada pendapat responden, dimana 47,22% menyatakan 'kadang-kadang', 27,78% menyatakan 'tidak pernah', 11,11 % menyatakan 'sering', 8,33% menyatakan 'tidak tahu' dan 5,56% menyatakan 'selalu'. Berdasarkan penelusuran pada beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan 'tidak pernah' sebesar 27,78% tersebut disebabkan oleh adanya akumulasi biaya yang sangat tinggi dan capaian waktu yang relatif sangat panjang melebihi target yang ditentukan. Sedangkan 8,33% menyatakan 'tidak tahu' disebabkan responden betul-betul tidak tahu dan tidak ada program tersebut.

Tabel – 79
Tanggapan Responden
Tentang Efisiensi Dan Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	2	5,56	5	10	$M = \frac{100}{36} = 2,78$
Sering	4	11,11	4	16	
Kadang-Kadang	17	47,22	3	51	
Tidak Pernah	10	27,78	2	20	
Tidak Tahu	3	8,33	1	3	
Jumlah	36	100		100	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Rata-rata interpretasi responden (Tabel-80) dari indikasi keberhasilan fungsi operasi bila dilihat pada aspek efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi operasi adalah sebagai berikut :



Tabel – 80
Rekapitulasi Tanggapan Responden
Keberhasilan Fungsi Operasi Pada Aspek Efektivitas dan Efisiensi

Alternatif Jawaban	Kriteria
Tabel-56	2,97
Tabel-57	3,31
Tabel-58	3,06
Tabel-59	2,69
Tabel-60	3,00
Tabel-61	3,00
Tabel-62	3,17
Tabel-63	3,42
Tabel-64	3,06
Tabel-65	3,08
Tabel-66	2,67
Tabel-67	3,17
Tabel-68	3,17
Tabel-69	3,17
Tabel-70	3,06
Tabel-71	2,97
Tabel-72	3,25
Tabel-73	3,25
Tabel-74	3,25
Tabel-75	3,11
Tabel-76	3,08
Tabel-77	3,19
Tabel-78	3,17
Tabel-79	2,78
Nilai Rata-rata	3,09 atau Cukup

Berdasarkan rekapitulasi aspek keberhasilan fungsi operasi yang disajikan pada Tabel-58 dan Tabel-80 maka rata-rata pada aspek keberhasilan fungsi operasi adalah : $3,45 + 3,09 = 6,54/2 = 3,27$ atau Cukup.

Pada Tabel-81 digambarkan tingkat interpretasi responden dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

Tabel – 81
Rekapitulasi Hasil Interpretasi Responden
Pada Variabel Yang Diteliti

Variabel	Kriteria
Kebijakan	3,98 atau Baik
Potensi Pangkalan	3,14 atau Cukup
Keberhasilan Fungsi Operasi	3,27 atau Cukup

C. Analisis Kuantitatif Hubungan Kebijakan Dan Potensi Pangkalan Dengan Keberhasilan Penyelenggaraan Fungsi Operasi.

1. Hubungan Kebijakan TNI AL (X-1) Dengan Keberhasilan Penyelenggaraan Fungsi Operasi (Y).

Untuk menghitung apakah terdapat hubungan antara Kebijakan TNI AL (X-1) dengan Keberhasilan Penyelenggaraan Fungsi Operasi (Y) dan seberapa besar hubungan tersebut, maka dilakukan tes statistik (analisis asosiatif) dengan menggunakan uji korelasi Product Moment dan ganda mengingat $n > 30$, yaitu melalui prosedur sebagai berikut :

- a. Dengan menggunakan tabel pembantu tentukan dan hitung korelasi Product Moment dari Pearson yaitu r_{X-1Y} .

$$r_{yx^1} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

$$r_{yx^1} = \frac{-17}{\sqrt{(92)(899)}}$$

$$r_{yx^1} = \frac{-17}{287,59}$$

$r_{yx^1} = -0,0591$ (korelasinya 'Sangat Rendah' dan negative atau memberikan akibat terbalik)

$$r^2 = -0,0591^2 = 0,0035 = 0,35 \% \text{ (angka kontribusi)}$$

b. Setelah dihitung korelasinya dan ditemukan angka koefisien korelasinya, maka selanjutnya dilakukan pengukuran tingkat korelasinya dengan berpedoman pada kriteria interpretasi seperti yang ditunjukkan pada Tabel-05.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa koefisien korelasi yang diperoleh adalah sebesar -0.0591 . Artinya, bila berpedoman pada Tabel-05 maka korelasi antara Kebijakan dengan Keberhasilan Penyelenggaraan Fungsi Operasi adalah sangat rendah dan negatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa r hasil hitungan adalah: -0.0591 dan r tabel (untuk $n = 36$ dan tingkat kesalahan 5%) adalah 0.329 , jadi r hitung $<$ dari r tabel. Dengan demikian dapat diketahui bahwa hubungan korelasional antara Kebijakan dengan Keberhasilan Penyelenggaraan Fungsi Operasi adalah negatif dan tidak signifikan. Artinya hipotesis yang diajukan adalah ditolak. Atau dengan rumusan : Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Kebijakan dengan Keberhasilan Penyelenggaraan Fungsi Operasi. Namun bila dilihat dari nilai harga kontribusinya seperti yang diuraikan di atas maka variabel kebijakan telah memberikan kontribusi sebesar 0,35% kepada keberhasilan fungsi operasi.

2. Hubungan Potensi Pangkalan TNI AL (X-2) Dengan Keberhasilan Penyelenggaraan Fungsi Operasi (Y).

Untuk menghitung apakah terdapat hubungan antara Potensi Pangkalan TNI AL (X-2) dengan Keberhasilan Penyelenggaraan Fungsi Operasi (Y) dan seberapa besar hubungan tersebut, maka dilakukan tes statistik (analisis asosiatif) dengan menggunakan uji korelasi Product

Moment dan ganda mengingat $n > 30$, yaitu melalui prosedur sebagai berikut :

- a. Dengan menggunakan tabel pembantu tentukan dan hitung korelasi parsial Product Moment dari Pearson yaitu $r_{X-2,Y}$.

$$r_{yx^2} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

$$r_{yx^2} = \frac{551}{\sqrt{(802)(899)}}$$

$$r_{yx^2} = \frac{551}{849,12}$$

$$r_{yx^2} = 0,6489 \text{ (korelasinya kuat dan positif)}$$

$$r^2 = 0,6489^2 = 0,4211 = 42,11\% \text{ (angka kontribusi)}$$

- b. Setelah dihitung korelasinya dan ditemukan angka koefisien korelasinya, maka selanjutnya dilakukan pengukuran tingkat korelasinya dengan berpedoman pada kriteria interpretasi seperti yang ditunjukkan pada Tabel-05. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa koefisien korelasi yang diperoleh adalah sebesar 0.6489. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa r hitung yang diperoleh adalah 0,6489 dan bila dibandingkan dengan r tabel ($n = 36$ dan tingkat kesalahan 5%) adalah 0.329, maka dapat disimpulkan bahwa r hitung $>$ dari r tabel. Dengan demikian bahwa hubungan korelasional antara Potensi Pangkalan TNI AL dengan Keberhasilan Penyelenggaraan Fungsi Operasi adalah positif dan signifikan. Artinya hipotesis yang

diajukan adalah **dapat diterima**. Atau dengan rumusan : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara *Potensi Pangkalan* dengan *Keberhasilan Penyelenggaraan Fungsi Operasi*. Namun bila dilihat dari nilai harga kontribusinya seperti diketahui tersebut di atas maka variabel potensi pangkalan telah memberikan kontribusi sebesar 42,11% kepada keberhasilan fungsi operasi.

3. Hubungan Kebijakan TNI AL (X-1) Dan Potensi Pangkalan TNI AL (X-2) Secara Bersama Dengan Keberhasilan Penyelenggaraan Fungsi Operasi (Y).

Untuk menghitung apakah terdapat hubungan antara Kebijakan (X-1) dan Potensi Pangkalan TNI AL (X-2) secara bersama-sama dengan Keberhasilan Penyelenggaraan Fungsi Operasi (Y) dan seberapa besar hubungan tersebut, maka dilakukan tes statistik (analisis asosiatif) dengan menggunakan uji korelasi Product Moment dan ganda mengingat $n > 30$, yaitu melalui prosedur sebagai berikut :

a. Sebelum menghitung korelasi ganda terlebih dahulu tentukan dan hitung korelasi parsial Product Moment dari Pearson $r_{X_1X_2}$.

$$r_{x^1x^2} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

$$r_{x^1x^2} = \frac{-28}{\sqrt{(\sum 92)(802)}}$$

$$r_{x^1x^2} = \frac{-28}{\sqrt{(92)(802)}}$$

$$r_{x^1x^2} = \frac{-28}{\sqrt{73784}}$$

$$r_{x^1x^2} = \frac{-28}{271,63}$$

$$r_{x^1x^2} = -0,1031 \text{ (korelasinya Sangat Rendah dan Negatif)}$$

$$r^2 = -0,1031^2 = 0,0106 = 1,06 \% \text{ (angka kontribusi)}$$

Berdasarkan hasil hitungan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa nilai harga kontribusi variabel kebijakan kepada potensi pangkalan adalah 1,06 %. Nilai tersebut lebih besar dari pada kontribusi variabel kebijakan kepada keberhasilan fungsi operasi (0,35%).

b. Berdasarkan hasil hitungan $r_{x_1x_2}$ tersebut di atas kemudian masukan dalam hitungan rumus korelasi ganda.

Rumus korelasi ganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$R_{yx_1x_2} = \sqrt{\frac{r^2_{yx_1} + r^2_{yx_2} - 2r_{yx_1}r_{yx_2}r_{x_1x_2}}{1 - r^2_{x_1x_2}}}$$

$$R_{yx_1x_2} = \sqrt{\frac{(-0,0591)^2 + (0,6489)^2 - 2\{(-0,0591)(0,6489)(-0,1031)\}}{1 - (-0,1031)^2}}$$

$$R_{yx_1x_2} = \sqrt{\frac{0,0035 + 0,4211 - 2(0,0040)}{1 - (0,1773)}}$$

$$R_{yx_1x_2} = \sqrt{\frac{0,0035 + 0,4211 - 0,0080}{0,8227}}$$

$$R_{yx_1x_2} = \sqrt{\frac{0,4166}{0,8227}}$$

$$R_{yx_1x_2} = \sqrt{0,5064}$$

$$R_{yx_1x_2} = 0,7116 \text{ (Korelasi gandanya 'kuat')}$$

$$r^2 = 0,7116^2 = 0,5064 = 50,64 \% \text{ (angka kontribusi)}$$

Jadi terdapat korelasi positif antara kebijakan dan potensi pangkalan secara bersama-sama dengan keberhasilan fungsi operasi sebesar 0,7116. Hubungan ini secara kualitatif dapat dinyatakan 'kuat', dan besarnya lebih dari korelasi individual antara X1 dengan Y, maupun X2 dengan Y. Artinya hipotesis yang diajukan adalah **dapat diterima**. Atau dengan rumusan : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara *Kebijakan dan Potensi Pangkalan* secara bersama-sama dengan *Keberhasilan Penyelenggaraan Fungsi Operasi*. Korelasi sebesar 0,7116 itu baru berlaku untuk sampel yang diteliti. Apakah koefisien korelasi itu dapat digeneralisasikan, maka harus diuji signifikansinya dengan rumus F seperti tersebut di bawah ini (bagian c.)

Sedangkan bila dilihat dari nilai harga kontribusinya, ternyata kontribusi yang diberikan variabel kebijakan dan variabel potensi pangkalan secara bersama-sama kepada keberhasilan fungsi operasi adalah 50,64 % yaitu lebih besar dari kontribusi yang diberikan oleh variabel kebijakan dan variabel potensi pangkalan secara individual.

c. Berdasarkan hasil hitungan $R_{yx_1x_2}$ tersebut di atas kemudian hitung nilai F nya untuk melihat signifikansinya dari korelasi ganda tersebut.

$$F = \frac{\frac{R^2}{k}}{\frac{(1 - R^2)}{(n - k - 1)}}$$

$$F = \frac{\frac{(0,7116)^2}{2}}{\frac{(1 - 0,7116^2)}{(36 - 2 - 1)}}$$

$$F = \frac{\frac{0,5064}{2}}{\frac{(1 - 0,5064)}{33}}$$

$$F = \frac{\frac{0,2532}{0,4936}}{33}$$

$$F = 16,9365$$

Berdasarkan hitungan pada rumus F diatas maka dapat diketahui bahwa harga F hitung = 16,9365. Harga ini selanjutnya dikonsultasikan dengan F tabel dimana dk pembilang = 2 dan dk penyebut = 36, maka diperoleh harga F table = 3,26 (tingkat kesalahan 5%). Dalam penelitian ini ternyata harga F hitung > dari F table, artinya korelasi dari variable ganda adalah signifikan, yaitu dapat digeneralisasikan atau dapat diberlakukan untuk seluruh populasi.

D. Analisa Hasil Penelitian dan Pengujian Hipotesis.

1. Analisa Hasil Penelitian Deskriptif.

Pada hasil penelitian deskriptif dari variable-variabel yang diteliti baik pada variable bebas maupun pada variable terikat (Tabel-86) diperoleh suatu

gambaran bahwa tingkat interpretasi responden pada masing-masing variable cukup beragam dan berada pada kategori 'Baik' dan 'Cukup'. Pada variable bebas yaitu variabel kebijakan memperoleh tingkat interpretasi berkriteria 'Baik' atau 3,98, sedangkan variable Potensi pangkalan memperoleh kriteria 'Cukup' atau 3,14. Sedangkan pada variable terikat yaitu variable keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi memperoleh kriteria 'Cukup' atau 3,27. Atas dasar nilai kriteria tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa pada umumnya responden dapat memahami kondisi dan situasi apa yang menjadi perhatian dari penelitian yang penulis lakukan. Memang sudah menjadi keharusan bagi responden untuk memahami aspek kebijakan, potensi pangkalan dan penyelenggaraan fungsi operasi yang dilakukan bila melihat pada tugas pokok TNI AL seperti yang tercantum pada pasal 9 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang menyatakan sebagai berikut :

1. **Melaksanakan tugas TNI matra laut bidang pertahanan.**
2. **Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.**
3. **Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah.**
4. **Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut.**
5. **Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.**

Selanjutnya dalam penjelasan Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 9 huruf b menyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan menegakkan hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakkan hukum di laut sesuai

dengan kewenangan TNI AL (*constabulary function*) yang berlaku secara universal dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi serta pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi nasional.

Menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI AL di laut, terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, TNI AL tidak menyelenggarakan pengadilan.

Kalimat "segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakkan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI AL" merupakan penegasan bahwa secara khusus tugas untuk menegakkan hukum di laut hanya diberikan kepada TNI AL atau hanya merupakan kewenangan TNI AL, bukan merupakan tugas dan kewenangan TNI. Sehingga kegiatan apapun boleh dilakukan oleh TNI AL sepanjang hal itu merupakan kewenangannya. Inilah yang merupakan sifat khusus dari tugas ini. Selanjutnya bila ditambah dengan kalimat : "Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi serta pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi nasional".

Atas dasar fungsi tersebut maka fungsi pangkalan akan senantiasa menjadi penting dan dibutuhkan terutama dalam rangka mendukung penyelenggaraan fungsi operasi.

2. Analisis Hasil Pengujian Hipotesis.

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

A. UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS PER SUB VARIABEL

- Sub Variabel Product Differential Strategy

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Item-total Statistics

Item	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Deleted
X11_1	7.9444	1.5968	.5384	.6501
X11_2	7.9167	1.5643	.5921	.5845
X11_3	8.0278	1.6849	.5137	.6783

Reliability Coefficients

N of Cases = 36.0

N of Items = 3

Alpha = .7262

Hasil analisis menunjukkan nilai Validitas (*Corrected Item-Total Correlation*) untuk sub variabel *Product Differential Strategy* seluruhnya lebih besar dari 0,300 yang menjadi batasan minimal Validity.

Sementara nilai Reliability yang diperoleh sebesar 0,7262; nilai ini lebih besar dari 0,700 yang menjadi batasan minimal Reliability sekelompok data. Berdasarkan pada hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa sub variabel *Product Differential Strategy* sudah memenuhi syarat dan dapat dinyatakan Valid dan Reliabel.

- **Sub Variabel Segmented Focus Strategy**

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Item-total Statistics

Item	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Deleted
X12_1	6.7500	3.1643	.6488	.7023
X12_2	6.8611	3.1516	.6279	.7212
X12_3	7.8333	2.6571	.6327	.7252

Reliability Coefficients

N of Cases = 36.0

N of Items = 3

Alpha = .7906

Hasil analisis menunjukkan nilai Validitas (*Corrected Item-Total Correlation*) untuk sub variabel Segmented Focus Strategy seluruhnya lebih besar dari 0,300 yang menjadi batasan minimal Validity.

Sementara nilai Reliability yang diperoleh sebesar 0,7906; nilai ini lebih besar dari 0,700 yang menjadi batasan minimal Reliability sekelompok data. Berdasarkan pada hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa sub variabel Segmented Focus Strategy sudah memenuhi syarat dan dapat dinyatakan Valid dan Reliabel.

- **Sub Variabel Cost Leader**

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)
Item-total Statistics

Item	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Deleted
X13_1	8.5556	1.1111	.6276	.5743
X13_2	8.6389	1.7230	.5648	.6854
X13_3	9.0278	1.2849	.5481	.6720

Reliability Coefficients
N of Cases = 36.0
Alpha = .7369
N of Items = 3

Hasil analisis menunjukkan nilai Validitas (*Corrected Item-Total Correlation*) untuk sub variabel Cost Leader seluruhnya lebih besar dari 0,300 yang menjadi batasan minimal Validity.

Sementara nilai Reliability yang diperoleh sebesar 0,7369; nilai ini lebih besar dari 0,700 yang menjadi batasan minimal Reliability sekelompok data. Berdasarkan pada hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa sub variabel Cost Leader sudah memenuhi syarat dan dapat dinyatakan Valid dan Reliabel.

- **Sub Variabel Concept**

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)
Item-total Statistics

Item	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Deleted
X21_1	16.9444	7.9397	.5690	.7110
X21_2	17.3056	7.8754	.5682	.7112
X21_3	15.7778	9.6063	.3268	.7698
X21_4	16.4167	9.0500	.4740	.7373
X21_5	17.0556	6.8540	.7357	.6557
X21_6	16.3611	9.6659	.3615	.7614

Reliability Coefficients

N of Cases = 36.0

Alpha = .7634

N of Items = 6

Hasil analisis menunjukkan nilai Validitas (*Corrected Item-Total Correlation*) untuk sub variabel C

konsep seluruhnya lebih besar dari 0,300 yang menjadi batasan minimal Validity.

Sementara nilai Reliability yang diperoleh sebesar 0,7634; nilai ini lebih besar dari 0,700 yang menjadi batasan minimal Reliability sekelompok data. Berdasarkan pada hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa sub variabel Concept sudah memenuhi syarat dan dapat dinyatakan Valid dan Reliabel.

• **Sub Variabel Competence**

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)
Item-total Statistics

Item	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Deleted
X22_1	13.5556	9.7968	.4617	.8358
X22_2	14.6111	8.6444	.6810	.7832
X22_3	13.6667	7.9429	.7197	.7677

X22_4	13.8611	7.9516	.6061	
X22_5	13.7500	7.4500	.6932	.8035
				.7758
Reliability Coefficients				
N of Cases = 36.0				
Alpha = .8291			N of Items = 5	

Hasil analisis menunjukkan nilai Validitas (*Corrected Item-Total Correlation*) untuk sub variabel Competence seluruhnya lebih besar dari 0,300 yang menjadi batasan minimal Validity.

Sementara nilai Reliability yang diperoleh sebesar 0,8291; nilai ini lebih besar dari 0,700 yang menjadi batasan minimal Reliability sekelompok data. Berdasarkan pada hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa sub variabel Competence sudah memenuhi syarat dan dapat dinyatakan Valid dan Reliabel.

• Sub Variabel Connection

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)
Item-total Statistics

Item	Scale Mean if Deleted	Scale Variance if Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Deleted
Deleted	Deleted	Deleted	Deleted	
X23_1	6.7778	4.1206	.5874	.7373
X23_2	6.5833	3.2214	.6370	.6780
X23_3	6.6389	3.3230	.6366	.6764
Reliability Coefficients				
N of Cases = 36.0				
Alpha = .7781			N of Items = 3	

Hasil analisis menunjukkan nilai Validitas (*Corrected Item-Total Correlation*) untuk sub variabel Connection seluruhnya lebih besar dari 0,300 yang menjadi batasan minimal Validity.

Sementara nilai Reliability yang diperoleh sebesar 0,7781; nilai ini lebih besar dari 0,700 yang menjadi batasan minimal Reliability sekelompok data.

Berdasarkan pada hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa sub variabel Connection sudah memenuhi syarat dan dapat dinyatakan Valid dan Reliabel.

• **Sub Variabel Kelancaran Dalam Penggunaan Kekuatan**

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)
Item-total Statistics

Item	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Deleted
Deleted	Deleted	Deleted	Correlation	
Y1_1	59.2500	113.4500	.7777	.9056
Y1_2	59.6111	115.7302	.6194	.9093
Y1_3	59.2222	112.6349	.6912	.9073
Y1_4	59.3333	118.7429	.4897	.9125
Y1_5	59.4722	113.2278	.6858	.9075
Y1_6	59.3333	117.0857	.6280	.9094
Y1_7	59.6389	118.0087	.6464	.9093
Y1_8	58.5000	119.9143	.5035	.9121
Y1_9	59.2500	121.3929	.3396	.9161
Y1_10	59.6111	113.5587	.6638	.9081
Y1_11	58.9722	113.5135	.7708	.9057
Y1_12	59.0556	117.3683	.4108	.9159
Y1_13	59.1389	114.9802	.6735	.9080
Y1_14	58.8611	118.4087	.3817	.9165
Y1_15	59.1944	117.0183	.5153	.9120
Y1_16	58.9167	120.2500	.4743	.9127
Y1_17	59.4444	115.6825	.5969	.9099
Y1_18	58.9444	121.3683	.3543	.9156
Y1_19	59.2500	112.7643	.8487	.9041

Reliability Coefficients
N of Cases = 36.0
Alpha = .9148
N of Items = 19

Hasil analisis menunjukkan nilai Validitas (*Corrected Item-Total Correlation*) untuk sub variabel Kelancaran Dalam Penggunaan Kekuatan seluruhnya lebih besar dari 0,300 yang menjadi batasan minimal Validity.

Sementara nilai Reliability yang diperoleh sebesar 0,9148; nilai ini lebih besar dari 0,700 yang menjadi batasan minimal Reliability sekelompok data. Berdasarkan pada hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa sub variabel Kelancaran

Dalam Penggunaan Kekuatan sudah memenuhi syarat dan dapat dinyatakan Valid dan Reliabel.

- **Sub Variabel Kelancaran Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut**

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)
Item-total Statistics

Item	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Deleted
Y2_2	3.6389	1.0373	.6481.	
Y2_3	3.2778	.7206	.6481.	

Reliability Coefficients
N of Cases = 36.0
Alpha = .7786

N of Items = 2

Hasil analisis menunjukkan nilai Validitas (*Corrected Item-Total Correlation*) untuk sub variabel Kelancaran Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut seluruhnya lebih besar dari 0,300 yang menjadi batasan minimal Validity.

Sementara nilai Reliability yang diperoleh sebesar 0,7786; nilai ini lebih besar dari 0,700 yang menjadi batasan minimal Reliability sekelompok data. Berdasarkan pada hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa sub variabel Kelancaran Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut sudah memenuhi syarat dan dapat dinyatakan Valid dan Reliabel.

- **Sub Variabel Kelancaran Dalam Penegakkan Hukum**

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)
Item-total Statistics

Item	Scale Mean	Scale Variance	Corrected Item-	Alpha
------	------------	----------------	-----------------	-------

Item Deleted	if Item Deleted	if Item Deleted	Total Correlation	if
Y3_1	9.9167	4.6500	.7327	.5192
Y3_2	10.2500	5.2786	.4234	.6955
Y3_3	9.7500	5.0500	.4458	.6846
Y3_4	10.0000	5.1429	.4370	.6889

Reliability Coefficients

N of Cases = 36.0

Alpha = .7126

N of Items = 4

Hasil analisis menunjukkan nilai Validitas (*Corrected Item-Total Correlation*) untuk sub variabel Kelancaran Dalam Penegakkan Hukum seluruhnya lebih besar dari 0,300 yang menjadi batasan minimal Validity.

Sementara nilai Reliability yang diperoleh sebesar 0,7126; nilai ini lebih besar dari 0,700 yang menjadi batasan minimal Reliability sekelompok data. Berdasarkan pada hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa sub variabel Kelancaran Dalam Penegakkan Hukum sudah memenuhi syarat dan dapat dinyatakan Valid dan Reliabel.

• Sub Variabel Efektivitas dan Efisien Dalam Penggunaan Kekuatan

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Item-total Statistics

Item Deleted	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if
Y4_1	55.8333	170.2000	.4897	.9439
Y4_2	55.5000	168.6571	.4995	.9440
Y4_3	55.7500	162.0214	.8543	.9375
Y4_4	56.1111	161.5873	.8491	.9375
Y4_5	55.8056	163.9325	.7055	.9400
Y4_6	55.8056	164.9611	.5863	.9426
Y4_7	55.6389	168.9230	.5754	.9423
Y4_8	55.3889	167.5587	.5456	.9431
Y4_9	55.7500	169.7929	.7560	.9402
Y4_10	55.7222	166.7206	.6937	.9403
Y4_11	56.1389	169.2659	.4753	.9445
Y4_12	55.6389	160.1230	.8213	.9378

Y4_13	55.6389	171.7802		
Y4_14	55.6389	163.8944	.6248	
Y4_15	55.6389	166.5802	.7384	.9418
Y4_16	55.8333	171.8571	.6966	.9394
Y4_17	55.5556	161.3397	.5591	.9403
Y4_18	55.5556	164.0825	.7984	.9425
Y4_19	55.5556	160.8825	.7566	.9383
			.7562	.9392
				.9390

Reliability Coefficients
 N of Cases = 36.0
 Alpha = .9437

N of Items = 19

Hasil analisis menunjukkan nilai Validitas (*Corrected Item-Total Correlation*) untuk sub variabel Efektivitas dan Efisien Dalam Penggunaan Kekuatan seluruhnya lebih besar dari 0,300 yang menjadi batasan minimal Validity.

Sementara nilai Reliability yang diperoleh sebesar 0,9437; nilai ini lebih besar dari 0,700 yang menjadi batasan minimal Reliability sekelompok data. Berdasarkan pada hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa sub variabel Efektivitas dan Efisien Dalam Penggunaan Kekuatan sudah memenuhi syarat dan dapat dinyatakan Valid dan Reliabel.

• **Sub Variabel Efektivitas dan Efisiensi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut**

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)
 Item-total Statistics

Item	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Deleted
Y5_1	3.0833	1.1071	.6911.	
Y5_2	3.1111	1.3587	.6911.	

Reliability Coefficients
 N of Cases = 36.0
 Alpha = .8148

N of Items = 2

Hasil analisis menunjukkan nilai Validitas (*Corrected Item-Total Correlation*) untuk sub variabel Efektivitas dan Efisiensi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut seluruhnya lebih besar dari 0,300 yang menjadi batasan minimal Validity.

Sementara nilai Reliability yang diperoleh sebesar 0,8148; nilai ini lebih besar dari 0,700 yang menjadi batasan minimal Reliability sekelompok data. Berdasarkan pada hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa sub variabel Efektivitas dan Efisiensi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut sudah memenuhi syarat dan dapat dinyatakan Valid dan Reliabel.

• **Sub Variabel Efektivitas dan Efisiensi Penegakkan Hukum**

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)
Item-total Statistics

Item	Scale Mean if Deleted	Scale Variance if Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Deleted
Deleted	Deleted	Deleted	Correlation	
Y6_1	5.9444	4.3397	.6388	.7198
Y6_2	5.9722	2.8278	.6130	.7903
Y6_3	6.3611	3.8944	.7075	.6407

Reliability Coefficients
N of Cases = 36.0
Alpha = .7860
N of Items = 3

Hasil analisis menunjukkan nilai Validitas (*Corrected Item-Total Correlation*) untuk sub variabel Efektivitas dan Efisiensi Penegakkan Hukum seluruhnya lebih besar dari 0,300 yang menjadi batasan minimal Validity.

Sementara nilai Reliability yang diperoleh sebesar 0,7860; nilai ini lebih besar dari 0,700 yang menjadi batasan minimal Reliability sekelompok data. Berdasarkan pada hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa sub variabel Efektivitas

dan Efisiensi Penegakkan Hukum sudah memenuhi syarat dan dapat dinyatakan Valid dan Reliabel.

B. UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS PER VARIABEL

• Variabel Kebijakan TNI AL

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA) Item-total Statistics

Item	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Deleted
X1_1	7.9458	1.4101	.7672	
X1_2	8.3525	1.2597	.4945	.6060
X1_3	7.5561	1.5213	.7545	.9520
Reliability Coefficients				.6404
N of Cases =	36.0			
Alpha =	.7961		N of Items =	3

Hasil analisis menunjukkan nilai Validitas (*Corrected Item-Total Correlation*) untuk variabel Kebijakan TNI AL seluruhnya lebih besar dari 0,300 yang menjadi batasan minimal Validity.

Sementara nilai Reliability yang diperoleh sebesar 0,7961; nilai ini lebih besar dari 0,700 yang menjadi batasan minimal Reliability sekelompok data. Berdasarkan pada hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel Kebijakan TNI AL sudah memenuhi syarat dan dapat dinyatakan Valid dan Reliabel.

• Variabel Potensi Pangkalan TNI AL

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA) Item-total Statistics

Item	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Deleted
------	----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Deleted	Deleted	Deleted	Correlation	
X2_1	6.8056	2.0828	.6768	
X2_2	6.6625	1.6176	.7768	.7504
X2_3	6.8014	1.4414	.5937	.6106
Reliability Coefficients				.8562
N of Cases = 36.0				
Alpha = .8071				
				N of Items = 3

Hasil analisis menunjukkan nilai Validitas (*Corrected Item-Total Correlation*) untuk variabel Potensi Pangkalan TNI AL seluruhnya lebih besar dari 0,300 yang menjadi batasan minimal Validity.

Sementara nilai Reliability yang diperoleh sebesar 0,8071; nilai ini lebih besar dari 0,700 yang menjadi batasan minimal Reliability sekelompok data.

Berdasarkan pada hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel Potensi Pangkalan TNI AL sudah memenuhi syarat dan dapat dinyatakan Valid dan Reliabel.

• **Variabel Keberhasilan Penyelenggaraan Fungsi Operasi**

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)
Item-total Statistics

Item	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Deleted
Y1	16.0231	10.0643	.6468	
Y2	15.8547	8.7102	.6892	.8013
Y3	15.9867	9.8059	.5734	.7834
Y4	16.2178	9.5617	.6353	.8088
Y5	16.2158	7.7300	.7248	.7976
Y6	16.2672	9.6224	.4289	.7760
Reliability Coefficients				.8422
N of Cases = 36.0				
Alpha = .8300				
				N of Items = 6

Hasil analisis menunjukkan nilai Validitas (*Corrected Item-Total Correlation*) untuk variabel Efektivitas dan Keberhasilan Penyelenggaraan Fungsi Operasi seluruhnya lebih besar dari 0,300 yang menjadi batasan minimal Validity.

Sementara nilai Reliability yang diperoleh sebesar 0,83000; nilai ini lebih besar dari 0,700 yang menjadi batasan minimal Reliability sekelompok data. Berdasarkan pada hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel Keberhasilan Penyelenggaraan Fungsi Operasi sudah memenuhi syarat dan dapat dinyatakan Valid dan Reliabel.

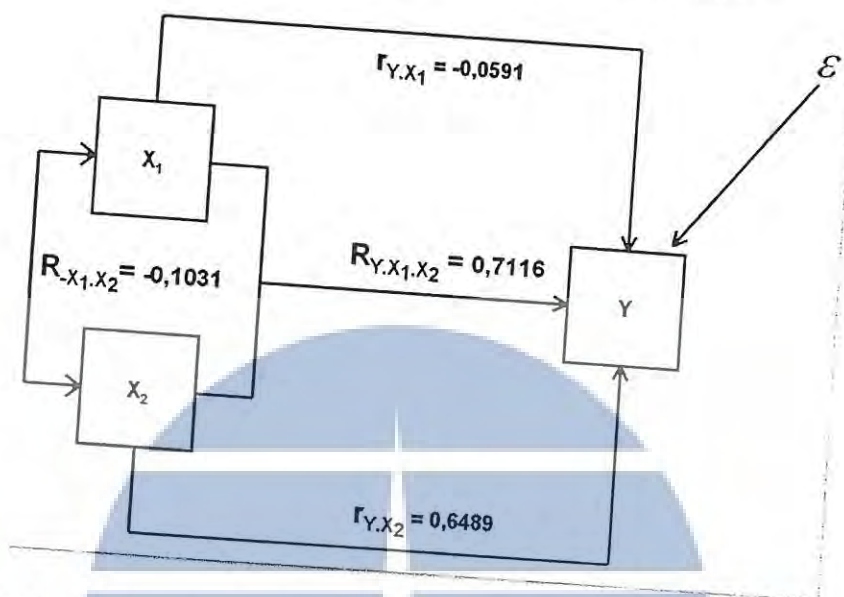
Pada pengukuran korelasi dari variabel-variabel yang diteliti dapat diperoleh gambaran tentang kuatnya hubungan seperti tergambar pada Tabel-82 di bawah ini.

Tabel – 82
Rekapitulasi Nilai Variabel Yang Dikorelasikan

Variabel Yang Dikorelasikan	r hitung	r tabel	Keterangan	r^2
R_{y-x_1}	-0,0591	0,329	Sangat Rendah	0,35 %
R_{y-x_2}	0,6489	0,329	Kuat	42,11 %
$R_{-x_1 \cdot x_2}$	-0,1031	0,329	Sangat Rendah	1,06 %
$R_{y-x_1 \cdot x_2}$	0,7116	-	Kuat	50,64 %

Keterangan :
 r^2 = Koeffisien Determinasi

Gambar - 03
Besaran Koefisien Korelasi Antar Variabel



Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka hipotesis yang penulis ajukan dapat dinyatakan sebagai berikut :

- Tidak terdapat hubungan positif dan signifikan antara kebijakan dengan keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi. Artinya, bahwa hipotesis yang penulis ajukan **ditolak**.
- Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara potensi pangkalan dengan keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi. Artinya, bahwa hipotesis yang penulis ajukan **dapat diterima**.
- Terdapat hubungan positif tetapi tidak signifikan antara kebijakan dan potensi pangkalan secara bersama-sama dengan keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi. Artinya, bahwa hipotesis yang penulis ajukan **dapat diterima**.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas kemudian dikaitkan dengan perkembangan lebih lanjut dari penjabaran tugas pokok TNI AL yang semakin

berat dalam menegakkan hukum dan kedaulatan negara di perairan yurisdiksi nasional, maka korelasivitas kebijakan-kebijakan yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi harus terus dioptimalkan terutama dalam mendukung terselenggaranya fungsi pangkalan sebagai salah satu unsur SSAT (Sistem Senjata Armada Terpadu). Artinya, bahwa penyelenggaraan fungsi operasi tidak hanya berupa pelaksanaan peraturan yang bersifat tetap (Jukklak, Juknis, PDD, PHST, dan lain-lain) dan prosedur atau mekanisme tetap. Namun hendaknya setiap kebijakan pimpinan dalam hal ini Kepala Staf TNI AL (Kasal) untuk setiap saat harus diindahkan dan diakomodasikan serta dipadukan dengan peraturan yang bersifat tetap tersebut. Sedangkan potensi pangkalan itu sendiri dapat dikatakan sudah cukup memadai dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi, bila dilihat dari hubungan yang kuat dan signifikan dari potensi pangkalan dengan keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi.

Bila dilihat dari hubungan kebijakan dan potensi pangkalan secara bersama-sama dengan keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi yang memiliki korelasivitas 'kuat' dan signifikan (dapat digeneralisasikan), maka dapatlah ditafsirkan bahwa implementasi kebijakan pimpinan pada masing-masing pangkalan belum dapat diinterpretasikan dengan cepat, tepat, baik dan murah secara merata pada seluruh pangkalan TNI AL. Potensi pangkalan yang ada belum dapat diadopsi dan diakomodasi secara optimal dengan kebijakan yang tepat guna dan berhasil guna. Komunikasi antara pimpinan TNI AL dengan pangkalan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan fungsi operasi terutama dalam penyelenggaraan operasi Kamla masih perlu terus dioptimalkan sehingga

dapat tercipta KISS ME (Koordinasi, Integrasi, Simplifikasi, Sinkrosinasi, dan Mekanisasi) antara Pusat (Mabes TNI AL) dan Daerah (Pangkalan TNI AL). Namun secara pragmatis dapatlah dikatakan bahwa teori Micheal F. Porter dan teori Roberth Moss Kanter telah teruji "valid" dan "shahih". Artinya, bahwa pada satu sisi teori Michael F. Porter memberikan sifat keberagaman, ekonomis dan demokratis. Sedangkan pada sisi lain situasi dan kondisi organisasi tugas TNI AL bersifat mengedepankan seragam, efektif dan otoriter, sehingga diperoleh statu kesimpulan bahwa pengujian teori kebijakan dari Michael F. Porter pada studi kasus di organisasi tugas TNI AL dapat menunjukkan ke"shahih"annya dan "establish/valid". Demikian pula teori Roberth Moss Kanter menunjukkan ke"shahih"annya dan "established/valid" atau dapat digunakan baik untuk lingkungan swasta maupun militer, artinya bahwa pengembangan potensi pangkalan sudah mengacu pada konsep "3C".





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Dari hasil pembahasan di bab IV dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan negatif dan lemah (tidak signifikan) antara variabel kebijakan dengan variabel keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi (-0,0591). Sedangkan kontribusi yang diberikan oleh variabel kebijakan kepada variabel keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi adalah sebesar 0,35%.
2. Terdapat hubungan positif dan kuat (signifikan) antara variabel potensi pangkalan dengan variabel keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi (0,6489). Sedangkan kontribusi yang diberikan oleh variabel potensi pangkalan kepada variabel keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi adalah sebesar 42,11 %.
3. Terdapat hubungan negatif dan lemah (tidak signifikan) antara variabel kebijakan dengan variabel potensi pangkalan (-0,1031). Sedangkan kontribusi yang diberikan oleh variabel kebijakan kepada variabel potensi pangkalan adalah sebesar 1,06 %.
4. Terdapat hubungan positif dan kuat (signifikan) antara variabel kebijakan dan variabel potensi pangkalan secara bersama dengan keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi (0,7116). Sedangkan kontribusi yang diberikan oleh variabel kebijakan dan variabel potensi

pangkalan secara bersama-sama kepada variabel keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi adalah sebesar 50,64 %.

B. Saran.

1. Untuk mencapai keberhasilan yang optimal dalam penyelenggaraan fungsi operasi, maka variabel kebijakan dan variabel potensi pangkalan perlu ditingkatkan, termasuk sinkronisasi kebijakan pemimpin TNI AL yang terus menerus berkembang dengan kebijakan yang telah diimplementasikan dalam bentuk Perintah Harian Bersifat Tetap (PHST) dan Peraturan Umum Dinas Dalam (PUDD) yang ada pada setiap Pangkalan TNI AL.
2. Pada variable kebijakan perlu prioritas untuk diperhatikan dan ditingkatkan, agar keberhasilan fungsi operasi dapat tercapai dengan optimal, terutama pada aspek kebijakan yang terkait dengan fungsi Pangkalan TNI AL dihadapkan dengan fungsi penegakan hukum oleh TNI AL.
3. Untuk mengembangkan Ilmu Administrasi Publik khususnya yang terkait dengan aspek kebijakan dalam suatu organisasi militer perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

-oOo-



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi (1993). **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Jakarta : Rineka Cipta
- Irawan, Prasetya (2005). **Logika dan Prosedur Penelitian**, Jakarta : STIA-LAN Press.
- _____ (2006). **Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial**, Jakarta : DIA FISIP UI.
- Frederickson, H. George Frederickson (1994). **Administarsi Negara Baru**, Jakarta : LP3ES, Cet. Keempat, Februari.
- Kenter, Rosabeth. M (1992). **World Class**, Simon & Schuster, Inc.
- _____ (1997). **Organization On The Future**, Simon & Schuster, Inc.
- Korten, C. David (1990). **Getting To The Twenty First Century : Voluntary Action And The Global Agenda**, Suite 119 West Hartford, Connecticut 061101529 USA : Kumarian Press.
- Osborne David & Gaebler. T (1992). **Reinventing Government : How Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector**, New York : Phime.
- Osborne. D & Plastrik. P (1996). **Banishing Bureucracy The Five Strategies For Re Inventing Government**, Massachusset : Addison – Wesley Publishing Company.
- Porter, Michael. E (1990). **The Competitive Advantage Of Nations**, New York : The Free Press.
- Savas, Es (1987). **Privatization : The Key To Better Government**, New Jersey : Chatham House Publishers, Ltd.
- Siagian, S.P.(1983). **Filsafat Administrasi**, Jakarta : Gunung Agung, Cet. Keduabelas.
- Suradinata, Ermaya (1993). **Kebijaksanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah**, Bandung : Ramadan.
- _____ (1998). **Administrasi Lingkungan dan Ekologi Pemerintahan Dalam Pembangunan**, Bandung : Ramadan.
- _____ (1999). **Filsafat dan Metodologi Ilmu Pemerintahan**, Bandung : Ramadan.

- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi, 1989. **Metode Penelitian Survei**, Jakarta : LP3ES.
- Silalahi, Ulbert (2002). *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, Bandung : Sinar Baru Algesindo, Cet. Keempat.
- Subagyo Joko (1991). **Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek**, Jakarta : Bina Cipta.
- Sugiono (1991). **Metode Penelitian Administrasi**, Bandung : Alfabeta.
- Sumitro (1985). **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta : YOI.
- Terry, G.R (1993). **The Principles Of Management**, Illinois Richard D. Darwin : Homeword.
- Thoha, Miftah (1984). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta : CV. Rajawali, Cet. Pertama..
- Waldo, Dwight (1984). *Public Adminitration*, Jakarta : Aksara Baru, Cet. Keempat.
- Dokumen-Dokumen :**
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang **Pemerintahan Daerah**.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang **Tentara Nasional Indonesia**
- Doktrin TNI AL - Eka Sasana Jaya
- Doktrin TNI AL – Trisila TNI AL.



Lampiran-1

Nomor :/IV/2006/Khusus
Hal : Pengisian Angket
Lampiran : 1 (satu) berkas

Jakarta, April 2006

Kepada : Yth.

Bapak/Ibu/Sdr

.....

di
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan Kebijakan TNI AL, peneliti bermaksud menyebarkan angket (terlampir) dan mengharapkan sekali kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisinya.

Mengingat data yang diperlukan tersebut itu sangat besar artinya bagi pengambilan keputusan oleh Pemimpin TNI AL, maka peneliti sekali lagi mengharapkan bahwa dalam pengisian angket ini dilakukan sesuai dengan keadaan yang **sebenarnya**, dan kerahasiaan atau informasi yang Bapak/Ibu berikan dijamin oleh peneliti. Perlu diketahui pula bahwa angket ini hanya dipergunakan untuk penelitian semata-mata dan tidak dipublikasikan.

Atas perhatian dan kesediaan serta bantuan Bapak/Ibu peneliti mengucapkan terima kasih.

Jakarta, April 2006

Terima Kasih

Peneliti

PETUNJUK PENGISIAN

1. Mohon dijawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan situasi yang sebenarnya, dengan cara memberi tanda silang (X) pada kolom jawaban-jawaban yang telah tersedia. Kriteria pilihan jawaban pada kolom 'A' bila pendapat Bapak/Ibu terhadap masalah yang ditanyakan memiliki kualifikasi "Selalu", Kolom 'B' bila berkualifikasi "Sering", Kolom 'C' bila berkualifikasi "Kadang-Kadang", Kolom 'D' bila berkualifikasi "Tidak Pernah" dan Kolom 'E' bila berkualifikasi "Tidak Tahu".
2. Mengingat data yang bersangkutan sangat besar artinya bagi peneliti, maka dimohon dalam pengisian angket ini dilakukan secara benar dan sesuai dengan kenyataan yang ada.
3. Kerahasiaan akan jawaban responden terjamin sepenuhnya

Terima Kasih

ANGKET PENELITIAN TERTUTUP
TENTANG
KEBIJAKAN KASAL BIDANG ORGANISASI PANGKALAN TNI AL

Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom disebelah kanan kolom pertanyaan yang sesuai dengan jawaban dimaksudkan, yaitu sebagai berikut :

1. Kolom A menyatakan : Selalu
2. Kolom B menyatakan : Sering
3. Kolom C menyatakan : Kadang-kadang
4. Kolom D menyatakan : Tidak Pernah
5. Kolom E menyatakan : Tidak Tahu

DAFTAR PERTANYAAN

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN				
		A	B	C	D	E
	VARIABEL X-1					
1.	Apakah Peraturan Dinas Dalam maupun peraturan lainnya terutama yang mengatur pencapaian tujuan pangkalan, <i>sudah sesuai dengan potensi atau kemampuan yang dimiliki Pangkalan ?</i>					
2.	Apakah Peraturan Dinas Dalam maupun peraturan lainnya yang mengatur pencapaian tujuan pangkalan, <i>sudah mampu mengakomodasi kebutuhan pangkalan ?</i>					
3.	Apakah Peraturan Dinas Dalam maupun peraturan lainnya yang mengatur pencapaian tujuan pangkalan, <i>sudah sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu inginkan ?</i>					
4.	Apakah Peraturan Dinas Dalam maupun peraturan lainnya yang mengatur pencapaian tujuan pangkalan, <i>sudah sesuai dengan karakteristik wilayah pangkalan dimana Bapak/Ibu tinggal ?</i>					
5.	Apakah Peraturan Dinas Dalam maupun peraturan lainnya yang mengatur pencapaian tujuan pangkalan, <i>sudah sesuai dengan karakteristik fungsi pangkalan dimana Bapak/Ibu bertugas ?</i>					
6.	Apakah Peraturan Dinas Dalam maupun peraturan lainnya yang mengatur pencapaian tujuan pangkalan, <i>sudah sesuai dengan kondisi wilayah ?</i>					
7.	Apakah Peraturan Dinas Dalam maupun					

	peraturan lainnya yang mengatur pencapaian tujuan pangkalan, <i>mampu terjangkau dan sesuai dengan kemampuan pembiayaan pangkalan ?</i>				
8.	Apakah Peraturan Dinas Dalam maupun peraturan lainnya yang mengatur pencapaian tujuan pangkalan, <i>mudah dipahami dan dilaksanakan ?</i>				
9.	Apakah Peraturan Dinas dalam maupun peraturan lainnya yang mengatur pencapaian tujuan pangkalan, memiliki standar-standar tertentu sehingga mudah atau gampang dipahami dan dinalisis untuk dihitung untung ruginya bagi kepentingan Bapak/Ibu sebagai Komandan Pangkalan ?				
	VARIABEL X-2				
10.	Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah potensi pangkalan menjadi bahan pertimbangan dalam program pengembangan wilayah kerja laut ?				
11.	Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah potensi pangkalan digunakan sebagai dasar perencanaan pembiayaan pangkalan?				
12.	Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah dalam pengembangan potensi pangkalan melibatkan segenap potensi pihak-pihak lain yang terkait ?				
13.	Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah dalam pengembangan potensi pangkalan menggunakan program pola kemitraan dengan pihak-pihak lain yang terkait ?				
14.	Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah potensi pangkalan yang ada dapat diberdayakan sebagai modal dasar dalam membangun kepercayaan masyarakat/instansi lainnya dalam sektor pengamanan dan keamanan wilayah laut ?				
15.	Apakah dengan potensi pangkalan yang dimiliki				

	saat ini, Bapak/Ibu sudah mendengar akan ada rencana dan atau aturan baru sebagai suatu kebijakan dari pusat yang bersifat antisipatif ?					
16.	Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah dalam pengelolaan potensi pangkalan yang dimiliki pangkalan saat ini sudah didukung oleh kemampuan administratif yang baik ?					
17.	Apakah persepsi Bapak/Ibu terhadap kemampuan Pusat (Mabesal) saat ini dalam mengembangkan potensi pangkalan sudah baik dan handal serta aspiratif?					
18.	Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah pihak Pusat (Mabesal) pernah merespon usulan pangkalan sesuai dengan potensi dan karakteristik pangkalan ?					
19.	Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah tingkat pendidikan anggota pangkalan pada umumnya cukup memadai?					
20.	Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah pelayanan publik yang dilakukan Pangkalan cukup memadai?					
21.	Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah dengan potensi pangkalan yang dimiliki saat ini dapat meningkatkan hubungan baik dengan pihak lainnya yang terkait termasuk Masyarakat, Pemuda dan Alim Ulama?					
22.	Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah dengan potensi pangkalan yang dimiliki saat ini dapat meningkatkan hubungan yang baik antara Pangkalan dengan pihak swasta?					
23.	Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah dengan potensi pangkalan yang dimiliki saat ini dapat mempermudah dan memperlancar hubungan dengan pihak Pemerintah Daerah?					

VARIABEL Y						
24.	Menurut Bapak/Ibu, Apakah penggunaan kemampuan intelmar khususnya dalam operasi <i>penyelidikan</i> bidang maritim selalu berjalan lancar ?					
25.	Menurut Bapak/Ibu, Apakah penggunaan kemampuan intelmar khususnya dalam operasi <i>pengamanan</i> bidang maritim selalu berjalan lancar ?					
26.	Manurut Bapak/Ibu, Apakah penggunaan kemampuan intelmar khususnya dalam operasi <i>penggalangan</i> selalu berjalan lancar ?					
27.	Menurut Bapak/Ibu, Apakah penggunaan <i>kemampuan operasi pertahanan</i> maritim yang diselenggarakan selalu berjalan lancar ?					
28.	Menurut pendapat Bapak/Ibu, Apakah penggunaan <i>kemampuan operasi keamanan</i> maritime yang diselenggarakan selalu berjalan lancar ?					
29.	Menurut pendapat Bapak/Ibu, Apakah penggunaan <i>kemampuan dukungan</i> operasi yang diselenggarakan selalu berjalan lancar ?					
30.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah dalam <i>latihan operasi matra</i> yang diselenggarakan selalu berjalan lancar ?					
31.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah dalam <i>latihan operasi gabungan</i> yang diselenggarakan selalu berjalan lancar					
32.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah dalam <i>latihan bersama dan meeting dengan Negara-negara sahabat</i> selalu berjalan lancar ?					
33.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah dalam penggunaan kekuatan berupa penyelenggaraan					

	operasi penyekatan di perairan selalu berjalan lancar ?					
34.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah dalam penggunaan kekuatan berupa penyelenggaraan operasi pengamanan pantai selalu berjalan lancar ?					
35.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah <i>dalam penggunaan kekuatan berupa penyelenggaraan operasi di perairan</i> selalu berjalan lancar ?					
36.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah <i>dalam penggunaan kekuatan berupa penyelenggaraan Operasi penanggulangan illegal fishing dan illegal logging serta melaksanakan operasi bantuan kemanusiaan dalam bentuk operasi Pasar Berjalan (Mobile Market) di pulau-pulau terluar/terpencil,</i> selalu berjalan lancar ?					
37.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah <i>dalam penggunaan kekuatan berupa penyelenggaraan operasi pengamanan di wilayah perbatasan,</i> selalu berjalan lancar ?					
38.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah <i>dalam penggunaan kekuatan berupa penyelenggaraan operasi terhadap perompakan di laut, penyelundupan dan imigran gelap,</i> selalu berjalan lancar ?					
39.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah <i>dalam penggunaan kekuatan berupa penyelenggaraan operasi pengamanan ALKI,</i> selalu berjalan lancar ?					
40.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah dalam penggunaan kekuatan berupa penyelenggaraan operasi Kamla, selalu berjalan lancar ?					
41.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah dalam penggunaan kekuatan berupa penyelenggaraan operasi penanggulangan Bencana Alam, selalu berjalan lancar ?					

42.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah dalam penggunaan kekuatan <i>berupa penyelenggaraan operasi muhibah</i> , selalu berjalan lancar ?					
43.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah dalam pemberdayaan wilayah pertahanan laut <i>berupa upaya mewujudkan lingkungan maritim yang kondusif dalam mendukung tugas pokok pangkalan</i> , selalu berjalan lancar ?					
44.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah dalam pemberdayaan wilayah pertahanan laut <i>berupa upaya</i> memberikan pertimbangan dan perbantuan kepada pemerintah dalam penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung., selalu berjalan lancar ?					
45.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah dalam penegakkan hukum <i>berupa upaya meningkatkan Gakkum dan Gaklat di laut</i> , selalu berjalan lancar ?					
46.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah dalam penegakkan hukum <i>berupa upaya meningkatkan koordinasi instansi Kamla dengan pihak terkait</i> , selalu berjalan lancar ?					
47.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah dalam penegakkan hukum <i>berupa upaya memaksimalkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait</i> , selalu berjalan lancar ?					
48.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah dalam penegakkan hukum <i>berupa upaya memberikan bantuan hukum</i> , selalu berjalan lancar ?					
49.	Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah dalam penggunaan kemampuan intelmar berupa kemampuan operasi <i>penyelidikan</i> bidang maritim dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan ?					

50.	Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah dalam penggunaan kemampuan intelmar berupa kemampuan operasi <i>pengamanan</i> bidang maritim dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan ?						
51.	Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah dalam penggunaan kemampuan intelmar berupa kemampuan operasi <i>penggalangan</i> bidang maritim dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan ?						
52.	Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah dalam penggunaan kemampuan operasi <i>pertahanan</i> bidang maritim dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan ?						
53.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah dalam penggunaan kemampuan operasi <i>keamanan</i> bidang maritim dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan ?						
54.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah dalam penggunaan <i>kemampuan dukungan dalam penyelenggaraan suatu operasi</i> maritim dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan ?						
55.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah dalam penyelenggaraan <i>latihan operasi matra</i> dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan ?						
56.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah dalam penyelenggaraan <i>latihan operasi gabungan</i> dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan ?						
57.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah dalam penyelenggaraan <i>latihan bersama dan meeting dengan Negara-negara sahabat</i> dapat dicapai						

	dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan ?					
58.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah dalam <i>penggunaan kekuatan berupa penyelenggaraan operasi penyekatan di perairan</i> dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan ?					
59.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah <i>dalam penggunaan kekuatan berupa penyelenggaraan operasi pengamanan pantai</i> dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan ?					
60.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah <i>dalam penggunaan kekuatan berupa penyelenggaraan operasi di perairan</i> dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan ?					
61.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah <i>dalam penggunaan kekuatan berupa penyelenggaraan Operasi penanggulangan illegal fishing dan illegal logging serta melaksanakan operasi bantuan kemanusiaan dalam bentuk operasi Pasar Berjalan (Mobile Market) di pulau-pulau terluar/terpencil</i> , dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan ?					
62.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah <i>dalam penggunaan kekuatan berupa penyelenggaraan operasi pengamanan di wilayah perbatasan</i> , dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan ?					
63.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah <i>dalam penggunaan kekuatan berupa penyelenggaraan operasi terhadap perompakan di laut, penyelundupan dan imigran gelap</i> , dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan ?					

64.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah <i>dalam penggunaan kekuatan berupa penyelenggaraan operasi pengamanan ALKI</i> , dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan ?					
65.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah <i>dalam penggunaan kekuatan berupa penyelenggaraan operasi Kamla</i> , dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan ?					
66.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah <i>dalam penggunaan kekuatan berupa penyelenggaraan operasi penanggulangan Bencana Alam</i> , dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan ?					
67.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah <i>dalam penggunaan kekuatan berupa penyelenggaraan operasi muhibah</i> , dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan ?					
68.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah <i>dalam pemberdayaan wilayah pertahanan laut berupa upaya mewujudkan lingkungan maritim yang kondusif dalam mendukung tugas pokok pangkalan</i> , dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan ?					
69.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah <i>dalam pemberdayaan wilayah pertahanan laut berupa upaya memberikan pertimbangan dan perbantuan kepada pemerintah dalam penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung</i> , dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan ?					
70.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah <i>dalam penegakkan hukum berupa upaya meningkatkan Gakkum dan Gaklat di laut</i> , dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai					

	waktu yang telah ditentukan ?					
71.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah dalam penegakkan hukum berupa upaya memaksimalkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan ?					
72.	Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah dalam penegakkan hukum berupa upaya memberikan bantuan hukum, dapat dicapai dengan biaya minimal dan waktu pencapaian sesuai waktu yang telah ditentukan ?					

Terima Kasih

Jakarta, April 2006

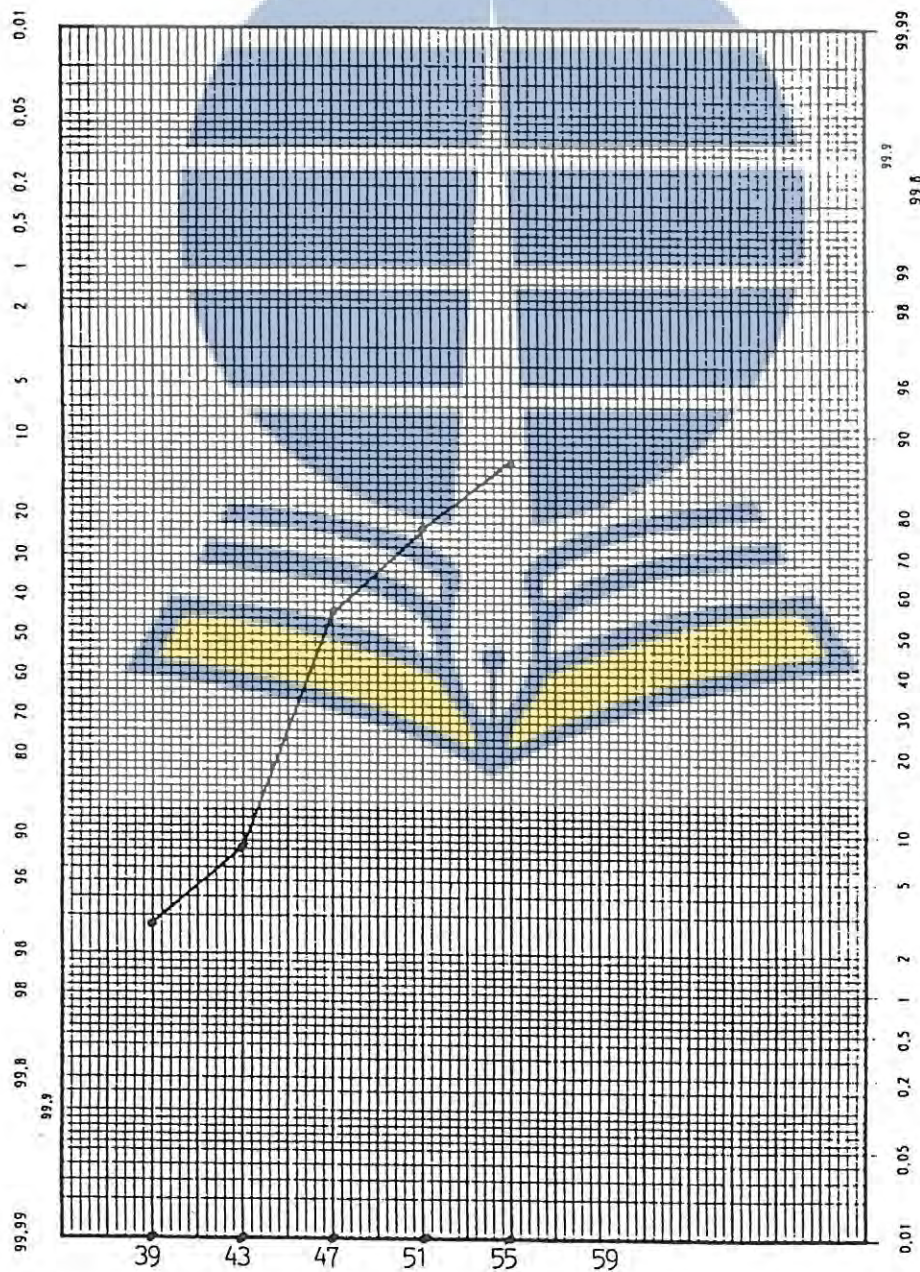
Peneliti

Sudirman
014287364

Lampiran-2

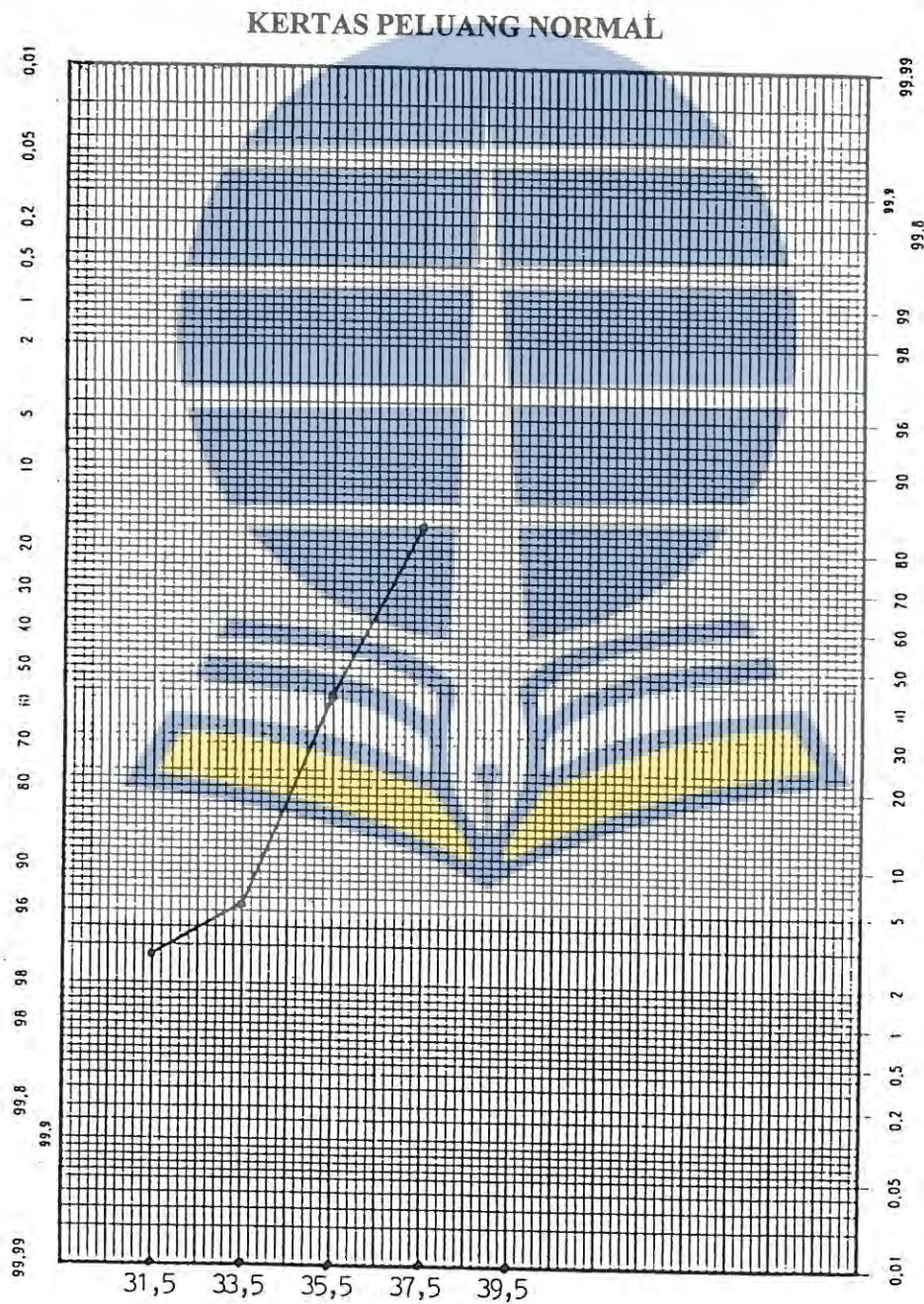
Tabel-AA
**HASIL PENGUJIAN NORMALISASI DATA
 DISTRIBUSI FREKUENSI KOMULATIF RELATIF
 POTENSI PANGKALAN**

KURANG DARI	F KOMULATIF	F (%)
39	1	2,8
43	3	8,3
47	20	55,6
51	28	77,8
55	31	86,1
59	36	100,0

KERTAS PELUANG NORMAL

Tabel-BB
HASIL PENGUJIAN NORMALISASI DATA
DISTRIBUSI FREKUENSI KOMULATIF RELATIF
KEBJAKAN TNI AL

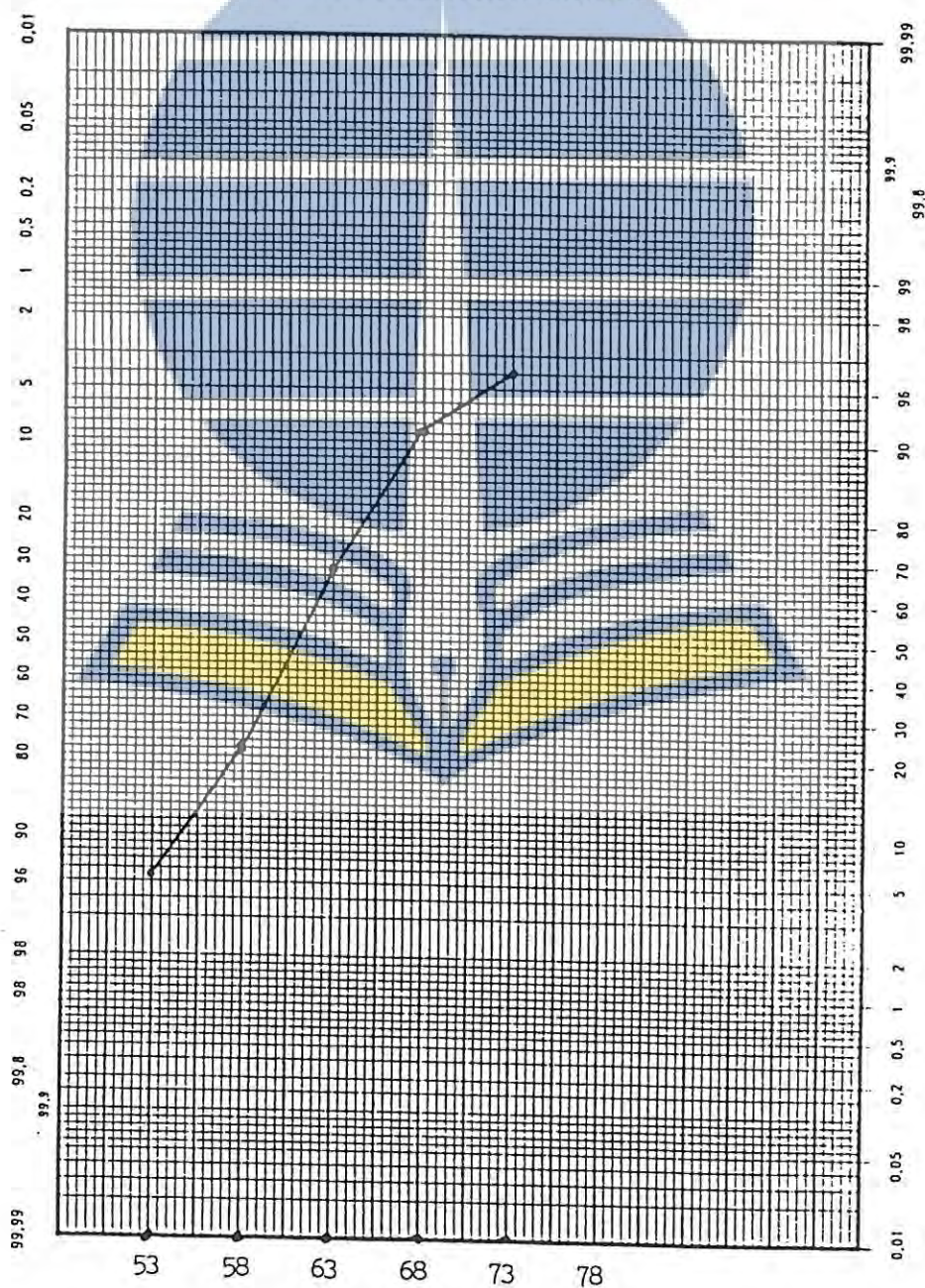
KURANG DARI	F KOMULATIF	F (%)
31,5	1	2,8
33,5	2	5,6
35,5	15	41,7
37,5	30	83,3
39,5	36	100,0



Tabel-CC
HASIL PENGUJIAN NORMALISASI DATA
DISTRIBUSI FREKUENSI KOMULATIF RELATIF
KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN FUNGSI OPRASI

KURANG DARI	F KOMULATIF	F (%)
53	2	5,6
58	8	22,2
63	25	69,4
68	33	91,7
73	35	97,2
78	36	100,0

KERTAS PELUANG NORMAL



Lampiran-3

Tabel- AA
NILAI JAWABAN RESPONDEN
ASPEK KEBIJAKAN TNI AL

RES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SKORE
1	4	3	5	3	4	2	5	4	5	35
2	3	4	4	4	5	1	5	5	4	35
3	3	4	4	5	4	3	5	4	4	36
4	4	4	4	3	4	3	5	5	4	36
5	4	4	4	4	4	2	5	4	4	35
6	3	5	4	4	5	3	5	4	4	37
7	4	4	4	4	5	2	5	4	4	36
8	5	5	4	5	3	1	5	4	4	36
9	5	4	5	3	4	3	5	5	5	39
10	5	4	3	3	4	4	5	5	3	36
11	5	4	3	3	4	4	3	4	5	35
12	3	4	5	3	4	3	5	5	5	37
13	4	4	4	4	5	3	5	5	4	38
14	3	5	3	3	4	3	3	5	5	34
15	3	5	4	5	4	3	5	4	4	37
16	4	5	3	4	4	3	4	5	3	35
17	5	4	3	4	3	4	5	4	3	35
18	4	4	5	3	3	3	3	5	5	35
19	5	5	4	4	3	3	3	5	4	36
20	3	3	4	5	5	3	5	4	4	36
21	3	3	4	5	4	2	5	4	4	34
22	5	4	3	5	4	5	3	4	5	38
23	3	3	3	5	3	4	5	4	3	33
24	4	4	5	3	2	3	5	5	5	36
25	4	3	4	4	5	3	5	4	4	36
26	4	5	3	4	4	3	4	4	3	34
27	4	5	4	4	5	3	5	4	4	38
28	3	3	4	4	5	5	4	5	4	37
29	4	4	4	5	3	1	5	5	4	35
30	4	4	5	5	4	1	5	5	5	38
31	4	3	5	5	2	3	5	4	5	36
32	4	3	5	5	2	3	5	4	5	36
33	5	5	3	4	4	1	4	5	3	34
34	5	4	3	1	2	4	5	4	3	31
35	5	3	4	4	5	5	3	5	4	38
36	4	5	3	4	4	2	5	5	3	35
TOTAL	144	145	141	143	139	104	164	161	147	1288

Sumber : Hasil Penelitian, 2006

Lampiran-4

Tabel- BB
NILAI JAWABAN RESPONDEN
ASPEK POTENSI PANGKALAN

RES	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	SKORE
1	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	44
2	2	2	5	3	3	3	5	3	3	3	5	2	3	5	47
3	1	2	4	4	4	2	4	2	3	1	3	4	4	4	42
4	2	2	3	3	4	3	5	2	4	3	2	3	2	2	38
5	3	2	4	3	2	3	4	2	4	3	2	3	3	3	41
6	1	1	4	4	3	4	3	3	5	4	4	4	3	3	46
7	3	3	3	4	3	4	4	3	4	5	2	3	2	2	45
8	4	4	4	3	2	3	3	4	4	4	3	3	4	4	49
9	2	2	5	3	4	4	5	2	5	2	3	3	4	4	44
10	3	2	3	5	2	3	4	2	4	3	2	4	4	4	45
11	2	2	4	3	4	3	5	2	3	3	4	5	3	3	46
12	3	3	4	3	3	4	4	3	4	2	2	5	5	5	50
13	4	4	5	5	5	3	3	1	4	4	4	3	2	2	49
14	4	3	3	4	2	4	4	2	5	2	3	3	2	2	43
15	3	3	4	3	4	4	3	2	5	4	5	2	1	1	44
16	3	2	4	4	2	5	3	3	2	3	4	2	3	3	43
17	3	4	5	3	3	4	4	3	4	5	5	1	4	4	52
18	3	2	3	4	1	3	4	2	4	5	5	3	2	2	43
19	2	2	4	3	4	3	3	5	3	5	3	4	2	2	45
20	3	2	4	4	3	4	4	3	4	3	3	2	2	2	43
21	3	4	3	3	2	4	4	2	5	3	3	2	3	3	44
22	3	3	5	3	2	4	3	3	2	3	3	2	4	4	44
23	4	4	5	4	3	3	3	2	3	4	4	3	3	3	48
24	3	2	3	3	1	4	4	2	4	3	3	4	5	4	45
25	2	2	5	3	4	3	5	3	3	3	3	3	3	3	45
26	4	3	4	4	2	3	3	4	2	3	3	4	4	3	46
27	3	1	5	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	48
28	3	3	5	3	4	4	3	3	5	5	5	4	5	5	57
29	3	3	5	3	2	4	3	4	2	5	5	3	5	3	50
30	5	4	4	4	4	5	5	3	3	3	3	3	5	4	55
31	3	1	5	5	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	48
32	4	2	4	5	1	3	4	2	4	3	5	5	5	5	52
33	3	4	5	3	3	4	4	4	5	3	5	3	4	5	55
34	5	4	5	3	4	5	3	3	3	4	5	4	5	5	58
35	4	3	4	5	3	3	5	3	3	5	4	4	3	4	53
36	3	3	5	3	3	4	4	3	4	5	5	3	5	5	55
TOTAL	109	96	151	128	105	130	137	99	132	125	130	116	123	121	1702

Sumber : Hasil Penelitian, 2006

Tabel-CC
NILAI JAWABAN RESPONDEN
ASPEK RELATIF TIDAK ADA HAMBATAN DALAM PENYELLENGGARAAN FUNGSI OPERASI

RES	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	SKORE
1	3	1	3	4	3	3	2	4	4	2	5	1	2	3	2	2	3	3	5	3	2	4	3	3	3	73
2	4	4	3	4	3	4	2	4	3	2	5	3	3	2	3	2	4	3	3	3	5	3	1	3	3	79
3	3	3	3	1	3	2	3	3	3	3	3	2	3	5	1	4	4	2	2	3	4	3	3	3	4	74
4	3	2	4	2	4	5	2	4	2	3	3	1	4	3	2	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	81
5	3	2	4	5	4	3	3	3	5	1	4	4	2	2	3	3	2	2	3	3	4	3	2	3	3	78
6	4	3	3	3	3	3	2	3	3	4	4	2	2	2	4	3	5	3	3	3	4	3	4	3	4	85
7	5	1	5	2	5	2	3	2	3	2	3	3	3	2	4	5	1	3	3	4	3	4	2	5	4	85
8	5	4	5	3	5	3	2	4	4	2	2	4	4	2	5	3	4	4	2	4	4	4	3	4	5	87
9	3	2	3	2	3	2	2	2	2	3	3	5	3	3	4	3	4	4	2	3	2	3	4	5	5	79
10	3	3	5	2	5	3	3	2	3	3	3	5	2	4	3	4	3	3	3	5	4	5	3	4	5	89
11	3	3	4	3	4	3	4	3	3	5	3	5	2	3	4	4	3	3	4	5	2	2	3	1	3	85
12	3	3	5	4	5	4	3	4	4	2	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	1	3	3	2	5	83
13	4	2	5	3	3	2	3	2	3	3	3	2	2	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	85
14	4	5	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	5	3	4	3	5	4	3	4	3	3	3	3	1	81
15	4	3	1	4	2	1	4	3	4	2	3	4	3	3	3	4	2	2	3	2	3	3	3	3	3	74
16	3	2	2	3	2	2	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	2	5	3	2	3	3	4	4	1	76
17	4	3	2	3	3	3	2	3	3	2	4	3	3	4	2	3	5	3	2	2	4	4	5	4	3	83
18	3	2	5	2	4	5	2	4	2	4	5	3	3	3	2	4	3	5	4	3	4	3	3	3	4	81
19	3	2	3	2	3	4	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	1	4	3	2	3	2	3	3	2	75
20	4	3	2	3	2	3	3	4	4	4	3	4	4	5	3	3	3	3	3	4	5	4	4	4	2	85
22	4	3	2	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	1	5	3	80
23	3	3	2	4	3	4	3	3	3	3	2	5	3	4	3	5	3	4	4	3	5	3	3	5	4	88
24	4	4	3	4	4	2	2	4	3	3	4	3	3	5	3	4	4	4	4	3	4	5	1	1	3	88
25	2	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	5	4	3	4	5	5	3	4	3	1	4	4	91
26	2	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	5	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	83
27	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	5	4	4	3	4	2	5	3	4	4	3	4	87
28	1	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	5	4	4	4	3	3	5	4	2	4	5	3	4	3	90
29	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3	5	4	5	4	3	3	5	3	3	3	3	4	3	3	89
30	3	3	3	4	4	4	1	3	3	3	3	4	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	85
31	4	3	2	4	4	2	2	4	4	3	4	3	5	5	3	4	3	5	3	4	5	3	3	4	5	94
32	1	2	4	5	4	5	4	4	3	1	4	5	3	4	4	3	3	3	4	3	3	2	3	5	3	81
33	2	3	3	3	3	2	2	5	3	1	5	3	4	5	3	3	3	2	3	3	4	3	3	5	4	82
34	4	2	3	2	1	2	1	4	1	2	2	1	2	2	1	4	3	4	3	3	4	2	3	3	4	70
35	4	4	3	3	3	2	1	4	5	2	4	3	5	3	3	5	3	4	3	3	4	2	4	4	4	88
36	3	5	4	2	4	3	2	5	3	3	2	4	4	2	3	3	2	3	5	4	5	3	2	4	3	85
TOTAL	117	104	118	114	109	114	104	144	117	104	127	124	121	131	119	129	110	128	117	118	131	122	110	128	119	2979

Tabel-DD
NILAI JAWABAN RESPONDEN
ASPEK PENYELLENGARAAN FUNGSI OPERASI BERJALAN EFEKTIF DAN EFISIEN

RES	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	SKORE
1	2	3	3	3	5	3	2	2	4	3	3	4	3	3	3	3	3	2	5	3	4	3	5	3	77
2	1	3	5	1	1	3	2	4	3	2	3	3	3	3	4	5	4	3	3	4	2	5	1	4	70
3	3	2	4	4	3	1	3	3	3	4	5	4	2	3	4	5	3	4	3	4	2	3	4	3	79
4	4	1	3	4	1	2	2	5	5	3	1	2	4	5	3	5	5	3	3	4	5	4	4	5	81
5	2	3	3	3	3	4	4	4	3	3	2	2	5	4	2	3	3	3	3	5	4	5	1	2	76
6	2	2	3	3	3	5	2	3	3	2	1	4	3	5	3	3	3	3	4	3	5	3	1	1	70
7	2	2	3	3	3	5	2	3	3	5	3	4	3	5	3	3	3	2	5	3	5	3	5	2	80
8	3	5	2	2	4	5	3	2	4	4	3	3	2	2	4	3	4	3	3	1	2	3	1	2	70
9	4	4	1	1	2	1	3	1	3	4	1	1	4	1	4	3	3	3	3	4	1	4	3	5	62
10	3	5	4	4	1	4	2	2	3	3	3	5	3	2	4	4	3	3	3	4	2	2	1	3	70
11	4	5	4	2	3	4	2	4	3	5	1	1	3	2	4	4	3	3	3	3	2	4	3	4	74
12	3	5	3	2	4	3	4	2	2	5	3	2	5	4	4	2	5	4	1	3	5	4	1	3	79
13	4	3	4	2	4	4	2	4	3	2	3	3	3	3	4	2	4	3	3	3	5	4	1	3	79
14	3	4	3	2	3	3	4	2	2	1	3	5	4	2	4	3	4	3	5	1	3	3	3	2	72
15	3	2	4	2	3	4	2	4	4	2	4	2	2	3	2	5	3	3	3	5	3	3	2	2	72
16	4	4	3	2	4	3	4	2	3	4	2	2	3	2	3	2	5	3	3	2	2	3	3	3	77
17	5	3	4	2	4	4	3	2	2	3	1	3	3	3	5	2	3	4	3	4	2	5	3	3	76
18	3	4	2	2	3	2	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	2	4	73
19	4	3	1	3	3	1	4	4	2	2	2	2	4	3	3	3	5	3	3	3	4	3	3	4	76
20	4	3	3	4	4	3	5	3	2	4	1	4	3	3	1	2	1	4	3	1	4	3	4	3	71
21	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	1	2	1	3	5	1	4	3	3	3	71
22	3	3	1	5	2	1	3	4	4	3	3	3	2	3	4	3	4	5	5	4	3	3	3	2	76
23	4	3	3	2	4	3	5	5	3	3	3	4	4	3	3	3	3	5	2	3	3	3	4	4	79
24	2	4	3	4	2	3	5	3	3	3	5	5	3	3	2	2	3	3	5	3	2	3	3	3	79
25	1	3	3	3	1	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	75
26	3	4	4	3	3	3	2	4	3	3	1	2	2	2	2	3	3	4	4	4	5	3	3	3	71
27	3	3	3	2	3	3	3	5	3	3	3	4	3	3	4	4	3	5	2	2	2	3	3	2	74
28	1	4	3	4	1	4	5	3	3	2	5	3	4	4	3	4	5	2	2	2	4	2	4	2	74
29	3	2	4	4	3	5	3	5	2	4	3	2	3	2	5	3	5	2	2	2	2	2	3	2	75
30	3	2	5	3	3	3	3	5	4	3	5	2	5	3	2	3	5	5	3	3	3	2	5	1	80
31	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	5	2	77
32	3	3	2	3	3	4	3	5	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	75
33	3	5	4	1	3	3	4	4	3	2	2	3	3	3	3	2	1	1	3	1	3	2	4	1	64
34	1	1	3	2	1	3	5	3	4	2	1	2	2	3	3	5	3	2	4	1	2	2	4	1	62
35	3	5	2	3	3	2	3	3	2	3	3	4	3	5	2	5	3	3	4	4	2	2	4	2	74
36	5	4	2	2	5	2	2	5	2	3	3	4	3	3	3	3	3	2	4	3	4	3	5	3	77
TOTAL	107	119	110	97	108	108	114	123	110	111	96	114	114	114	110	107	117	117	117	112	111	115	114	100	2665

Tabel-EE
NILAI JAWABAN RESPONDEN
ASPEK KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN FUNGSI OPRASI

RES	Y ₁	Y ₂	Σ
1	29	29	58
2	29	29	58
3	26	26	52
4	27	27	54
5	27	27	54
6	28	28	56
7	32	32	64
8	30	30	60
9	31	31	62
10	30	30	60
11	27	30	57
12	31	31	62
13	33	33	66
14	29	29	58
15	30	30	60
16	28	28	56
17	32	32	64
18	32	32	64
19	32	32	64
20	31	31	62
21	31	31	62
22	26	26	52
23	31	31	62
24	29	29	58
25	28	28	56
26	30	30	60
27	29	29	58
28	33	33	66
29	29	29	58
30	38	38	76
31	30	30	60
32	30	30	60
33	33	33	66
34	35	35	70
35	34	34	68
36	31	31	62
TOTAL	1095	1098	2193

Sumber : Hasil Penelitian, 2006

Lampiran-8

Tabel-FF
TABEL PENOLONG UNTUK MENGHITUNG KORELASI PRODUCT MOMENT
HUBUNGAN KEBIJAKAN TNI AL DENGAN KEBERHASILAN FUNGSI OPERASI

NO RES	X ₁ (X)	Y (Y)	(X-X ₁)	(Y-Y (Y))	X ²	Y ²	(XY)
1	35	58	-1.00	-3.00	1.00	9.00	3.00
2	35	58	-1.00	-3.00	1.00	9.00	3.00
3	36	52	0.00	-9.00	0.00	81.00	0.00
4	36	54	0.00	-7.00	0.00	49.00	0.00
5	35	54	-1.00	-7.00	1.00	49.00	7.00
6	37	56	1.00	-5.00	1.00	25.00	-5.00
7	36	64	0.00	3.00	0.00	9.00	0.00
8	36	60	0.00	-1.00	0.00	1.00	0.00
9	39	62	3.00	1.00	9.00	1.00	3.00
10	36	60	0.00	-1.00	0.0	1.00	0.00
11	35	57	-1.00	-4.00	1.00	16.00	4.00
12	37	62	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
13	38	66	2.00	-1.00	4.00	25.00	10.00
14	34	66	-2.00	5.00	4.00	25.00	-10.00
15	37	60	1.00	-1.00	1.00	1.00	-1.00
16	35	56	-1.00	-5.00	1.00	25.00	5.00
17	35	64	-1.00	3.00	1.00	9.00	-3.00
18	35	64	-1.00	3.00	1.00	9.00	-3.00
19	36	64	0.00	3.00	0.00	9.00	0.00
20	36	62	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
21	34	62	-2.00	1.00	4.00	1.00	-2.00
22	38	62	2.00	-9.00	4.00	81.00	-18.00
23	33	62	-3.00	1.00	9.00	1.00	-3.00
24	36	58	0.00	-3.00	0.00	9.00	0.00
25	36	56	0.00	-5.00	0.00	25.00	0.00
26	34	60	-2.00	-1.00	4.00	1.00	2.00
27	38	58	2.00	-3.00	4.00	9.00	-6.00
28	37	66	1.00	5.00	1.00	25.00	5.00
29	35	58	-1.00	-3.00	1.00	9.00	3.00
30	38	76	2.00	15.00	4.00	225.00	30.00
31	36	60	0.00	-1.00	0.00	1.00	0.00
32	36	6	0.00	-1.00	0.00	1.00	0.00
33	34	66	-2.00	5.00	4.00	25.00	-10.00
34	31	70	-5.00	9.00	25.00	81.00	-45.00
35	38	68	2.00	7.00	4.00	49.00	14.00
36	35	62	-1.00	1.00	1.00	1.00	-1.00
TOTAL	1288	2193	-8.00	-3.00	92.00	899.00	-17.00

Sumber : Hasil Penelitian, 2006

Tabel-GG
TABEL PENOLONG UNTUK MENGHITUNG KORELASI PRODUCT MOMENT
HUBUNGAN POTENSI PANGKALAN DENGAN KEBERHASILAN
FUNGSI OPERASI

NO RES	X ₂ (X)	Y (Y)	(X ₂ -X ₂) (X)	(Y-Y) (Y)	X ²	Y ²	(XY)
1	44	58	-3.00	-3.00	9.00	9.00	9.00
2	47	58	0.00	-3.00	0.00	9.00	0.00
3	42	52	-5.00	-9.00	25.00	81.00	45.00
4	38	54	-9.00	-7.00	81.00	49.00	63.00
5	41	54	-6.00	-7.00	36.00	49.00	42.00
6	46	56	-1.00	-5.00	1.00	25.00	5.00
7	45	64	-2.00	3.00	4.00	9.00	-6.00
8	49	60	2.00	-1.00	4.00	1.00	-2.00
9	44	62	-3.00	1.00	9.00	1.00	-3.00
10	45	60	-2.00	-1.00	4.00	1.00	2.00
11	46	57	-1.00	-4.00	1.00	16.00	4.00
12	50	62	3.00	1.00	9.00	1.00	3.00
13	49	66	2.00	5.00	4.00	25.00	10.00
14	43	66	-4.00	5.00	16.00	25.00	-20.00
15	44	60	-3.00	-1.00	9.00	1.00	3.00
16	43	56	-4.00	-5.00	16.00	25.00	20.00
17	52	64	5.00	3.00	25.00	9.00	15.00
18	43	64	-4.00	3.00	16.00	9.00	-12.00
19	45	64	-2.00	3.00	4.00	9.00	-6.00
20	43	62	-4.00	1.00	16.00	1.00	-4.00
21	44	62	-3.00	1.00	9.00	1.00	-3.00
22	44	52	-3.00	-9.00	9.00	81.00	27.00
23	48	52	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
24	45	58	-2.00	-3.00	4.00	9.00	6.00
25	45	56	-2.00	-5.00	4.00	25.00	10.00
26	46	60	-1.00	-1.00	1.00	1.00	1.00
27	48	58	1.00	-3.00	1.00	9.00	-3.00
28	57	66	10.00	5.00	100.00	25.00	50.00
29	50	58	3.00	-3.00	9.00	9.00	-9.00
30	55	76	8.00	15.00	64.00	225.00	120.00
31	48	60	1.00	-1.00	1.00	1.00	-1.00
32	52	60	5.00	-1.00	25.00	1.00	-5.00
33	55	66	8.00	5.00	64.00	25.00	40.00
34	58	70	11.00	9.00	121.00	81.00	99.00
35	53	68	6.00	7.00	36.00	49.00	42.00
36	55	62	8.00	1.00	64.00	1.00	8.00
TOTAL	1702	2193	10.00	-3.00	802.00	899.00	551.00

Sumber : Hasil Penelitian, 2006

Lampiran-10

Tabel-HH
TABEL PENOLONG UNTUK MENGHITUNG KORELASI PRODUCT MOMENT
HUBUNGAN KEBIJAKAN TNI AL DENGAN POTENSI PANGKALAN

NO RES	X ₁ (X)	X ₂ (Y)	(X ₁ -X ₁) (X)	(X ₂ - X ₂) (Y)	X ²	Y ²	(XY)
1	35	44	-1.00	-3.00	1.00	9.00	3.00
2	35	47	-1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	36	42	0.00	-5.00	0.00	25.00	0.00
4	36	38	0.00	-9.00	0.00	81.00	0.00
5	35	41	-1.00	-6.00	1.00	36.00	6.00
6	37	46	1.00	-1.00	1.00	1.00	-1.00
7	36	45	0.00	-2.00	0.00	4.00	0.00
8	36	49	0.00	2.00	0.00	4.00	0.00
9	39	44	3.00	-3.00	9.00	9.00	-9.00
10	36	45	0.00	-2.00	0.00	4.00	0.00
11	35	46	-1.00	-1.00	1.00	1.00	1.00
12	37	50	1.00	3.00	1.00	9.00	3.00
13	38	49	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00
14	34	43	-2.00	-4.00	4.00	16.00	8.00
15	37	44	1.00	-3.00	1.00	9.00	-3.00
16	35	43	-1.00	-4.00	1.00	16.00	4.00
17	35	52	-1.00	5.00	1.00	25.00	-5.00
18	35	43	-1.00	-4.00	1.00	16.00	4.00
19	36	45	0.00	-2.00	0.00	4.00	0.00
20	36	43	0.00	-4.00	0.00	16.00	0.00
21	34	44	-2.00	-3.00	4.00	9.00	6.00
22	38	44	2.00	-3.00	4.00	9.00	-6.00
23	33	48	-3.00	1.00	9.00	1.00	-3.00
24	36	45	0.00	-2.00	0.00	4.00	0.00
25	36	45	0.00	-2.00	0.00	4.00	0.00
26	34	46	-2.00	-1.00	4.00	1.00	2.00
27	38	48	2.00	1.00	4.00	1.00	2.00
28	37	57	1.00	10.00	1.00	100.00	10.00
29	35	50	-1.00	3.00	1.00	9.00	-3.00
30	38	55	2.00	8.00	4.00	64.00	16.00
31	36	48	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
32	36	52	0.00	5.00	0.00	25.00	0.00
33	34	55	-2.00	8.00	4.00	64.00	-16.00
34	31	58	-5.00	11.00	25.00	121.00	-55.00
35	38	53	2.00	6.00	4.00	36.00	12.00
36	35	55	-1.00	8.00	1.00	64.00	-8.00
TOTAL	1288	1702	-8.00	10.00	92.00	802.00	-28.00

Lampiran-11

Tabel-11
REKAPITULASI HASIL TABULASI DATA ANGGKET PENELITIAN

Sum of 1		
1	Total	Frekuensi
3	30	10
4	64	16
5	50	10
Grand Total	144	36

Sum of 2		
2	Total	Frekuensi
3	30	10
4	64	16
5	50	10
Grand Total	145	36

Sum of 1		
3	Total	Frekuensi
3	30	10
4	64	16
5	50	10
141	141	1
Grand Total	282	37

Sum of 4		
4	Total	Frekuensi
1	127	1
3	60	9
4	55	15
5		11
Grand Total	143	36

Sum of 5		
5	Total	Frekuensi
2	8	4
3	18	6
4	68	17
5	45	9
Grand Total	139	36

Sum of 6		
6	Total	Frekuensi
1	5	5
2	10	5
3	54	18
4	20	5
5	15	3
Grand Total	104	36

Sum of 7		
7	Total	Frekuensi
3	18	6
4	16	4
5	130	26
Grand Total	164	36

Sum of 8		
8	Total	Frekuensi
4	76	19
5	85	17
Grand Total	161	36

Sum of 9		
9	Total	Frekuensi
3	24	8
4	68	17
5	55	11
Grand Total	147	36

Sum of 10		
10	Total	Frekuensi
1	2	2
2	12	6
3	57	19
4	28	7
5	10	2
Grand Total	109	36

Sum of 11		
11	Total	Frekuensi
1	3	3
2	28	14
3	33	11
4	32	8
Grand Total	96	36

Sum of 12		
12	Total	Frekuensi
3	21	7
4	60	15
5	70	14
Grand Total	151	36

Sum of 13		
13	Total	Frekuensi
3	63	21
4	40	10
5	25	5
Grand Total	128	36

Sum of 14		
14	Total	Frekuensi
1	3	3
2	18	9
3	39	13
4	40	10
5	5	1
Grand Total	105	36

Sum of 15		
15	Total	Frekuensi
2	2	1
3	45	15
4	68	17
5	15	3
Grand Total	130	36

Sum of 16		
16	Total	Frekuensi
3	42	14
4	60	15
5	35	7
Grand Total	137	36

Sum of 17		
17	Total	Frekuensi
1	1	1
2	26	13
3	51	17
4	16	4
5	5	1
Grand Total	99	36

Sum of 18		
18	Total	Frekuensi
2	8	4
3	33	11
4	56	14
5	35	7
Grand Total	132	36

/ Sun of 19....

Sum of 19		
19	Total	Frekuensi
1	1	1
2	8	4
3	48	16
4	28	7
5	40	8
Grand Total	125	36

Sum of 20		
20	Total	Frekuensi
2	10	5
3	42	14
4	58	7
5	50	10
Grand Total	130	36

Sum of 21		
21	Total	Frekuensi
1	1	1
2	12	6
3	48	16
4	40	10
5	15	3
Grand Total	116	36

Sum of 22		
22	Total	Frekuensi
1	1	1
2	16	8
3	30	10
4	36	9
5	40	8
Grand Total	123	36

Sum of 23		
23	Total	Frekuensi
1	1	1
2	16	8
3	33	11
4	36	9
5	35	7
Grand Total	121	36

Sum of 24		
24	Total	Frekuensi
1	2	2
2	6	3
3	51	17
4	48	12
5	10	2
Grand Total	117	36

Sum of 25		
25	Total	Frekuensi
1	2	2
2	20	10
3	48	16
4	24	6
5	10	2
Grand Total	104	36

Sum of 26		
26	Total	Frekuensi
1	1	1
2	14	7
3	45	15
4	28	8
5	30	9
Grand Total	118	36

Sum of 27		
27	Total	Frekuensi
1	1	1
2	14	7
3	45	15
4	44	11
5	10	2
Grand Total	114	36

Sum of 28		
28	Total	Frekuensi
1	3	3
2	12	6
3	51	17
4	28	7
5	15	3
Grand Total	109	36

Sum of 29		
29	Total	Frekuensi
2	14	7
3	57	19
4	28	7
5	15	3
Grand Total	114	36

Sum of 30		
30	Total	Frekuensi
2	22	11
3	57	19
4	20	5
5	5	1
Grand Total	104	36

Sum of 31		
31	Total	Frekuensi
3	33	11
4	56	14
5	55	11
Grand Total	109	36

Sum of 32		
32	Total	Frekuensi
1	1	1
2	10	5
3	54	18
4	32	8
5	20	4
Grand Total	117	36

Sum of 33		
33	Total	Frekuensi
1	3	3
2	18	9
3	48	16
4	20	5
5	15	3
Grand Total	104	36

Sum of 34		
34	Total	Frekuensi
2	8	4
3	45	15
4	44	11
5	30	6
Grand Total	109	36

Sum of 35		
35	Total	Frekuensi
1	3	3
2	6	3
3	39	13
4	36	9
5	40	8
Grand Total	124	36

Sum of 36		
36	Total	Frekuensi
2	12	6
3	48	16
4	36	9
5	25	5
Grand Total	121	36

/ Sun of 37...

Sum of 37		
37	Total	Frekuensi
1	1	1
2	10	5
3	33	11
4	32	8
5	55	11
Grand Total	131	36

Sum of 38		
38	Total	Frekuensi
1	2	2
2	8	4
3	45	15
4	44	11
5	20	4
Grand Total	119	36

Sum of 39		
39	Total	Frekuensi
2	4	2
3	48	16
4	52	13
5	25	5
Grand Total	129	36

Sum of 40		
40	Total	Frekuensi
1	2	2
2	14	7
3	51	17
4	28	7
5	15	3
Grand Total	110	36

Sum of 41		
41	Total	Frekuensi
2	6	3
3	51	17
4	36	9
5	35	7
Grand Total	128	36

Sum of 42		
42	Total	Frekuensi
2	12	6
3	57	19
4	28	7
5	20	4
Grand Total	117	36

Sum of 43		
43	Total	Frekuensi
2	10	5
3	60	20
4	28	7
5	20	4
Grand Total	118	36

Sum of 44		
44	Total	Frekuensi
1	1	1
2	6	3
3	36	12
4	48	12
5	40	8
Grand Total	131	36

Sum of 45		
45	Total	Frekuensi
2	8	4
3	57	19
4	32	8
5	25	5
Grand Total	122	36

Sum of 46		
46	Total	Frekuensi
1	4	4
2	4	2
3	60	20
4	32	8
5	10	2
Grand Total	110	36

Sum of 47		
47	Total	Frekuensi
1	2	2
2	2	1
3	45	15
4	44	11
5	35	7
Grand Total	128	36

Sum of 48		
48	Total	Frekuensi
1	2	2
2	8	4
3	45	15
4	44	11
5	20	4
Grand Total	119	36

Sum of 49		
49	Total	Frekuensi
1	4	4
2	10	5
3	51	17
4	32	8
5	10	2
Grand Total	107	36

Sum of 50		
50	Total	Frekuensi
1	2	2
2	12	6
3	39	13
4	36	9
5	30	6
Grand Total	119	36

Sum of 51		
51	Total	Frekuensi
1	3	3
2	10	5
3	51	17
4	36	9
5	10	2
Grand Total	110	36

Sum of 52		
52	Total	Frekuensi
1	4	4
2	24	12
3	36	12
4	28	7
5	5	1
Grand Total	97	36

Sum of 53		
53	Total	Frekuensi
1	5	5
2	6	3
3	51	17
4	36	9
5	10	2
Grand Total	108	36

Sum of 54		
54	Total	Frekuensi
1	5	5
2	12	6
3	39	13
4	32	8
5	20	4
Grand Total	108	36

/ Sun of 55...

Sum of 55		
55	Total	Frekuensi
2	20	10
3	42	14
4	32	8
5	20	4
Grand Total	114	36

Sum of 56		
56	Total	Frekuensi
1	1	1
2	14	7
3	33	11
4	40	10
5	35	7
Grand Total	123	36

Sum of 57		
57	Total	Frekuensi
2	14	7
3	63	21
4	28	7
5	5	1
Grand Total	110	36

Sum of 58		
58	Total	Frekuensi
1	1	1
2	16	8
3	51	17
4	28	7
5	15	3
Grand Total	111	36

Sum of 59		
59	Total	Frekuensi
1	8	8
2	6	3
3	63	21
4	4	1
5	15	3
Grand Total	96	36

Sum of 60		
60	Total	Frekuensi
1	2	2
2	18	9
3	30	10
4	44	11
5	20	4
Grand Total	114	36

Sum of 61		
61	Total	Frekuensi
2	10	5
3	66	22
4	28	7
5	10	2
Grand Total	114	36

Sum of 62		
62	Total	Frekuensi
1	1	1
2	14	7
3	57	19
4	12	3
5	30	6
Grand Total	114	36

Sum of 63		
63	Total	Frekuensi
1	2	2
2	14	7
3	48	16
4	36	9
5	10	2
Grand Total	110	36

Sum of 64		
64	Total	Frekuensi
2	18	9
3	66	22
4	8	2
5	15	3
Grand Total	107	36

Sum of 65		
65	Total	Frekuensi
1	3	3
2	6	3
3	51	17
4	32	8
5	25	5
Grand Total	117	36

Sum of 66		
66	Total	Frekuensi
1	1	1
2	12	6
3	51	17
4	28	7
5	25	5
Grand Total	117	36

Sum of 67		
67	Total	Frekuensi
1	3	3
2	8	4
3	51	17
4	20	5
5	35	7
Grand Total	117	36

Sum of 68		
68	Total	Frekuensi
1	5	5
2	6	3
3	45	15
4	36	9
5	20	4
Grand Total	112	36

Sum of 69		
69	Total	Frekuensi
1	1	1
2	22	11
3	36	12
4	32	8
5	20	4
Grand Total	111	63

Sum of 70		
70	Total	Frekuensi
2	14	7
3	57	19
4	24	6
5	20	4
Grand Total	115	36

Sum of 71		
71	Total	Frekuensi
1	7	7
2	4	2
3	36	12
4	32	8
5	35	7
Grand Total	114	36

Sum of 72		
72	Total	Frekuensi
1	3	3
2	20	10
3	51	17
4	16	4
5	10	2
Grand Total	100	36

Lampiran-12

Tabel-JJ
NILAI-NILAI PRODUCT MOMENT

N	Taraf	Signif	N	Taraf	Signif	N	Taraf	Signif
	5%	1%		5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	26	0.388	0.496	55	0.266	0.345
4	0.95	0.99	27	0.381	0.487	60	0.254	0.33
5	0.878	0.959	28	0.374	0.478	65	0.244	0.317
			29	0.367	0.47	70	0.235	0.306
6	0.811	0.817	30	0.361	0.463	75	0.227	0.296
7	0.754	0.874						
8	0.707	0.834	31	0.355	0.456	80	0.22	0.286
9	0.666	0.798	32	0.349	0.449	85	0.213	0.278
10	0.632	0.765	33	0.344	0.442	90	0.207	0.27
			34	0.339	0.436	95	0.202	0.263
11	0.602	0.735	35	0.334	0.43	100	0.195	0.256
12	0.576	0.708						
13	0.553	0.684	36	0.329	0.424	125	0.176	0.23
14	0.532	0.661	37	0.325	0.418	150	0.159	0.21
15	0.514	0.641	38	0.32	0.413	175	0.148	0.194
			39	0.316	0.408	200	0.138	0.181
16	0.497	0.623	40	0.312	0.403	300	0.113	0.148
17	0.482	0.606						
18	0.468	0.59	41	0.308	0.398	400	0.098	0.128
19	0.456	0.575	42	0.304	0.393	500	0.088	0.115
20	0.444	0.561	43	0.301	0.389			
			44	0.297	0.384	600	0.08	0.105
21	0.433	0.549	45	0.294	0.38	700	0.074	0.097
22	0.423	0.537						
23	0.413	0.526	46	0.291	0.376	800	0.07	0.091
24	0.404	0.515	47	0.288	0.372	900	0.065	0.086
25	0.396	0.505	48	0.284	0.368			
			49	0.281	0.364	1000	0.062	0.081
			50	0.279	0.361			

RIWAYAT HIDUP PENULIS

N R P : 7752/P
 N A M A : **SUDIRMAN, Ir.,SE.**
 PANGKAT : LAKSMA TNI
 TEMPAT / TGL. LAHIR : PURWOREJO , 10 - 06 - 1956
 S U K U : JAWA
 JABATAN : MABESAL/DISMINPERSAL/KA
 A L A M A T : PERUM KEBRAON MANIS TENGAH I/38 SURABAYA



I PENDIDIKAN UMUM

SD TAMAT TH.1969
SMP TAMAT TH.1972

SMA TAMAT TH.1975
S1/MANAJEMEN EKONOMI, UT-JKT TH.2004

II PENDIDIKAN MILITER

AAL-25 TH.1980
PADAN TIBLIN TH.1986
STTAL/T.EKA ANGK-6 TH.1986
SUS ILS TH.1990
SUS BHS.INGGRIS TH.1991

SESKOAL ANGK-32 TA.1994/1995
SUSTEKDIKPA TA.1995/1996
DITLAT COACHING TH.1999
SUSREG SESKO TNI ANGK-27 TH.2000
LEMHANNAS KRA-36 TH.2003

III BAHASA ASING

INGGRIS A

BAHASA DAERAH

JAWA A
TORAJA P

IV RIWAYAT PANGKAT

01-03-1980 LTD
01-04-1982 LTT
01-10-1985 KPT
01-04-1991 MAY

01-10-1995 LTK
01-10-1999 KOL
01-06-2006 LAKSMA

V RIWAYAT JABATAN

01-04-1980	ARMADA/SATFIB/KRI TLS (TELUK LANGSA-501)/DEP LEK/PADIV EKA	01-03-1996	KODIKAL/PUSDIKBANMIN/DEP DIK/KA
01-07-1982	ARMADA/SATFIB/KRI TLS (TELUK LANGSA-501)/DEP LEK/PADIV LEK	01-09-1996	KODIKAL/PUSDIKLEK/SEBALEK/DIR
04-04-1983	KODIKAL/STTAL/PASIS	15-02-1997	KODIKAL/PUSDIKLEK/DEP DIK/KA
01-11-1986	ARMATIM/SATKOR/KRI SAM (SAMADIKUN-341)/DEP OPS/PADIV EKASEN	01-07-1997	KODIKAL/DITJIAN/SUBDIT BANGDIK/KA
17-07-1989	ARMATIM/SATKOR/KRI MON (MONGINSIDI-343)/DEP LOG/KA	01-02-1999	SESKOAL/DITDIK/DEP RENBANGDIK/KA
01-08-1991	ARMATIM/PENUGASAN SAHARA BARAT	01-05-2001	KODIKAL/PUSDIKLEK/DAN
03-06-1992	ARMATIM/MAKOARMA/DENMAKO/DPB/KONTINGEN GARUDA-XII/MILITARY OBSERVERS UNTAC	15-07-2002	MABESAL/DISDIKAL/SUBDIS OPSDIK/KA
15-02-1994	ARMATIM/SATBAN/PASPROGA	24-03-2003	KOARMABAR/SAHLI PANG "D" JEMEN
15-07-1994	ARMATIM/MAKOARMA/DENMAKO/DPB/DIK SESKOAL	01-12-2003	MABESAL/SPERS KASAL/PABAN II BINTEM.
01-05-1995	KODIKAL/PUSDIKLEK/KAMA TEKLEDAS	05-05-2006	MABESAL/DISMINPERSAL/KA

VI TANDA - TANDA JASA

BT. JALASENA NARARYA
 SL. ADHY MAKAYASA
 SL. KESETIAAN VIII
 SL. KESETIAAN XVI
 SL KESETIAAN XXIV TAHUN
 SL. DWIDYA SISTHA
 SL. DWIDYA SISTHA I
 SL. DWIDYA SISTHA II
 SL. SANTI DHARMA
 THE UNITED NATIONS MEDAL PBB